

Heru Sulistiyo, S.Sos, M.Si

Sosiologi **Politik**



Heru Sulistiyo, S.Sos, M.Si

Sosiologi Politik



Sosiologi Politik

Copyright © 2023 Heru Sulistiyo

Penulis:

Heru Sulistiyo, S.Sos., M.Si.

Editor:

Sri Suniarti, S.I.P.

Layouter:

Andriyan

Desainer Cover:

SS Screen Creator

Diterbitkan oleh:

CV Cendekia Press

Anggota IKAPI No. 328/JBA/2018

<http://www.cendekiapress.com>

Cetakan Pertama, November 2023

ISBN: 978-623-5466-70-5

Hak Cipta dilindungi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan Pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum atau Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah mencurahkan segala anugerahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan literatur tentang “Sosiologi Politik”.

Literatur tentang sosiologi politik ini diawali dengan pengertian sosiologi dan politik yang kemudian mengantar pembaca memahami sosiologi politik dengan ulasan tentang pola pikir sosiologis. Selanjutnya diuraikan pokok-pokok bahasan sosiologi, pengertian sosiologi politik, kekuasaan, pemberdayaan masyarakat dalam politik dan politik pemerintahan. Pokok bahasan dalam literatur ini hanya mencakup sebagian dari berbagai pokok bahasan sosiologi politik yang sangat luas.

Akhirnya penulis berharap literatur ini dapat berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan para praja khususnya dan para pelaku pemerintahan pada umumnya. Tidak lupa penulis mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan penulisan selanjutnya. Semoga bermanfaat.

Jatinangor, September 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I BERPIKIR SOSIOLOGIS.....	1
A. PENDAHULUAN	1
B. OBJEK KAJIAN SOSIOLOGI.....	8
C. KEDUDUKAN SOSIOLOGI SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN	15
RINGKASAN :	22
BAB II POKOK BAHASAN SOSIOLOGI.....	25
A. FAKTA SOSIAL	25
B. TINDAKAN SOSIAL.....	29
C. PERILAKU SOSIAL	34
RINGKASAN :	37
BAB III PENGERTIAN SOSIOLOGI POLITIK.....	39
A. PENDAHULUAN	39
B. PENGERTIAN POLITIK	46
C. PENGERTIAN SOSIOLOGI POLITIK	76
RINGKASAN :	83
BAB IV KEKUASAAN	85
A. PENDAHULUAN	85
B. KONSEP KEKUASAAN	88
C. KEKUASAAN FORMAL	93

D. KEKUASAAN INFORMAL	101
E. KEKUASAAN POLITIK	108
RINGKASAN :	117
BAB V URUSAN PEMERINTAHAN DAN POLITIK PEMERINTAHAN	121
A. PENDAHULUAN	121
B. URUSAN PEMERINTAHAN.....	127
C. POLITIK PEMERINTAHAN.....	130
BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN POLITIK.....	139
A. PENDAHULUAN	139
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	145
C. PENDIDIKAN POLITIK.....	150
RINGKASAN :	160
DAFTAR PUSTAKA	163

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan perkembangan intelektual.....	3
Gambar 1.2 Teori Utama Sosiologi	8
Gambar 1.3 Alur Pikir Keberadaan Masyarakat	10
Gambar 3.1 Alur pikir pemahaman politik.....	47
Gambar 4.1 Faktor penentu keberhasilan bangsa	92
Gambar 5.1 Klasifikasi Urusan Pemerintahan	129
Gambar 5.2 Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan.....	131
Gambar 6.1 Interaksi antara SKE, SKK, dan SKS	144

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pertanggungjawaban	104
Tabel 5.1 Kebutuhan rakyat	122
Tabel 5.2 Perbandingan Pelayanan Publik dan Pelayanan Sipil	125
Tabel 5.3 Pelayanan Sipil (<i>Civil Service</i>)	126

BAB I

BERPIKIR SOSIOLOGIS

A. PENDAHULUAN



August Comte

Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang diberi kelebihan daripada ciptaan lainnya, yaitu diberinya akal untuk digunakan berpikir. Berpikir itu sendiri diperintahkan oleh Sang Pencipta untuk dilakukan agar bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Mana yang diperintahkan untuk dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan serta berbagai hal yang harus dipertimbangkan akibatnya sebelum melakukan sesuatu demi kebaikan manusia itu sendiri. Berpikir diperintahkan agar manusia bisa mengambil suatu pelajaran dari setiap kejadian dan perubahan di alam semesta ini. Kemampuan berpikir yang jernih dan rasional tidak serta merta bisa langsung dilakukan dalam hal diperlukan untuk memutuskan suatu persoalan. Akan tetapi juga melalui proses dan tahapan agar pemikiran itu menjadi matang, rasional, logis dan sistematis dalam memberikan suatu penilaian.

Salah satu filsuf tokoh pemikir terkemuka, Robert Ennis dari Amerika pemikiran kritis menyimpulkan, berpikir kritis merupakan penalaran mengenai keyakinan dan tindakan yang masuk akal yang fokusnya memutuskan apa yang dilakukan dan

dipercayai. Sedangkan ahli ilmu perilaku dan organisasional, professor Michael Scriven profesor menyampaikan bahwa berpikir kritis adalah proses disiplin intelektual untuk membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan/atau mengevaluasi informasi secara aktif dan terampil (gramedia.com)

Tahapan gambaran berpikir manusia manusia dalam menafsirkan gejala-gejala disekelilingnya oleh Agus Comte dalam Soekanto dan Sulistyowati (2014:29) menyatakan bahwa perkembangan intelektual dibagi dalam 3 (tiga) tahap, dimana disetiap tahapan menjadi bagian perkembangan dari tahapan sebelumnya. **Pertama** tahap teologis atau fiktif atau dimana setiap gejala yang ada disekelilingnya ditafsirkan secara teologis dalam pengertian dewa-dewalah yang mengendalikan semua atau kekuatan Tuhan. **Kedua** tahap metafisik yang merupakan perkembangan dari tahap teologis, yaitu disetiap gejala yang ada pasti terdapat kekuatan tertentu yang akhirnya pasti dapat diungkapkan meskipun tanpa ada verifikasi dan pencarian atau pembuktian secara ilmiah. **Ketiga** manusia mulai berpikir secara ilmiah. Untuk mempermudah pemahaman pemikiran Auguste comte tersebut bisa dilihat dalam gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1
Tahapan Perkembangan Intelektual

Sumber : Diolah penulis 2023 dari pendapat Aguste Comte dalam Soekanto (2014:29)

Pada tahap positif, dalam melihat suatu fenomena setiap manusia atau individu dapat menilai mengapa hal itu terjadi, dan setiap individu akan memiliki pendapat yang mungkin sama atau berbeda sama sekali. Hal yang demikian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat diklasifikasikan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, kepentingan dan lainnya. Faktor eksternalnya misalnya lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, tempat bekerja, maupun lingkungan dimana mereka tinggal.

Proses berpikir melalui internalisasi diri yang dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut akan menimbulkan persepsi yang sering berbeda meskipun ada kemungkinan kesamaan dan itu sangat kecil. Jadi bagaimana individu itu berpendapat dan melakukan penilaian terhadap suatu fenomena sosial berawal dari

konsep berpikir yang dimiliki masing-masing. Suatu misal seorang polisi atau satpam, konsep berpikirnya adalah masalah keamanan. Sehingga setiap melihat suatu fenomena atau kejadian maka mereka akan melihat kejadian itu dari sudut pandang keamanan. Seorang pedagang kaki lima, konsep berpikirnya adalah untung rugi, maka apabila mereka melihat suatu kejadian, akan berpikir ada tidak peluang untuk menjual barang dagangannya supaya mendapatkan keuntungan. Dan bagi mahasiswa bila melihat fenomena sosial akan selalu dikaitkan dengan kajian-kajian teoritik, mengapa hal itu terjadi dan apa hubungannya kejadian itu dengan lainnya, akan ada pemikiran analitik berdasarkan teori tertentu.

Objek kajian sosiologi adalah masyarakat, sehingga berpikir sosiologis tidak akan lepas dari konsep pemikiran sosiologi seperti fakta sosial, tindakan sosial, realitas sosial, proses sosial, interaksi sosial, perubahan sosial, kelompok sosial, kelembagaan masyarakat, termasuk kekuasaan, kewenangan dan kepemimpinan. Berpikir sosiologis dapat dimaknai sebagai proses berpikir yang melihat masyarakat beserta unsur-unsurnya dalam kehidupan sosial. Dengan demikian seni memahami kehidupan sosial hanya bisa dilakukan dengan cara berpikir sosiologis.

Masyarakat yang terdiri dari individu-individu atau manusia selalu disinggung dalam konsep sosiologi. Manusia sebagai faktor utama pokok bahasan sosiologi, yang memiliki sifat sangat dinamis dan kompleks. Guna memahami karakter manusia yang beragam dengan segala permasalahan dan kepentingannya, diperlukanlah teori. Teori utama dari sosiologi yang

biasanya dijadikan rujukan dalam mencermati berbagai fenomena sosial adalah teori fungsionalisme struktural, teori konflik, dan teori interaksionis simbolik.

Meskipun perkembangan teori-teori sosial terus berlanjut secara dinamik dan memunculkan kebaruan dalam perspektif mengenai sosiologi, ketiga teori tersebut tetap menunjukkan pengaruhnya dalam berbagai konsep sosiologi yang sering digunakan untuk mengkaji bermacam fenomena sosial. Dan teori sangatlah penting sebagai landasan analisis yang membantu manusia untuk melihat serangkaian fakta dan relasinya antara satu hal dengan yang lain. Teori utama sosiologi ini juga dapat mengantarkan kita untuk lebih dapat memahami berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat dalam hubungannya antara fenomena itu dengan yang lain.

Secara garis besar perspektif ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut:

1) Teori fungsionalisme struktural.

Anggapan dari teori fungsionalisme struktural adalah suatu hierarki atau stratifikasi sosial merupakan sebuah keniscayaan. Sistem yang terstratifikasi sebagai lingkungan masyarakat beraktivitas, berfungsi sebagaimana mestinya sesuai yang diperlukan. Dengan kata lain dapat dimaknai bahwa sebuah sistem membutuhkan stratifikasi. Yang perlu dipahami adalah bahwa stratifikasi adalah tentang posisi sosial dalam sebuah sistem. Dan bukan tentang seseorang yang menempati 'jabatan' tertentu. Suatu misal sebagaimana posisi organ tubuh, maka

ada hati, jantung, ginjal, dan yang lainnya, dimana setiap organ tersebut beraktivitas mencukupi keperluan fungsional bagi tubuh. Andaisaja terdapat salah satu posisi sosial yang tidak menjalankan fungsinya, maka sistem sosial akan terganggu, dan terjadilah disorganisasi dalam masyarakat.

Gagasan inti : Sistem sosial ibarat organ tubuh

Tokoh : Emile Durkheim, Talcott Parsons

2) **Teori konflik.**

Akar tradisi dari teori konflik adalah Marxian dimana perkembangan teori ini merupakan reaksi dari teori fungsionalisme struktural. Anggapan dari teori konflik adalah memandang relasi atau hubungan sosial yang ada dalam sistem sosial sebagai pertentangan kepentingan. Setiap kelas ataupun kelompok mempunyai perbedaan kepentingan. Dimana perbedaan itu disebabkan oleh berbagai hal, yaitu : *Pertama*, setiap manusia mempunyai pandangan dan pemikiran subjektif tentang dunia. *Kedua*, relasi sosial merupakan hubungan untuk saling memberi pengaruh, dengan kata lain setiap individu memiliki efek pengaruh terhadap individu lain. *Ketiga*, efek pengaruh dimaksud dapat menjadi potensi konflik interpersonal. Dengan demikian muatan relasi stratifikasi sosial bersifat konfliktual.

Gagasan inti : Struktur relasi sosial dibentuk oleh konflik kepentingan

Tokoh : Karl Marx, Randal Collins

3) **Teori interaksionisme simbolik.**

Anggapan dasar dari teori interaksionisme simbolik adalah interaksi sosial akan membentuk dan mempengaruhi kapasitas berpikir setiap individu. Mengapa demikian karena simbol-simbol dan makna-makna yang terkandung dalam setiap interaksi disuatu lingkungan itu dipelajari dan membuatnya berbeda dengan kondisi interaksi dilingkungan lainnya. Sehingga setiap simbol dan makna tersebut mendorong individu untuk bertindak dan berinteraksi dengan cara yang berbeda, seperti bagaimana memaknai sebuah kesuksesan akan banyak perbedaan karena setiap suku mempunyai bahasa dan budaya yang berbeda pula. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengubah dan memodifikasi makna yang digunakannya dalam proses interaksi menurut interpretasi atas situasi sosial. Mengubah simbol dan makna dapat dilakukannya atas pertimbangan untung dan rugi, kemudian mana yang dianggapnya menguntungkan, itulah yang jelas akan dipilih. Dengan demikian perbedaan kelompok dalam masyarakat disebabkan oleh pola tindakan dan interaksi.

Gagasan inti : Pemikiran seseorang dibentuk oleh interaksi sosial

Tokoh : Herbert Blumer

Untuk lebih mudah memahami ketiga teori utama sosiologi tersebut dapat diringkas dalam gambar Gambar 1.2 dibawah ini :

TEORI UTAMA SOSIOLOGI		
TEORI FUNGSIONAL STRUKTURAL.	TEORI KONFLIK	TEORI INTERAKSIONIS SIMBOLIK.
GAGASAN INTI :	GAGASAN INTI :	GAGASAN INTI :
SISTEM SOSIAL IBARAT ORGAN TUBUH.	STRUKTUR RELASI SOSIAL DIBENTUK OLEH KONFLIK KEPENTINGAN.	PEMIKIRAN SESEORANG DIBENTUK OLEH INTERAKSI SOSIAL.
TOKOH : Emile Durkheim Talcott Parsons	TOKOH : Karl Marx Randal Collins	TOKOH : Herbert Biumer

Gambar 1.2
Teori Utama Sosiologi

Sumber : Diolah penulis 2023

B. OBJEK KAJIAN SOSIOLOGI



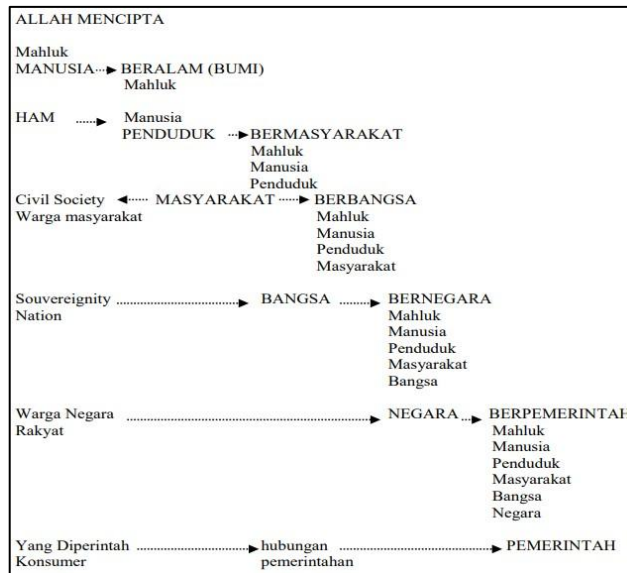
Merujuk pada pemikiran Ndraha (2011:1) tentang rute pemikiran kybernology secara runtut akan dipahami terbentuknya masyarakat sebagai objek kajian sosiologi. Dimana dalam rute tersebut diawali dari konsep makhluk. Dengan adanya makhluk maka tentu manusia berpikir tentang keberadaan Tuhan Sang Pencipta. Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan membawa sifat-sifat kemakhlukannya di muka bumi. Dengan membuminya manusia maka pemikiran selanjutnya adalah berkembangnya manusia tersebut menjadi penduduk karena hidup berkelompok dan saling berinteraksi. Penduduk dengan kemakhlukannya

dan kemanusiaannya tersebut kemudian bermasyarakat yang akhirnya membawanya ke sistem-sistem sosial, hukum, budaya, politik, kewarganegaraan dan sebagainya, dan dengan sistem-sistem itu manusia mengelola berbagai kepentingan dan konflik yang bisa dijelaskan dengan sosiologi.

Alur pikir pemikiran Ndraha tersebut sebenarnya berlanjut sampai dengan terbentuknya negara untuk membawa pembaca pada keberadaan pemerintah dalam hubungannya dengan yang diperintah. Namun dalam kajian ini pemikiran tersebut diambil pada batas pokok bahasan berkaitan dengan keberadaan masyarakat.

Masyarakat yang awal terbentuknya diawali dengan proses *assosiatif* atau proses dekat mendekati dan proses *dissosiatif* atau jauh menjauhi antara penduduk yang satu dengan penduduk lainnya. Suatu proses yang terjadi secara alami mengingat tidak ada seorangpun yang dapat dan mampu untuk hidup sendiri tanpa orang lain, karena statusnya sebagai makhluk sosial yang selalu bermasyarakat. Interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang disebabkan oleh hal tertentu seperti dalam upaya pemenuhan hidupnya, atau tujuan tertentu yang telah disepakati, dan interaksi itu dilakukan secara terus-menerus dengan pola-pola tertentu yang akhirnya terbangun nilai-nilai, norma-norma, maka terbentuklah suatu masyarakat.

Secara lengkap pemikiran tersebut dapat dipahami dalam gambar 1.1 dibawah ini.



Gambar 1.3
Alur pikir keberadaan masyarakat

Sumber : Ndraha (2011:1)

Enam generasi alur pemikiran tersebut diatas satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkelanjutan, yang berawal dari sesuatu yang sifatnya mendasar dan abstrak, atau teoritikal serta berakhir pada hal yang bersifat normatif, kelembagaan, manajemen, teknikal atau praktikal.

Sejalan dengan Ndraha berkaitan dengan terbentuknya masyarakat disampaikan oleh Budiardjo (2010:46) bahwa setiap manusia memiliki naluri untuk hidup bersama, mereka harus memenuhi kebutuhan fisik dan mentalnya secara berkelompok karena tidak dapat dipenuhinya kebutuhan itu secara sendirian. Oleh karenanya mereka perlu berinteraksi, perlu membangun nilai-nilai, perlu diorganisir dalam kelompok-

kelompok atau asosiasi, perkumpulan-perkumpulan dan lain sebagainya agar semua kepentingannya dapat dipenuhi.

Masyarakat sebagai objek kajian sosiologi dapat dibatasi dengan definisi dari masyarakat itu sendiri. Dari definisi itu sosiologi melihat masyarakat dari sudut pandang bagaimana hubungan dan proses yang timbul akibat dari hubungan individu yang ada dalam masyarakat itu. Menurut para ahli dalam Soekanto & Sulistyowati (2018:21) definisi masyarakat dapat disampaikan sebagaimana dibawah ini :

- 1) MacIver dan Page menyampaikan pengertian masyarakat sebagai sebuah sistem yang terbangun dari wewenang, tatacara dan kebiasaan, serta jalinan kerja sama antara bermacam kelompok dan penggolongan, yang terdapat pengawasan perilaku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat. Masyarakat sebagai jalinan relasi sosial yang selalu selalu mengalami berubah.
- 2) Ralph Linton, Masyarakat adalah kesatuan sosial yang memiliki batas-batas jelas, sebagai kelompok individu yang bekerja sama dan keberadaannya sudah cukup lama, memiliki norma dan aturan sendiri dalam memenuhi kebutuhannya,
- 3) Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Ketiga definisi yang berbeda tersebut diatas pada prinsipnya memuat unsur yang sama seperti adanya kehidupan bersama, adanya sistem nilai yang disepakati, adanya kewenangan dan kerjasama. Tentunya masih banyak definisi lainnya tentang masyarakat yang disampaikan oleh para tokoh sosiologi. Suatu misal pengertian masyarakat yang dihubungkan dengan unsur kekuasaan menurut Schermerhorn. Inti dari pendapat Schermerhorn bahwa kekuasaan diawali dari hubungan, baik itu hubungan simetris maupun asimetris. Hubungan simetris yang tidak bersinggungan dengan adanya unsur kekuasaan didalamnya adalah hubungan persahabatan, karena dalam hubungan itu dilandasi dengan rasa tulus, saling mengalah, dan ada pengorbanan didalamnya.

Dalam uraiannya, hubungan simetris ini disampaikan oleh Soekanto (2002 : 480) yang memaknai hubungan persahabatan tersebut dalam empat kondisi yang saling berkaitan yaitu :

- a) Hubungan antara dua orang teman merupakan hubungan antara berbagai pihak yang berkedudukan sederajat. Dalam pengertian setiap pihak saling bisa memberi pengaruhnya. Harmoni gejala saling memberi pengaruh berarti adanya gejala simetris.
- b) Tingkah laku afektif tertentu merupakan dorongan untuk mengadakan hubungan.
- c) Kedua pihak mengacu pada kaidah atau nilai kerja sama dan mutualitas yang sama.
- d) Imbalan lebih menonjol daripada hukuman, atau yang lebih dominan adalah sanksi positif.

Lebih lanjut disampaikan oleh Soekanto (2013:130) yang mendefinisikan masyarakat sebagai masyarakat setempat (*Community*), masyarakat pedesaan (*Rural Community*) dan masyarakat perkotaan (*Urban Community*).

a) Masyarakat Setempat (*Community*)

Masyarakat setempat (*Community*) bercirikan hidup bersama di wilayah tertentu dan dapat memenuhi kepentingan hidupnya, adanya solidaritas yang tinggi *atau social relationships* antara anggota kelompok, dan hubungan itu lebih kuat kedalam daripada dengan masyarakat diluar batas wilayahnya. Disamping itu ikatan memiliki perasaan komuniti (*Community sentiment*) yang kuat yang meliputi seperasaan, sepenanggungan, saling membutuhkan) dan keyakinan bahwa tanah yang ditinggali dapat memberikan kehidupan.

b) Masyarakat Pedesaan (*Rural Community*)

Masyarakat Pedesaan (*Rural Community*) bercirikan hidup berkelompok dalam suasana kekeluargaan dengan mata pencaharian umum di bidang pertanian, meskipun tidak semua warga desa memiliki tanah. Ketergantungannya dengan tanah menimbulkan kerjasama yang biasa disebut gotong royong. Kebersamaan ini bisa disaksikan pada saat musim tanam dan panen, dan hasil pertaniannya biasanya diutamakan untuk mencukupi kehidupannya sendiri. Gotong royong juga bisa disaksikan pada saat pendirian rumah yang dikerjakan bersama-sama dengan lingkungan

sekitar. Pembagian kerja didasarkan pada usia sebagai ukuran kemampuan fisik, bukan berdasarkan keahlian. Orang tua begitu sangat dihormati karena sebagai tempat meminta nasehat. Para orang tua teguh memegang tradisi, sehingga sulit apabila menghendaki perubahan terjadi dari pola pikir sosial ke pola pikir yang lebih ekonomis. Meskipun demikian masyarakat pedesaan sebarangpun kecilnya pasti ada pengaruh dari masyarakat perkotaan, inilah yang membedakan antara masyarakat setempat dengan masyarakat pedesaan.

Dari sudut pandang pemerintahan tentang ketokohan dalam masyarakat sering ditampilkan terjadinya peran ganda. Misalkan ditingkat desa, seorang kepala desa atau perangkat desa karena jabatannya secara tidak langsung juga bisa berperan sebagai tokoh masyarakat. Sehingga di setiap acara yang melibatkan mereka yang dituakan menjadi sulit untuk dibedakan apakah peran yang sedang dibawa adalah aparatur desa ataukah sebagai tokoh masyarakat. Kemudian dari sisi hubungan masyarakat dengan penguasa, dalam *rural community* berlangsung informal/tidak resmi yang didasarkan pada azas musyawarah mufakat.

c) Masyarakat Perkotaan (*Urban Community*)

Masyarakat Perkotaan (*Urban Community*) mempunyai pandangan yang berbeda yang selalu dihubungkan dengan kedudukan sosialnya. Baik berkaitan dengan pakaian, makanan, maupun perumahan. Pandangan lingkungan sekitar juga

menjadi pertimbangan agar dapat memberi kesan tingkat kemapaman. Secara umum masyarakat perkotaan dapat dicirikan sebagai berikut :

- Cenderung ke arah *secular trend* dari pada ke *religious trend*
- Mementingkan mengurus diri sendiri daripada kelompok
- Terbentuknya *small group* karena pengelompokan pekerjaan dengan keahliannya
- Sistem pembagian kerja memungkinkan memberi peluang kerja yang lebih luas daripada di desa.
- Interaksi sosial didasarkan pada kepentingan daripada faktor pribadi
- Waktu menjadi perhatian penting untuk dapat memenuhi kebutuhan karena ritme hidup yang serba cepat.
- Keterbukaan kota menerima pengaruh dari luar menyebabkan perubahan sosial yang cepat.

C. KEDUDUKAN SOSIOLOGI SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN

Pengetahuan adalah tentang semua yang diketahui, baik melalui usaha maupun tidak. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah



pengetahuan rasional yang didukung oleh bukti-bukti empiris dan memiliki paradigma serta metode tertentu. Paradigmanya dinamakan paradigma sains (*scientific paradigm*) dan metodenya dinamakan metode ilmiah (metode sains, *scientific method*). Formula utamanya dalam pengetahuan sains adalah buktikan bahwa itu rasional dan tunjukkanlah bukti empirisnya. Tafsir (2010:6).

Dari beberapa *literature* yang membahas kedudukan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri sejak berdiri sampai perkembangannya dewasa ini dirasa sudah cukup sebagai bukti nyata. Emile Durkheim adalah tokoh yang meletakkan sosiologi pada dunia empiris, yang mencoba melepaskan diri dari pemikiran filsafat August Comte. Perhelatan para tokoh pemikir sosiologi telah banyak memberikan sumbangsinya dengan paradigma-paradigma yang saling menguatkan atau sebaliknya melemahkan dengan kritikan-kritikan tajam. Istilah paradigma dikemukakan oleh Kuhn yang kemudian direduksi oleh Masterman kedalam tiga tipe, yaitu paradigma metafisik (*metaphysical paradigm*), paradigma sosiologis (*sociological paradigm*), dan paradigma konstruk (*construct paradigm*). Menurut Robert Friedrichs dalam Ritzer (2018:6) paradigma diartikan sebagai suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) yang semestinya dipelajarinya (*a fundamental image a discipline has of its subject matter*).

Dalam sosiologi sendiri, perhelatan pemikiran yang berbeda paradigma terus berlanjut antar masing-masing komunitas/ilmuwan dan saling mencari

pengaruh dengan teori-teori dan metode yang mereka bangun. Diantara tujuannya juga tidak lepas agar mendapatkan perhatian yang lebih dari kekuasaan, sehingga perhelatan tersebut tetap saja dalam lingkup nilai-nilai yang berjalan pada masanya. Hal ini jugalah yang menyebabkan sosiologi terus berkembang dari awal pertumbuhannya sampai dengan keberadaannya saat ini.

Perbedaan-perbedaan pandangan pemikiran dengan objek bahasan yang sama itu terjadi disebabkan berbagai faktor yang melingkupi dimana menurut Ritzer (2018:8) disebabkan oleh tiga faktor yaitu :

- a) Adanya perbedaan dari sisi filsafat sebagai dasar pemikiran ilmuwan tentang apa yang semestinya menjadi substansi atas cabang ilmu yang digelutinya.
- b) Sebagai konsekuensi logis atas perbedaan pandangan filsafat, sehingga teori-teori yang dibangun dan dikembangkan oleh setiap komunitas ilmuwan itu berbeda.
- c) Adanya perbedaan metode yang digunakan untuk memahami substansi atau materi pokok ilmu.

Pandangan secara umum atas perbedaan-perbedaan paradigma dalam sosiologi merupakan hal yang sangat wajar terjadi mengingat sosiologi sebagai ilmu sosial sosial yang kompleks dengan obyek bahasan masyarakat yang dinamis. Tentu saja hal tersebut melibatkan berbagai macam pandangan dari sudut pandang yang berbeda, termasuk teori dan metodenya, serta pendekatan-pendekatannya dalam mempelajari masyarakat dengan fenomena sosialnya.

Diantara faktor-faktor penyebab tersebut dapat diinventarisir sebagai berikut :

- a. Sejarah perkembangan:
Paradigma dalam sosiologi terus berkembang sejalan dengan perkembangan waktu. Para ahli pemikir sosiologi klasik seperti Emile Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber mempunyai pandangan yang berbeda berkaitan dengan masyarakat termasuk peran individu yang ada didalamnya. Karya-karya dari para tokoh tersebut telah mendasari pola pikir berbagai paradigma sosiologi.
- b. Perbedaan perspektif/sudut pandang teoritis:
Pendekatan teoretis yang berbeda sering dipakai para sosiolog dalam mempelajari masyarakat. Sebagian ada yang memakai teori fungsionalisme dengan penekanan stabilitas sosial, beberapa lainnya lebih cenderung dengan teori konflik dengan bahasan stratifikasi sosial, dan sebagian yang lain menggunakan pendekatan interaksionis simbolik yang menekankan pemaknaan individu dipengaruhi interaksi sosial.
- c. Perbedaan pendekatan metodologis :
Sosiologi memakai bermacam metode penelitian seperti observasi, wawancara, dokumentasi, survei, dan analisis statistik. Dimana metode penelitian yang digunakan akan berpengaruh terhadap pandangan dan temuan para sosiolog, yang mengakibatkan perbedaan sesuai dengan paradigma yang dianut.

d. Perbedaan asumsi dasar:

Karena pendekatan teori yang berbeda, menyebabkan perbedaan dalam memberikan asumsi dasar berkaitan dengan masyarakat, individu, dan proses sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam teori utama sosiologi yaitu teori fungsionalisme yang mengasumsikan masyarakat sebagai suatu sistem, dan teori konflik berfokus pada stratifikasi sosial yang disebabkan oleh konflik kepentingan, serta teori interaksi simbolik yang menekankan bahwa pandangan masyarakat atau individu dipengaruhi oleh interaksi sosialnya.

e. Perkembangan baru dalam ilmu sosial:

Globalisasi dan teknologi informasi telah mengantar dan merubah cara pandang sosiolog dalam mempelajari masyarakat. Hal ini tentu akan memungkinkan bermunculannya paradigma baru sosiologi.

f. Perbedaan budaya dan konteks sosial:

Budaya, nilai-nilai, dan norma-norma, dalam konteks sosial di berbagai wilayah geografis jelas dapat memengaruhi paradigma sosiologi. Pendekatan yang dianggap sesuai dalam konteks sosial tertentu, bisa saja tidak cocok dalam konteks sosial lainnya.

Dengan demikian, berbagai perbedaan paradigma dalam sosiologi sebagaimana diuraikan diatas merupakan hal yang biasa, wajar, dan justru bermanfaat, karena memungkinkan bagi sosiologi memiliki keberagaman dalam pendekatan dan

pemikiran. Demikian juga memungkinkan sosiologi untuk lebih dapat dan mampu mempelajari, memahami, dan menjelaskan masyarakat dengan segala kebutuhan dan masalahnya dengan teori-teori yang terus berkembang. Karena teori sebagai kerangka konseptual atau model abstrak memang diperlukan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi semua kejadian atau fenomena sosial yang ada, yang dengan olehnya tersusun secara terstruktur semua informasi-informasi, pengalaman, serta pengorganisasian data yang dapat diuji kebenarannya. Jadi dalam ilmu sosial atau ilmu-ilmu lainnya, teori disamping dijadikan dasar dalam penelitian juga menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Secara terperinci diantara manfaat atau fungsi dari teori dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Menjelaskan:

Teori membantu dalam menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi dan proses berfungsi, termasuk memberikan penjelasan atas hubungan sebab-akibat serta pola-pola yang bisa dicermati dalam fenomena yang ada.

b. Memprediksi:

Teori bisa dijadikan alat untuk meramalkan fenomena dan perilaku di masa yang akan datang yang didasarkan pada pemahaman prinsip dan pola-pola tertentu yang terus diamati. Sehingga bisa digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

- c. Memahami:
Teori dapat membantu memahami konteks yang lebih besar di mana suatu fenomena beroperasi. Ini dapat membantu dalam melihat budaya, implikasi sosial, dan ekonomi atas suatu fenomena.
- d. Mengorganisasi pengetahuan:
Teori dapat membantu individu dalam mengorganisasi informasi dan data sehingga menjadi lebih teratur dan terstruktur. Sehingga dalam memahami suatu fenomena dapat lebih sistematis.
- e. Mendukung penelitian:
Teori seringkali dijadikan sebagai dasar dalam perancangan penelitian dan proses pengumpulan data. Dalam penelitian empiris dapat dimanfaatkan untuk menguji termasuk memvalidasi teori.

Manfaat dari teori-teori sosiologi disampaikan oleh Soekanto dan Sulistyowati (2014:26) yang dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Teori merupakan ikhtisar atas suatu hal yang sudah diketahui yang pengujian kebenarannya berkaitan dengan objek dari sosiologi.
- b. Teori dapat menunjukan berbagai kekurangan yang ada dalam diri seseorang dalam hal pendalaman pengetahuannya di bidang sosiologi.
- c. Teori bermanfaat guna mempertajam atau dapat lebih fokus terhadap fakta yang dipelajari oleh sosiologi.
- d. Suatu teori bermanfaat dalam pengembangan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-

konsep termasuk mengembangkan definisi dan pengertian yang berguna untuk penelitian.

- e. Pengetahuan teoritis memungkinkan guna mengadakan proyeksi sosial, yang merupakan usaha guna memahami dimana arah perkembangan masyarakat berdasarkan fakta yang diketahui pada masa yang sudah lampau dan pada masa dewasa ini.

Pada dasarnya teori adalah relasi antara dua fakta atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Sebagaimana diuraikan diatas bahwa fakta yang merupakan sesuatu itu secara umum bisa diteliti dan pada dasarnya dapat dilakukan pengujian secara empiris dengan paradigma (*scientific paradigm*) dan metode tertentu (metode sains, *scientific method*).

RINGKASAN :

- 1) Tahapan berpikir manusia menurut August Comte adalah tahap *pertama*, teologis (percaya atas kekuatan Tuhan, roh, dan dewa-dewa. Tahap *Kedua*, metafisik (percaya atas kekuatan alam tanpa pembuktian ilmiah. *Ketiga*, tahap positif (manusia mulai berpikir secara ilmiah).
- 2) Persepsi setiap individu dalam memberikan reaksi terhadap suatu fenomena sosial berbeda-beda berdasarkan konsep berpikir yang ada dalam dirinya. Konsep berpikir itu dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan, dan pekerjaan/profesi masing-masing individu yang tidak sama.

- 3) Teori utama sosiologi berkontribusi besar dalam mempelajari politik adalah *pertama*, teori fungsional struktural dengan gagasan inti sistem sosial ibarat organ tubuh. *Kedua*, teori konflik dengan gagasan inti struktur hubungan sosial dibentuk oleh konflik kepentingan, dan *ketiga*, teori interaksionis simbolik dengan gagasan inti bahwa pemikiran seseorang dibentuk oleh interaksi sosial.
- 4) Pemikiran Ndraha : Penduduk dengan kemakhlukluran dan kemanusiaannya kemudian bermasyarakat yang akhirnya membawanya ke sistem-sistem sosial, hukum, budaya, politik, kewarganegaraan dan sebagainya, dan dengan sistem-sistem itu manusia mengelola berbagai kepentingan dan konflik yang bisa dijelaskan dengan sosiologi.
- 5) Masyarakat sebagai kajian sosiologi pada prinsipnya memuat unsur-unsur yaitu adanya kehidupan bersama, adanya sistem nilai yang disepakati, adanya kewenangan dan kerjasama. Masyarakat dedefinisikan sebagai masyarakat setempat (*Community*), masyarakat pedesaan (*Rural Community*) dan masyarakat perkotaan (*Urban Community*).
- 6) Pengetahuan adalah tentang semua yang diketahui, sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang rasional dan didukung oleh bukti-bukti empiris yang mempunyai paradigma dan metode tertentu. Formula utama dalam dalam pengetahuan sains ialah buktikan bahwa itu rasional dan tunjukkan bukti empirisnya.
- 7) Para pemikir sosiologi dengan masing-masing paradigmanya yang saling menguatkan dan melemahkan justru menjadikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan semakin berkembang. Meskipun demikian, diantara tujuan

dari perhelatan tersebut juga tidak lepas dari tujuan untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari kekuasaan.

- 8) Teori-teori sosiologi bermanfaat dalam memberikan petunjuk, memperdalam, dan mempertajam diri seseorang dalam melakukan kajian dibidang sosiologi dan dapat memproyeksikan perkembangan masyarakat kedepan berdasarkan masa lampau dan masa kini.
- 9) Perbedaan paradigma dalam sosiologi merupakan hal yang biasa, wajar, dan justru bermanfaat, karena memungkinkan bagi sosiologi memiliki keberagaman dalam pendekatan dan pemikiran, serta memungkinkan sosiologi mampu mempelajari, memahami, dan menjelaskan masyarakat dengan segala kebutuhan dan masalahnya.

BAB II

POKOK BAHASAN SOSIOLOGI

A. FAKTA SOSIAL



Pengertian Fakta sosial (*social Facts*) dijelaskan oleh Durkheim (1985) bahwa fenomena sosial tidak dapat

direduksikan pada ranah individual, tidak juga biologis atau psikologis, tetapi tergantung pada fakta sosial. Jadi dia berpendapat bahwa tingkat bunuh diri (*Suicide*) didalam kelompok sosial tidak dapat dijelaskan, misalnya, dengan kecenderungan depresi individual dalam kelompok sosial, tetapi kiranya hal itu dijelaskan melalui tingkat kepaduan kelompok sosial, sebagaimana diungkapkan, misalnya oleh kelaziman dan jenis kepercayaan religius. Durkheim merumuskan prinsip ini di dalam doktrin fakta sosial yang menurut pendapatnya bersifat eksternal, memaksa, dan objektif. Sebagai kekuatan sosial, mereka ada diluar individu, mereka mengekang, sedemikian rupa sehingga individu-individu dipaksa bertindak oleh kekuatan-kekuatan itu, dan kekuatan-kekuatan itu bisa diperhitungkan secara objektif. Tingkat bunuh diri dalam setiap masyarakat adalah fakta sosial semacam itu. Hal itu eksis terlepas dari individu, mempresentasikan kekuatan eksternal yang menentukan dan dapat diukur. (kamus sosiologi, 2010:518).

Fakta sosial (*social facts*) adalah pokok bahasan sosiologi yang dicetuskan oleh Durkheim sebagai kritik dari pemikiran August Comte dan Spencer yang lebih menitikberatkan pada dunia ide yang bersifat filosofis daripada berpikir sosiologis. Menurut Durkheim penyelidikan sosiologi itu ada di dunia nyata dalam kehidupan bermasyarakat, bukan pada dunia filsafat dan psikologi yang akan menyebabkan sosiologi tidak bisa berdiri sendiri. Inti dari pernyataan Durkheim dijelaskan oleh Ritzer (2018:14) bahwa fakta sosial (*social facts*) tidak dapat dipelajari melalui introspeksi. Fakta sosial harus diteliti dalam dunia nyata sebagaimana orang mencari barang sesuatu yang lainnya.

Fakta sosial menurut Durkheim terdiri dari :

- a. Dalam bentuk material
Yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata (*external world*). Contohnya arsitektur dan norma hukum.
- b. Dalam bentuk non material
Yaitu sesuatu yang dianggap nyata (*external*). Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat intersubjektif yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia. Contohnya adalah egoisme, altruisme, dan opini.

Para penganut paradigma fakta sosial ada yang mengabaikan pendapat Durkheim terkait dengan fakta

sosial yang bersifat non materiil. Seperti Warriner dengan fokus studinya tentang kelompok sebagai fakta sosial. Kelompok yang selama ini selalu dikaitkan dengan bidang ekonomi dan politik oleh Warriner dianalisis dan dijadikan studi sosiologi dengan proposisi (Ritzer, 2018:18) :

- a. Kelompok sifatnya abstrak daripada individu, dalam pengertian untuk melihat kelompok yang bisa dilakukan adalah melihat individu-individu dalam kelompok itu.
- b. Kelompok terbentuk daripada kumpulan individu.
- c. Fenomena sosial hanya memiliki realitas dalam individu-individu.
- d. Tujuan mempelajari kelompok sebenarnya untuk membantu menjelaskan dan untuk memprediksi tingkah laku individu.

Ada dua pokok bahasan sosiologi tentang fakta sosial, *pertama* struktur sosial (*social structure*) yang berkaitan dengan jaringan hubungan sosial, proses interaksi yang kemudian terorganisir, posisi dan peran yang membedakan antar individu dan kelompok. *Kedua* pranata sosial (*social institution*) yang berhubungan dengan sebuah nilai dan norma. Bagaimana hubungan dan sifat-sifat dasar dari kedua pokok bahasan tersebut menjadi objek kajian sosiologi. Contoh fakta-fakta sosial misalnya keluarga, komunitas-komunitas, kesatuan masyarakat tertentu, nilai-nilai, posisi, peranan, pemerintahan dan lainnya. Dalam karyanya Durkheim menghubungkan antara struktur sosial dan pranata sosial atau menukarkan dan menyamakannya. Asumsi lainnya adalah bahwa setiap pranata sosial jelas memiliki struktur, misalnya pemerintahan jelas

mempunyai organisasi, aturan, dan organisasi. Meskipun demikian keduanya dalam paradigma fakta sosial tetap dijadikan objek studi sosiologi.

Dalam kamus sosiologi yang ditulis oleh Abercrombi, Hill, dan Turner (2010:12) berkaitan dengan agensi dan struktur (*agency and structure*) dijelaskan bahwa perdebatan penting dari teori sosiologi adalah hubungan antara individu dengan struktur sosial. Bagaimana struktur sosial tersebut menentukan tindakan individu dan bagaimana struktur itu diciptakannya, serta dalam batas-batas mana individu itu bebas bertindak tanpa hambatan struktural. Diuraikan lebih lanjut bahwa sesungguhnya ada tiga posisi dalam perdebatan dimaksud, yaitu :

- a) Pendapat beberapa sosiolog menyampaikan bahwa struktur tidak bisa dianggap determinan. Bagaimana individu menciptakan dunia disekitarnya merupakan hal yang sangat penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa struktur sosial itu tidak ada.
- b) Pendapat yang berseberangan menyampaikan bahwa sosiologi harusnya konsentrasi pada struktur-struktur sosial yang bisa menentukan tindakan dan watak individu yang mengakibatkan watak *agency* menjadi tidak penting sebagaimana yang disampaikan oleh Durkheim.
- c) Pandangan yang bersifat kompromi dari kedua pendapat yang berseberangan tersebut disampaikan oleh P. Berger dan T. Luckmann (1967) yang menyatakan bahwa adanya proses dialektis :

Individu memberikan makna pada dunia mereka yang selanjutnya dari pemaknaan itu menjadi struktur sosial atau dengan kata lain terlembagakan. Struktur sosial menjadi bagian dari sistem makna guna membatasi tindakan mereka.

B. TINDAKAN SOSIAL

Tindakan sosial (*social action*) sebagai pokok bahasan sosiologi yang dimaknai oleh Weber sebagai tindakan yang penuh arti, yaitu tindakan



individu yang bermakna subyektif untuk dirinya yang diarahkan juga bagi orang lain. Untuk mengetahui apakah tindakan individu itu termasuk dalam tindakan sosial atau bukan, maka perlu dilihat dari hubungan atau tujuan dari tindakan itu. Hal ini yang membedakan pandangan Weber tentang pokok bahasan sosiologi dengan konsep fakta sosial yang digagas oleh Durkheim, meskipun sebenarnya ada sisi-sisi kedekatannya, yaitu analisisnya tentang tindakan sosial yang cakupannya tentang fakta sosial.

Dijelaskan pendapat Weber ini dalam (Ritzer, 2018:38) bahwa sosiologi dirumuskan sebagai ilmu untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Konsep dasarnya adalah tindakan sosial dan penafsiran pemahaman yang digunakan untuk memahami tindakan sosial itu sendiri. Misalnya seseorang yang

memecahkan batu, tidak bisa dianggap sebagai tindakan sosial. Akan tetapi apabila memukul batu itu dengan tujuan untuk mengganggu orang disebelahnya, maka itu bisa dianggap sebagai tindakan sosial dan bisa dianalisis lebih lanjut apa hubungan sipemukul batu tersebut dengan orang yang hendak diganggunya. Ringkasnya suatu tindakan yang nyata tidak termasuk sebagai tindakan sosial apabila ditujukan pada benda mati dengan manfaat subyektif.

Lebih lanjut disampaikan tentang tindakan sosial yang oleh Weber diklasifikasikan dalam dua kategori utama, yaitu :

a. Tindakan Sosial Rasional:

Yaitu suatu tindakan sosial yang didasarkan pada rasionalitas dengan tujuan tertentu dengan cara yang efisien. Misalnya tindakan yang bersifat administratif atau tindakan dalam bidang ekonomi.

b. Tindakan Sosial Non Rasional:

Yaitu suatu tindakan sosial yang tidak selalu mendasar pada pertimbangan rasional, tetapi terkadang dipengaruhi dan melibatkan kebiasaan, tradisi, bahkan emosi. Misalnya perilaku dalam ritual tertentu atau tindakan yang didasarkan pada keyakinan irasional.

Beberapa hal penting yang dianggap dapat menjelaskan berkaitan dengan tindakan sosial antara lain sebagaimana berikut :

a. Makna Sosial:

Makna sosial disini berkaitan erat dengan nilai-nilai, norma-norma bahkan keinginan sosial. Sehingga suatu tindakan sosial dikatakan bermakna sosial dikarenakan tindakan yang telah dilakukan konteks pemahamannya melibatkan masyarakat yang luas, tidak terbatas pada individu atau suatu kelompok tertentu yang melakukan tindakan tersebut.

b. Motivasi dan Niat:

Sebagaimana disinggung dalam penjelasan sebelumnya terkait dengan contoh si pemukul batu yang mana bisa dimaknai sebagai tindakan sosial apabila tujuan memukul batu adalah untuk mengganggu individu atau kelompok disebelahnya. Dan tidak akan bermakna sosial apabila niat dari memukul batu adalah untuk memenuhi kehidupannya secara pribadi. Artinya niat dan motivasi tindakan sosial yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok harus ditujukan untuk memenuhi nilai atau norma sosial dan bukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri.

c. Interaksi Sosial:

Interaksi sosial baik yang bersifat positif maupun negatif adalah bagian dari tindakan sosial yang melibatkan individu atau kelompok. Interaksi sosial yang sifatnya positif seperti kerjasama, koorporasi, organisasi dan lainnya, sedangkan yang sifatnya negatif misalnya konflik antar kelompok. Tergantung pada konteks dan tujuannya, pada intinya tindakan sosial seringkali melibatkan interaksi sosial.

d. Pola dan Struktur Sosial:

Pola dan struktur sosial yang ada di masyarakat dibentuk oleh tindakan sosial. Artinya suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu dan kelompok dalam masyarakat akan menjadi pola dan norma sosial didalam masyarakat itu sendiri.

e. Kemasyarakatan:

Tindakan sosial merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan sosial tersebut membantu dalam pemeliharaan tatanan sosial, membentuk identitas sosial, dan kohesi sosial.

f. Variabilitas:

Tindakan sosial bisa bervariasi secara signifikan antara budaya dalam masyarakat dan waktu. Apa yang dianggap sebagai tindakan sosial dalam budaya dan masyarakat tertentu, bisa jadi dianggap tidak pantas atau bahkan tidak dapat diterima bagi masyarakat lainnya. Atau dalam waktu tertentu tindakan sosial itu bisa diterima dalam suatu masyarakat, akan tetapi tidak bisa dianggap sebagai tindakan sosial pada kurun waktu berikutnya meskipun dalam satu masyarakat yang sama.

g. Perubahan Sosial:

Tindakan sosial dapat dijadikan sebagai pendorong perubahan sosial. Suatu misal apabila individu atau kelompok ada yang melakukan tindakan dan dianggap melanggar norma sosial atau bertabrakan dengan struktur sosial yang ada, hal tersebut dapat memicu perubahan di masyarakat.

Dengan demikian semakin jelaslah bahwa tindakan sosial dalam konsep sosiologi sangatlah penting untuk dipelajari karena membantu memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam masyarakat dan bagaimana tindakan tersebut membentuk dunia sosial di sekitar kita.

Dari uraian diatas dapat diambil pembelajaran bahwa konsep antar hubungan sosial (*social relationship*) memerlukan persyaratan atau kriteria tertentu. Tidak semua kerumunan orang bisa dikatakan sebagai hubungan sosial apabila tidak ada didalamnya saling penyesuaian. Sebagaimana disinggung diatas bahwa konsep antar hubungan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang berbeda-beda sepanjang tindakan itu memiliki makna dan dihubungkan serta diarahkan kepada orang lain. Dijelaskan oleh Weber dalam Soekanto (2010:9) bahwa perilaku sosial yang paling penting adalah resiprokal atau perilaku sosial yang timbal balik dimana perilaku resiprokal tersebut cerminannya adalah hubungan sosial yang menjadi tema sentral dari sosiologi. Hubungan sosial dikatakan ada apabila perilaku setiap individu perilakunya didasarkan pada perilaku yang diharapkan oleh pihak lainnya. Diantara tipe hubungan sosial yang penting dicontohkan seperti perjuangan, agregasi, komunalisasi dan korporasi.

Perjuangan adalah tipe hubungan sosial yang menyangkut perilaku individu dimana pihak yang satu memaksakan kehendaknya terhadap pihak lainnya. Sedangkan agregasi menyangkut hubungan sosial dimana keseimbangan dan keserasian motivasi rasional

menjadi dasar berbagai kepentingan. Komunalisasi merupakan hubungan sosial yang didasarkan pada perasaan subyektif, baik itu bersifat tradisional maupun emosional atau bahkan keduanya. Dan korporasi adalah tipe hubungan sosial yang didasarkan pada kewenangan dan berlandaskan pada kegiatan pemimpin dan staf administrasinya. Ketiga tipe hubungan sosial bisa didasarkan pada paksaan ataupun kesukarelaan dari setiap individu yang terlibat didalamnya.

C. PERILAKU SOSIAL

Perkembangan teori dan gagasan tentang sosiologi *behavior* tidak lepas dari pengaruh Skinner. Dasar pemikiran Skinner



(Boeree, 2008), bahwa setiap pergerakan manusia itu disebabkan oleh rangsangan yang diperoleh dari lingkungannya. Sistem dimaksud diistilahkan dengan "cara kerja yang menentukan" (*operant conditioning*). Setiap makhluk dalam hidupnya dapat dipastikan dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya. Dimana dalam persinggungan itu mereka hidup dan mendapatkan stimulant dan rangsangan tertentu yang membuatnya berbuat sesuatu. Rangsangan itu disebut stimulan yang menggugah. Stimulan tertentu membuat manusia melakukan suatu tindakan tertentu dengan konsekuensi dan resiko tertentu.

Pemikiran Skinner menegaskan tentang obyek kajian sosiologi yang nyata dan realistis merupakan perilaku manusia yang nampak dan memungkinkan terjadi pengulangan. Pendapat ini sekaligus sebagai bentuk kritik dari obyek kajian sosiologi tentang fakta

sosial yang terdiri dari struktur sosial dan pranata sosial. Fakta sosial dalam konsep kultur tentang nilai-nilai yang dikandungnya dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak bisa dilihat secara nyata. Sesuatu yang bisa dilihat itu misalnya bagaimana cara orang itu berpakaian, hidup bersama dengan keluarga dan lingkungannya. Paradigma penganut sosiologi *behavior* ini memusatkan perhatiannya pada proses interaksi, hanya saja respon atau tanggapan yang diberikan cenderung bersifat mekanik, terbatas pada seberapa besar stimulus yang diterima itu bisa menggugahnya. Jadi tidak bersifat dinamis dan kreatif sebagaimana paradigma yang ada dalam definisi sosial yang didasarkan pada nilai-nilai, norma-norma dan struktur sosial.

Salah satu teori yang dalam paradigma perilaku sosial ini menurut Ritzer (2018:73) adalah teori *behavioral sociology*. Teori ini memusatkan perhatiannya pada perilaku aktor dengan akibat dari perilaku itu dilingkungannya. Akibat yang sudah terjadi bisa dipelajari untuk menerangkan bagaimana perilaku aktor yang menyebabkan munculnya akibat tersebut. Begitu juga mencoba menghubungkan antara perilaku yang dilakukan oleh aktor saat ini terhadap akibatnya yang akan terjadi dikemudian hari, dan apakah ada kemungkinan pengulangnya yang dipengaruhi oleh perilaku sebelumnya.

Namun demikian tidak semua perilaku dapat dipahami dengan mudah meskipun kadang diketahui tujuannya. Apabila perilaku itu dilakukan dengan cara-cara yang lazim atau pada umumnya mungkin dengan pemahaman yang sederhana bisa dijelaskan mengapa untuk mencapai suatu tujuan perilaku itu dilakukan. Akan tetapi apabila perilaku itu tidak lazim

sebagaimana orang melakukan kegiatan dengan pengalaman ritual tertentu dan hanya bisa dipahami apabila ikut berpartisipasi didalamnya, maka akan mengalami kesulitan bagaimana memberikan pemahaman kepada pihak-pihak diluar para pelaku meskipun mempunyai tingkatan rasional yang memadai.

Sebagaimana diuraikan oleh Soekanto (2011:21) bahwa setiap penafsiran adalah untuk memberikan bukti semaksimal mungkin. Hanya saja pembuktian semaksimal mungkin itu belum tentu menjadikan hal yang sah secara kausal dan tetap saja bisa diterima sebagai suatu hipotesa. Oleh karenanya apapun yang tampak sebagai motivasi diri bagi seseorang yang terlibat, dimungkinkan hanya untuk menyembunyikan motif tertentu yang lebih dalam yang mendasari perilakunya yang mengakibatkan analisa diri menjadi tidak sah.

Dengan memahami uraian singkat diatas maka sosiologi harus menggali lebih dalam lagi untuk memahami motivasi dengan cermat, meskipun motivasi itu sendiri bukan merupakan bagian dari perilaku individu sepenuhnya. Suatu misal teori motivasi, memang dapat dijadikan dalam mempelajari perilaku sosial, dimana teori tersebut berusaha ikut menjelaskan bagaimana individu berupaya memenuhi kebutuhannya dan faktor apa yang sekiranya dapat mendorong individu itu melakukan suatu tindakan.

Dalam sosiologi, pendekatan sosiologis berkaitan dengan pemahaman motivasi perilaku sosial tersebut lebih berfokus terhadap bagaimana tindakan individu itu memberikan kontribusi pada pembentukan

norma sosial dan struktur sosial. Seperti dalam konsep konformitas atau kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai dan kaidah yang berlaku, konsep ketidaksepahaman, dan perubahan sosial dipelajari untuk mengetahui dan memahami mengapa individu melakukan tindakan dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

RINGKASAN :

- 1) Fakta sosial tidak bisa dipelajari melalui instropeksi, melainkan harus dilakukan dengan penelitian dalam dunia nyata seperti mencari barang atau sesuatu lainnya.
- 2) Fakta sosial merupakan kekuatan sosial, yang berada diluar individu, bersifat mengekang, sedemikian rupa sehingga individu-individu dipaksa bertindak oleh kekuatan sosial itu. Kekuatan sosial bersifat eksternal, memaksa, dan objektif dan bisa diperhitungkan.
- 3) Fakta sosial terdiri dari struktur sosial (*social structure*) dan pranata sosial (*social institution*). Struktur sosial (*social structure*) berkaitan dengan jaringan hubungan sosial, proses interaksi yang kemudian terorganisir, posisi dan peran yang membedakan antar individu dan kelompok. Sedangkan pranata sosial (*social institution*) berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma.
- 4) Relasi antara struktur sosial dan tindakan individu menjadi bagian dari konsentrasi sosiologi dimana ada tiga pendapat yang mengelompokkan perdebatan relasi keduanya, yaitu struktur sosial dianggap tidak ada karena individu bisa menciptakan dunia sekitarnya, kemudian sosiologi harusnya konsentrasi saja pada struktur sosial yang

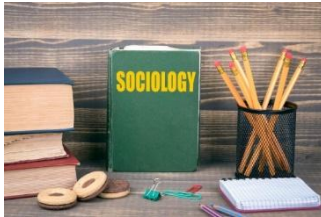
membentuk tindakan individu sehingga watak *agency* menjadi tidak penting, dan adanya proses dialektis dengan pemberian makna oleh individu kemudian menjadi struktur sosial.

- 5) Tindakan sosial (*social action*) dimaknai sebagai tindakan yang penuh arti, yaitu tindakan individu yang bermakna subyektif bagi dirinya dan diarahkan juga bagi orang lain. Untuk mengetahui apakah tindakan individu itu termasuk dalam tindakan sosial atau bukan, maka perlu dilihat dari hubungan atau tujuan dari tindakan itu.
- 6) Perilaku sosial yang paling penting adalah resiprokal atau perilaku sosial yang timbal balik dimana perilaku resiprokal tersebut cerminannya adalah hubungan sosial yang menjadi tema sentral dari sosiologi. Hubungan sosial dikatakan ada apabila perilaku setiap individu didasarkan pada perilaku yang diharapkan oleh pihak lainnya.
- 7) Perilaku sosial memusatkan perhatiannya pada proses interaksi, hanya saja respon atau tanggapan yang diberikan cenderung bersifat mekanik, terbatas pada seberapa besar stimulus yang diterima itu bisa menggugahnya. Jadi tidak bersifat dinamis dan kreatif sebagaimana paradigma yang ada dalam definisi sosial yang didasarkan pada nilai-nilai, norma-norma dan struktur sosial.
- 8) Apapun yang tampak sebagai motivasi diri bagi seseorang yang terlibat dalam perilaku sosial, dimungkinkan hanya untuk menyembunyikan motif tertentu yang lebih dalam yang mendasari perilakunya yang mengakibatkan analisa diri menjadi tidak sah.

BAB III

PENGERTIAN SOSIOLOGI POLITIK

A. PENDAHULUAN



Mempelajari sosiologi berarti mempelajari perilaku manusia dalam konteks sosial. Masyarakat sebagai unit dasar yang didalamnya memiliki kelembagaan

seperti lembaga keluarga, lembaga keagamaan, lembaga sosial, lembaga pendidikan dan lain sebagainya merupakan kajian-kajian dalam sosiologi yang bisa dilihat peran dan fungsinya dalam masyarakat. Kaitannya dengan ilmu politik, apabila lembaga-lembaga sebagai unit analisa sosiologi tersebut terdapat perubahan dan pembaharuan dalam proses interaksinya tentu akan mempengaruhi pola kehidupan politik.

Selain 3 (tiga) perspektif teori sosiologi dalam bab sebelumnya yang telah disinggung diatas, (teori fungsionalisme struktural, teori konflik, dan teori interaksionis simbolik), masih sangat banyak teori-teori sosial lainnya yang dijadikan pendekatan dalam menganalisis fenomena sosial yang selanjutnya bisa dijadikan rujukan dalam mempelajari politik. Teori-teori dimaksud antara lain seperti teori pertukaran, teori dramaturgi, teori marxian, teori neomarxian, teori strukturalisme, teori post strukturalisme, teori modernisme, teori post modernisme, teori kritis, teori konstruksi sosial, teori feminisme, teori globalisasi,

teori pembangunan, teori ketergantungan, teori sistem, teori konsumsi, dan teori jejaring aktor serta masih banyak lagi.

Teori-teori sosiologi dimaksud telah memberikan kontribusi untuk memahami politik berkaitan dengan kehidupan sosial baik mengenai bagaimana seseorang berinteraksi untuk memperoleh keuntungan pribadi, bagaimana seseorang mengekspresikan diri untuk sebuah kesan, bagaimana pertentangan kelas sosial dalam masyarakat, bagaimana mempelajari karakter manusia yang tidak tetap, bagaimana struktur ekonomi dan sosial membentuk individu dan sebaliknya bagaimana individu itu membentuk struktur.

Disamping itu juga dipelajari bagaimana perubahan sosial masyarakat dari yang tradisional menjadi kompleks, bagaimana emosi, rasio, media yang lebih menekankan pada pemaknaan, bagaimana individu menemukan metode untuk menyelesaikan kendala dalam kehidupannya, bagaimana mendefinisikan kenyataan dan pengetahuan dalam konteks sosial, bagaimana kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan, bagaimana proses pengintegrasian atau globalisasi, bagaimana tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera, bagaimana tingkah laku individu yang didasari pada faktor lingkungan materialnya, bagaimana jaringan terbentuk, dan bagaimana peningkatan konsumsi masyarakat dikaitkan dengan pendapatannya, serta bagaimana aktor-aktor berinteraksi.

Luasnya kajian teori-teori sosial tersebut sebenarnya bila dikaitkan dengan politik sebenarnya sama-sama menjadikan negara sebagai obyek kajian. Sosiologi melihat negara sebagai organisasi masyarakat terbesar yang sarat dengan aturan, norma dan nilai untuk pengendalian sosial kemasyarakatan, sedangkan ilmu politik melihat negara sebagai kajian pokok bagaimana kekuasaan mengelolanya. Negara adalah salah satu objek utama dalam studi ilmu politik karena memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat manusia.

Bagaimana kondisi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan atau penyelenggaraan urusannya dan hubungannya dengan negara digambarkan oleh Ndraha (Ndraha, 2011:29) sebagai berikut :

Masyarakat	: M
Masyarakat lain	: M1, M2, M3
Masyarakat besar	: N
Kepentingan M	: KM
Kepentingan Masyarakat besar	: KN

M bersama-sama dengan M1, M2, M3 berada dalam N. M otonom dalam dalam hubungannya dengan N, dalam arti KM ditangani sendiri oleh M bila mampu. Sementara kepentingan bersama dengan M1, M2, M3 ditangani oleh N, berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh M ke N. Dengan kata lain hanya urusan yang tidak mampu atau tidak ingin dilakukan sendiri oleh M dalam hubungannya dengan M1, M2, dan M3 yang pengelolaannya diserahkan kepada N. Jadi urusan atau kewenangan N bersifat kontributif (berasal dari M). Dalam hubungan itu, dalam hal KN, M menundukkan (menaklukkan) diri pada N, sementara

dalam hal KM tidak. Antara KM dan KN bisa terjadi tarik menarik, kuat-kuatan, bergantung pada siapa yang kuat atau dominan. Otonomi M bisa saja terjadi berasal dari N, sehingga M tergantung pada N. Keberhasilan M membangun *bargaining power* untuk merebut *bargaining position* terhadap N, menunjukkan gejala *civil society* di dalam masyarakat. Proses *civil society* yang optimal tercapai jika hubungan antara M dan N positif, semakin berkembang M, semakin berkembang pula N. Tidak negative, peningkatan M berakibat penurunan N.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Ndraha terkait keberadaan *civilness* yang di zaman dahulu dilawankan dengan semua hal yang berbau militer, saat ini *civilness* dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan atau kenegaraan.

Disisi lainya mengapa negara sebagai kajian penting dalam ilmu politik alasannya adalah :

a. Pengaturan Kekuasaan:

Negara sebagai entitas mempunyai otoritas tertinggi dalam mengatur, menata, serta mengendalikan kekuasaan dalam wilayah dengan batas-batas yang jelas. Salah satu ruang lingkup politik yang utama adalah mempelajari tentang kekuasaan, bagaimana memperoleh dan menggunakannya sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah.

b. Pembentukan Kebijakan:

Negara sebagai lembaga bertanggung jawab atas pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, yang

mengatur dan mempengaruhi tata kehidupan masyarakat. Ilmu politik menjelaskan bagaimana proses pembuatan kebijakan publik dari formulasi, implementasi, dan evaluasinya termasuk peran para aktor politiknya, serta dampak dari kebijakan tersebut dalam masyarakat.

c. Hukum dan Keadilan:

Negara sangat berperan dalam penegakkan hukum dan penjaga keadilan dalam masyarakat. Ilmu politik juga mempelajari bagaimana sistem hukum dan proses peradilan, serta bagaimana negara mengambil peran dalam menjaga ketertiban sosial.

d. Hubungan Internasional:

Peran negara dalam urusan internasional, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa negara ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Maka negara adalah aktor penting dalam memelihara hubungan internasional. Ilmu politik mempelajari tentang diplomasi, kerjasama antar negara, dan konflik skala internasional.

e. Partisipasi Politik:

Negara menjadi wadah atau tempat bagi individu atau kelompok untuk bisa berpartisipasi dalam bidang politik,. Seperti proses pemilihan umum, dan proses pemilihan wakil-wakil rakyat, serta proses/aktivitas politik lainnya. Ilmu politik mempelajari bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dan dinamikanya.

f. Struktur Politik:

Dalam bingkai negara ada struktur politik struktur politik yang kompleks, baik supra struktur politik seperti kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun infra struktur politik seperti partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi ataupun komunitas-komunitas. Ilmu politik mempelajari bagaimana lembaga-lembaga itu bekerja, beroperasi dan berinteraksi satu dengan yang lainnya.

g. Keamanan dan Pertahanan:

Negara yang berdaulat mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga keamanan dan pertahanan di wilayahnya. Ilmu politik mempelajari bagaimana melindungi tanah air, bagaimana aparat militer berperan, bagaimana kebijakan keamanan nasional, dan bagaimana hubungan antara kekuatan militer dan politik.

h. Identitas Nasional:

Negara identik dengan pusat identitas nasional dan kehormatan bagi warganya. Ilmu politik menjelaskan dan mengatur berbagai hal tentang identitas dan simbol-simbol negara, bahasa, dan budaya yang harus dijaga, dilestarikan, dan terus ditanamkan sebagai suatu kebanggaan negara..

i. Konflik dan Perubahan Sosial:

Seringkali juga negara menjadi sumber konflik dalam masyarakat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publiknya apabila tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ilmu politik mempelajari

dinamika konflik sosial, perubahan politik, bahkan revolusi.

j. Perbandingan Negara:

Para pakar politik dapat mengembangkan keilmuannya dengan melihat, mempelajari, dan perbandingan sistem politik dan pemerintahan antar negara.

Peran negara dalam masyarakat dan hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan politik dan sosial, bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan sosiologis. Ilmu politik membantu kita memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan bagaimana mendapatkan kekuasaan, sementara sosiologi mengambil bagian dari proses pendekatan sebelum kekuasaan itu didapat, dan bagaimana menjalankan sesudah mendapatkan kekuasaan.

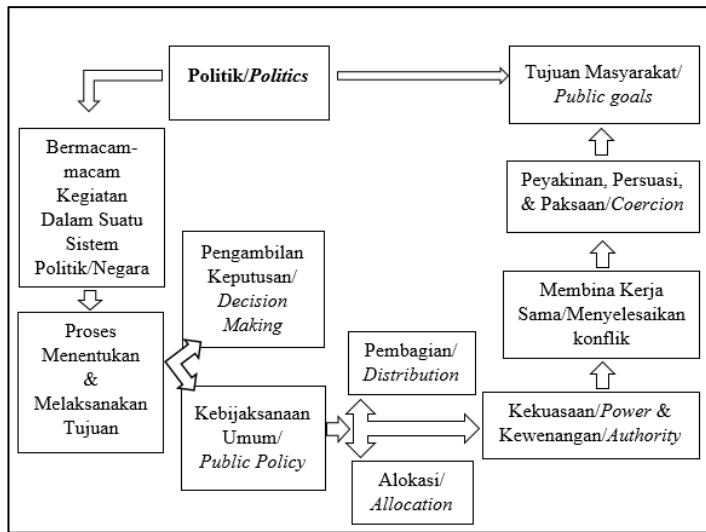
Menurut Budiardjo (2010:29) bahwa dengan bermacam definisi teori sosiologi para sarjana ilmu politik bisa memahami seberapa jauh stratifikasi sosial pengaruhnya atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan kebijakan (*policy decisions*), corak dan sifat keabsahan politik (*political legitimacy*), sumber kewenangan (*sources of political authority*), pengendalian sosial (*social control*), dan perubahan sosial (*social change*). Dengan demikian ilmu politik berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, salah satunya adalah sosiologi, dan semua ilmu sosial mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota kelompok (*group*) untuk bekerjasama dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendiri.

B. PENGERTIAN POLITIK

Kata *politics* menurut Coulter dalam Ndraha (2011:486) didefinisikan sebagai *the peaceful resolution of human disputes through compromise*. Sedangkan menurut Goodin, Klingemann dan Heywood *politics* adalah *the constrained use of social power*. Jadi Coulter menekankan pada tujuan sedangkan Goodin, Klingemann dan Heywood memberi tekanan pada acara atau alat. Pendapat lainnya disampaikan oleh Budiardjo (2010:15) bahwa politik dalam sebuah negara (*state*) berhubungan dengan yang namanya kekuasaan (*power*) pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*) dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*). Disamping beberapa pendapat tersebut tentunya masih sangat banyak pendapat para ahli lainnya berkaitan dengan pengertian politik, namun dalam uraian disini penulis mencoba memaknai pendapat dari Budiardjo.



Pendapat dari Budiardjo tersebut diatas dapat dibuat alur pikir untuk memudahkan pemahaman pengertian politik sampai dengan tujuan dari politik itu sendiri, sebagaimana dalam gambar 3.1 dibawah ini :



Gambar 3.1
Alur pikir pemahaman politik

Sumber : Diolah penulis dari pendapat Budiardjo (2010:15)

Uraian dari Budiardjo (2010:15-21) yang digambarkan tersebut diatas dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan politik sebagai bermacam-macam kegiatan tersebut adalah sebagai upaya dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Bagaimana membuat skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana melaksanakan tujuan itu. Setelah sebuah keputusan diambil dikeluarkanlah kebijakan publik yang menyangkut pengaturan alokasi dan distribusi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, diperlukanlah kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*). Kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang mungkin muncul.

Caranya dengan pendekatan, keyakinan, bahkan dengan paksaan untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan masyarakat. Disampaikan oleh Budiardjo bahwa kebijakan tanpa paksaan hanya merupakan perumusan keinginan (*statement of inten*) belaka.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa politik itu menggambarkan tabiat manusia, oleh karenanya disamping tujuan politik yang baik dan mulia tersebut tidak dipungkiri ada sisi-sisi negatifnya. Persis seperti tabiat manusia (benci, dendam, senang, susah, marah, cinta, damai dsb). Sehingga terkadang banyak hal yang saling bertentangan, sebagaimana diuraikan oleh Rod Hague dan Andrew Heywood dalam Budiardjo (2010:16) sebagai berikut :

- a) Politik merupakan aktivitas yang bertalian dengan cara seperti apa kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang sifatnya kolektif dan mengikat sebagai usaha dalam mendamaikan bermacam perbedaan yang ada diantara anggota-anggotanya.
- b) Politik sebagai aktivitas suatu bangsa dengan tujuan membuat, mempertahankan, dan mengamandemen berbagai peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang artinya tidak dapat menghindar dari setiap gejala konflik dan kerja sama.

Perbedaan-perbedaan pendapat dalam mendefinisikan politik oleh para ahli merupakan hal yang wajar mengingat perbedaan itu muncul dikarenakan konsep berpikir mereka yang berbeda atau

dikarenakan masing masing melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas maka ruang lingkup politik adalah negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Pendapat lainnya tentang politik (serapan dari bahasa Belanda: *politiek*) merupakan proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berupa proses tentang pembuatan keputusan dalam suatu negara. Pengertian politik yang dimaksud disini sebagai upaya penggabungan dari beberapa definisi yang berbeda tentang hakikat politik yang biasa dikenal didalam ilmu politik. Hal yang demikian dapat dimanfaatkan secara positif dalam konteks solusi politik yang tanpa kekerasan, berkompromi, atau secara diskriptif sebagai seni atau ilmu pemerintahan, Namun demikian juga sering membawa konotasi yang negatif. Konsep setelah didefinisikan melalui pendekatan yang berbeda dengan bermacam cara akan memiliki pandangan yang berbeda pula. Secara mendasar apakah konsep tersebut akan digunakan secara empiris atau normatif, secara luas atau terbatas, dan apakah kerjasama atau konflik lebih penting untuk itu.

Beragam metode yang digunakan dalam politik, seperti dalam hal mempromosikan pandangan politik, negosiasi dengan subjek politik lain, dan membuat undang-undang, serta menggunakan kekuatan yang ada baik internal maupun eksternal, termasuk juga perang melawan musuh. Politik diselenggarakan di berbagai tingkatan sosial, dari suku masyarakat tradisional,

melalui pemerintah lokal modern, perusahaan dan lembaga hingga negara berdaulat, hingga internasional.

Dinegara bangsa modern, partai politik dibentuk adalah untuk merepresentasikan ide-ide dan gagasan mereka, dikarenakan penyelenggaraan pemilihan umum merupakan kompetisi antara berbagai partai. Dalam hal terdapat banyak masalah anggota partai sering setuju mengambil posisi yang sama dan setuju pula mendukung kesejahteraan yang sama pada hukum dan pemimpin yang tidak sama.

Sistem politik merupakan kerangka kerja (*roadmap*) yang mendefinisikan metode politik yang dapat diterima oleh masyarakat, dimana sejarah pemikiran politik dapat dipelajari ulang dengan melihat karya-karya misalnya manuskrip politik Konfusius dan Arthashastra Chanakya di Timur dan Republik Plato dan Politik Aristoteles di Barat.

Beberapa kata kunci untuk memahami politik akan diuraikan disini yaitu berkaitan dengan a) sistem politik, b) partai politik, c) partisipasi politik, d) perilaku politik, e) proses politik, dan f) legitimasi.

1. Sistem politik



Pengertian sistem politik disampaikan oleh beberapa ahli diantaranya menurut David Easton dalam

Riyani (2019:49) bahwa sistem politik adalah kesatuan dari seperangkat struktur politik (supra struktur politik dan infra struktur politik), yang

memiliki fungsi masing-masing (fungsi *input-output*) dan bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara. Masyarakat sebagai unit dasar kajian yang didalamnya terdiri dari berbagai kelembagaan sebagaimana diuraikan diatas memiliki berbagai macam sistem seperti sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem budaya dan masih banyak lagi termasuk sistem politik. Dengan demikian sistem politik bukannya satu-satunya sistem yang ada dimasyarakat, oleh karenanya sangat ideal apabila untuk dapat memahami sistem politik perlu juga mempelajari sistem-sistem lainnya karena satu sistem yang utuh tetap akan menjadi subsistem apabila dikontekskan dalam skala yang lebih luas.

Lebih lanjut diuraikan pula oleh David Easton bahwa dalam menelaah sistem politik terdapat empat asumsi dasar sebagai berikut :

- ❖ Diperlukan sebuah konstruksi yang sistematis dalam ilmu pengetahuan guna mensistematisasikan fakta.
- ❖ Sistem politik harus dipandang secara komprehensif atau sebagai keseluruhan dan tidak parsial.
- ❖ Sistem politik data dan kajiannya mencakup psikologis dan situasional.
- ❖ Sistem politik dilihat sebagai sebuah kondisi ketidakseimbangan.

Pendapat lainnya disampaikan oleh Gabriel A. Almond yang menjelaskan sistem politik sebagai sistem interaksi yang ada didalam masyarakat yang sifatnya bebas/merdeka dalam

menjalankan adaptasi dan fungsi-fungsi integrasi (baik dalam masyarakatnya ataupun berhadapan dengan masyarakat lainnya) dengan menggunakan paksaan fisik yang lebih kurang bersifat absah.

Dari definisi-definisi sistem politik diatas dapat digarisbawahi bebebapa hal untuk dicermati antara lain :

- ❖ Sistem politik adalah “sistem interaksi” yang ada dalam masyarakat yang bebas/merdeka.
- ❖ Sistem politik juga menjalankan fungsi integrasi, yang tujuannya adalah bagaimana supaya tercipta kesatuan di dalam masyarakat.
- ❖ Fungsi adaptasi, berkaitan dengan penyesuaian diri dari sistem politik terhadap lingkungan masyarakatnya sendiri maupun lingkungan masyarakat lainnya.

Selanjutnya disampaikan pula bahwa unsur-unsur sistem politik yang meliputi :

- ❖ *Comprehensiveness* (menyeluruh)
Hal ini mengandung pengertian bahawa sistem politik itu meliputi semua interaksi, yang dimulai dari masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang dapat memberi pengaruh bagaimana paksaan itu digunakan.
- ❖ *Interdependence* (saling ketergantungan)
Artinya, bahwa karena ada keterkaitan dan ketergantungan antar aspek, maka perubahan

satu aspek mengakibatkan perubahan sistem secara keseluruhan.

❖ *Boundries* (adanya batasan-batasan)

Mengandung makna bahwa sistem politik dengan sistem-sistem lainnya ada kejelasan dan ketegasan batas berkaitan dengan wilayah kajiannya.

Sistem politik tetap saja menjadi bagian dari suatu sistem yang lebih besar dan kompleks yang oleh karenanya sistem politik berinteraksi dengan sub sistem lainnya, seperti sistem budaya, sistem ekonomi, dan lain-lain.

2. Partai politik



Secara legalistik pengertian partai politik dapat dimaknai sebagai organisasi yang sifatnya nasional

yang dibentuk secara sukarela berdasarkan kehendak dan cita-cita yang sama oleh sekelompok warga negara Indonesia untuk membela dan memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada prinsipnya partai politik merupakan pilar demokrasi, yang didalamnya terdapat a) sistem/proses rekrutmen

anggota, b) pengkaderan, c) kepemimpinan dan d) pendidikan politik. Sehingga bisa dikatakan bahwa perkembangan partai politik dapat diidentikkan dengan perkembangan demokrasi.

a. Rekrutmen anggota

Keanggotaan dalam partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disepakat dan bersifat terbuka, sukarela, dan tidak ada diskriminatif. Semua warga negara Indonesia yang sudah atau pernah kawin, atau sudah berusia 17 (tujuh belas) bisa menjadi anggota partai politik.

b. Pengkaderan

Pengkaderan dalam pengertian rekrutmen politik dilakukan secara terbuka dan demokratis yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Rekrutmen politik bagi warga negara dimaksudkan untuk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota DPR dan DPRD, serta bakal calon presiden dan wapres.

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan politik merupakan kemampuan atau proses dalam memimpin dan mengarahkan partai politik, atau kelompok politik, dengan tujuan mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Kepemimpinan politik mencakup berbagai aspek, termasuk manajemen konflik, komunikasi politik, pembuatan kebijakan,

pengambilan keputusan politik, dan sebagainya.

d. Pendidikan politik

Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik sesuai dengan tanggung jawab yang digariskan oleh undang-undang adalah untuk masyarakat sesuai dengan ruang lingkupnya dan tetap memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. (pendidikan politik diuraikan dalam bab selanjutnya).

Terbentuknya partai politik disebabkan oleh kebebasan yang diberikan negara kepada warga masyarakatnya untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi dalam konteks memperkuat semangat kebangsaan. Kehadiran negara dalam mengatur keberadaan partai politik dalam rangka untuk mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis, serta untuk mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat.

Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan undang-undang tentang partai politik bahwa arah dari ditata dan disempurnakannya partai politik adalah untuk dua hal sebagai berikut : **pertama**, Guna mendukung prinsip-prinsip dasar dalam sistem demokrasi diperlukan budaya politik

melalui pembentukan sikap dan perilaku partai politik yang sistemik dan terpola. Dengan demikian partai politik harus menunjukkan sikap dan perilakunya dengan membuat sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. **Kedua**, memaksimalkan kedua fungsi partai politik yang meliputi fungsi partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik, pengkaderan kepada rakyat, termasuk dalam melakukan rekrutmen politik agar dapat melahirkan para pemimpin yang berkemampuan dalam berpolitik, dan fungsi partai politik kepada negara.

Definisi partai politik menurut para ahli disampaikan oleh Budiarjdo (2010:404) bahwa partai politik merupakan kelompok yang terorganisir dimana para anggotanya memiliki orientasi dan nilai-nilai serta kesamaan cita-cita. Adapun tujuannya adalah agar mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang (biasanya) dilakukan dengan cara konstitusional guna melaksanakan programnya. Pendapat lain disampaikan oleh Giovanny Sartori dalam Budiarjdo (2010:404) sebagai berikut : *A party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office.* (Partai politik merupakan kelompok politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan, dengan pemilihan umum itu, mampu

memposisikan calon-calonnya untuk menempati jabatan-jabatan publik).

Dibentuknya partai politik tentu saja mempunyai tujuan dan fungsi yang berlandaskan konstitusi. Adapun tujuan umum dari partai politik adalah a) Ikut mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang dituangkan dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945, b) Ikut menjaga, memelihara keutuhan NKRI, c) Mengembangkan kehidupan yang demokratis berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI, dan d) Ikut mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khusus dari partai politik yaitu a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, b) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, c) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 (UU nomor 02 tahun 2011) tentang partai politik, pasal 11 (1) bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Budiardjo (2010:405) fungsi partai politik adalah sebagai a) Sarana komunikasi politik, b) Sarana sosialisasi politik, c) Sarana rekrutmen politik, d) Sarana pengatur konflik.

Fungsi-fungsi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

❖ Sarana komunikasi politik

Melalui partai politik tuntutan dan kepentingan yang berkembang dimasyarakat dikemas dan diproses melalui penggabungan kepentingan (*interest aggregation*), yang kemudian kepentingan itu diolah dan dirumuskan secara teratur, diartikulasikan agar tidak terjadi kesimpangsiuran bahkan benturan antar pendapat (*interest atuculation*), dan selanjutnya menjadi usulan partai politik dan dimasukkan dalam program atau platform partai (*goal*

formulation) dan diperjuangkan dalam parlemen agar menjadi kebijakan umum (*public policy*) pemerintah.

Disisi lainnya dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi politik, partai politik juga memainkan peran menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak lain adalah bagian dari kebijakan yang mereka rumuskan sebelumnya. Dengan demikian terjadi hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah dengan partai politik sebagai jembatan penghubungnya. Namun demikian pemerintah sendiri juga harus mampu mendengar tuntutan dan menjelaskan kebijakan tersebut kepada masyarakat.

❖ Sarana sosialisasi politik

Salah satu cara untuk membentuk budaya politik (*politic culture*) suatu bangsa adalah melalui sosialisasi politik yang mana muatan dari sosialisasi itu tidak lepas dari penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang berlangsung seumur hidup. Artinya nilai-nilai dan norma-norma itu diajarkan berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mulai dari pendidikan di usia dini, kanak-kanak, remaja, dewasa bahkan sampai kepada orang tua melalui berbagai organisasi maupun kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat. Caranya pun bisa melalui berbagai media terlebih pada era digital ini yang begitu mudahnya menyampaikan pesan dengan model dan bentuk yang lebih menarik

perhatian agar tercipta *image* yang dikaitkan dengan *figure* partai tertentu dengan kepentingannya untuk memenangkan pemilihan umum. Oleh karenanya partai politik memerlukan solidaritas, loyalitas dan dukungan seluas-luasnya agar tetap solid.

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik juga untuk mendidik anggota-anggotanya menyadari tanggung jawabnya, dan memiliki nasionalisme yang tinggi demi kepentingan bangsa dan negara.

❖ Sarana rekrutmen politik

Kader-kader partai politik yang berkualitas bisa dimiliki oleh partai politik melalui rekrutmen politik. Dengan kemampuan kader-kader yang berkualitas tersebut partai politik tidak akan kesulitan apabila akan mencalonkan pemimpin baik dalam kepemimpinan paratai maupun kepemimpinan nasional. Diantara cara untuk bisa merekrut kader-kader yang berkualitas tersebut bisa dilakukan dengan mengembangkan organisasi-organisasi massa dibawah naungan ideologi dan kebijakan umum partai yang secara tidak langsung juga menjadi ajang seleksi kepemimpinan.

❖ Sarana pengatur konflik.

Masyarakat yang sangat heterogen dengan berbagai kepentingannya selalu sarat dengan konflik. Dengan kondisi demikian itu kehadiran

partai politik diperlukan dengan pendekatan-pendekatan tertentu sekaligus bisa dijadikan sebagai media untuk meyakinkan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa partai politik bisa menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah agar ada penyelesaian. Sebagaimana disampaikan oleh Lijphart (1968) bahwa *segmented or subcultural cleavages at the mass level could be overcome by elite cooperation*. (Perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik).

3. Partisipasi politik



Partisipasi atau peran dapat dimaknai juga sebagai keikutsertaan yang

melibatkan pikiran, mental dan emosi. Dalam proses pembangunan, partisipasi sebagai gejala demokrasi diperlukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi agar memiliki rasa ikut bertanggungjawab atas suatu program. Partisipasi diperlukan tidak terbatas dalam bidang pembangunan saja, akan tetapi mencakup berbagai bidang seperti dalam bidang politik, yang biasa disebut sebagai partisipasi politik.

Partisipasi politik didefinisikan oleh Budiardjo (2010:367) sebagai berikut :

Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya,

Partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat ingin mempengaruhi bahkan ingin menjadi bagian dari penentu kebijakan. Dengan berpartisipasi politik mereka merasa ikut bertanggungjawab atas berjalannya roda pemerintahan yang diharapkan semua kebijakannya dapat menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Tinggi rendahnya partisipasi politik akan berpengaruh terhadap responsibilitas penyelenggara pemerintahan.

Dapat diasumsikan bahwa partisipasi politik masyarakat tinggi, disatu sisi bisa menjadi tolok ukur bahwa kematangan berdemokrasi juga tinggi, yang berdampak pada pemerintahan yang semakin *responsive*. Sebaliknya apabila partisipasi politik masyarakat rendah atau acuh tak acuh, maka bisa jadi pemerintah juga kurang *responsive* karena semua yang dilakukan seolah-olah tidak

ada kontrol dari masyarakat. Dan hal ini sebagai pertanda tidak baik karena bisa mengarah ke hal-hal yang negatif seperti tindakan kesewenang-wenangan, korupsi, pembohongan publik dan lain sebagainya.

Mengapa partisipasi politik sangat diperlukan bisa dilihat dari berbagai sisi, misalnya dengan berpartisipasi politik maka menandakan bahwa masyarakat itu telah mengalami peningkatan status sosial ekonominya, menjadi lebih terbuka pola pikirnya yang berarti pula telah terjadi modernisasi politik dalam masyarakat. Berbeda dengan masyarakat yang penduduknya masih terbelakang, yang mana urusan birokrasi pemerintahan dan politik dianggap sebagai urusan yang tidak berkaitan dengan kehidupannya, sehingga tidak perlu memikirkannya dan diserahkannya urusan itu kepada para tokoh yang dianggapnya mempunyai status sosial yang lebih tinggi.

Disinilah perlunya pendidikan politik untuk menyadarkan mereka bahwa semua kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Demikian pula sebaliknya bahwa pendapat mereka sebenarnya juga dapat mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah agar berpihak kepadanya dan tidak berpihak pada kekuatan politik semata. Keterlibatan warga dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari sejak perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan sampai dengan evaluasi/penilaian

keputusan merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat. Termasuk kegiatan-kegiatan dalam menentukan pilihan saat pemilu, menghadiri kampanye partai politik, dan menjadi anggota politik atau ormas.

Menurut Nimmo (2000:49) disampaikan bahwa seseorang terlibat dalam partisipasi politik dikarenakan pengaruh faktor-faktor dibawah ini :

❖ Peluang resmi.

Artinya memang negara membuat kebijakan-kebijakan yang memungkinkan atau memberi peluang kepada warganya untuk terlibat dalam partisipasi politik.

❖ Sumber daya sosial.

Artinya kelas sosial dan perbedaan geografis ikut menentukan partisipasi. Kondisi senyatanya memang tidak semua orang mempunyai peluang yang sama berkaitan dengan sumberdaya ekonomi dan sosial agar bisa terlibat dalam proses politik. Berkaitan dengan perbedaan demografis, terdapat juga perbedaan dalam partisipasi seperti jenis kelamin, tempat tinggal usia, suku, dan agama, dll.

❖ Motivasi personal.

Artinya motif yang mendasari aktivitas berpolitik ada yang rasional, emosional, disengaja maupun tidak disengaja, diilhami psikologis atau sosial, dorongan dari dalam

diri sendiri atau dari luar dirinya, serta bisa juga dipikirkan atau tidak dipikirkan, jadi memang penuh bervariasi.

Disisi lain terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat yang disebabkan kurangnya pemahaman antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tidak sedikit masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa memilih merupakan sebuah hak, dan bukan sebagai suatu kewajiban yang akhirnya membuat mereka tidak menggunakan hak pilihnya tersebut. Rendahnya partisipasi politik masyarakat juga disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana diuraikan Ramadhan (Kompasiana.com) diantaranya dapat dimaknai sebagai berikut :

- ❖ Pandangan terhadap figur itu sendiri
Kriteria pertama masyarakat sebelum melihat lebih jauh apa yang akan dilakukan oleh figure adalah melihat profile figure itu terlebih dahulu. Hal ini memang terkesan skeptis, yang menumbuhkan rasa berkecenderungan atau tidak dengan sudut pandang pemikiran masing-masing. Jika saja yang diajukan dalam pesta demokrasi tidak menarik di hati masyarakat, maka otomatis masyarakat tidak mau memilih (golput).
- ❖ Pandangan terhadap program dan kepentingan figure.
Kriteria masyarakat sebelum memilih akan melihat visi dan misi, serta program yang

disampaikan oleh figur tersebut untuk menilai apakah ada kecocokan dengan apa yang ada dalam hati mereka. Oleh karenanya pandangan mengenai seorang figur sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat dalam menentukan partisipasi politik.

❖ Kejenuhan dalam berdemokrasi.

Masyarakat mulai merasakan kejenuhan dalam proses demokrasi lima tahunan yang dirasa tidak bisa membawa dampak bagi kehidupan mereka secara langsung. Tidak sedikit masyarakat yang memilih golput karena figur terpilih tidak mampu membawa ke kehidupan yang lebih baik utamanya dalam peningkatan kesejahteraan mereka dan tidak membawa dampak yang signifikan atas daerah atau wilayah yang dipimpinnya.

❖ Pemilihan umum bukan prioritas dalam membangun kehidupannya sehari-hari.

Terdapat masyarakat yang memiliki pemikiran bahwa pemilihan umum bukanlah sesuatu yang penting sehingga masyarakat lebih memilih mengutamakan hal lain daripada partisipasi politik. Kurangnya wawasan dan ketidaktahuan mereka itulah yang membuat Partisipasi politik menjadi rendah.

4. Perilaku politik

Perilaku politik mencakup tentang semua aktivitas dan tindakan, serta partisipasi individu dan masyarakat dalam koridor politik. Hal ini terkait dengan cara mereka dan keterlibatannya baik langsung maupun tidak langsung dalam proses politik. Diantara perilaku politik meliputi berbagai aspek, seperti partisipasi dalam pemilihan umum dan memberi dukungan pada partai politik atau kandidat tertentu, melakukan demonstrasi dalam menyuarkan aspirasi, *update* media politik, atau melakukan debat berkaitan dengan isu-isu politik.



Berbagai aspek perilaku politik tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

❖ Aktivitas Partisipatif:

Aktivitas partisipatif merupakan tindakan aktif dalam politik, seperti menjadi anggota partai politik, berpartisipasi dalam kampanye politik, dan mencalonkan diri sebagai kandidat jabatan politik.

❖ Pemilihan Umum:

Perilaku disini termasuk dalam bentuk perilaku politik yang paling umum, yang mana individu dengan pandangan dan nilai yang mereka miliki memilih calon atau partai politik yang dianggapnya paling

sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini.

❖ **Pendapat dan Sikap Politik:**

Pendapat dan sikap politik dapat disalurkan melalui berbagai cara, seperti kelompok diskusi, media sosial, demonstrasi dan masih banyak lagi. Pendapat dan sikap politik individu sering dipengaruhi oleh keyakinan, nilai-nilai, dan pengalaman pribadi serta lingkungan tempat dimana individu berinteraksi sosial.

❖ **Media dan berita politik:**

Selalu mengikuti media dan berita politik termasuk bagian dari perilaku politik. Bagaimana individu mengakses dan memproses berita politik juga dapat berpengaruh terhadap pandangan dan tindakannya dalam politik.

❖ **Partisipasi Sosial:**

Partisipasi sosial adalah partisipasi dalam suatu kelompok, komunitas, atau organisasi masyarakat yang fokusnya pada isu-isu politik, seperti serikat buruh, kelompok pemuda, atau kelompok advokasi.

Perilaku politik setiap individu berbeda-beda karena dari berbagai macam latarbelakang yang berbeda-beda pula dan tergantung juga pada nilai-nilai dan situasi sosial politik yang melingkupinya. Studi perilaku politik membantu dan mengantar kita dalam

memahami bagaimana keterlibatan individu dalam sistem politik dan bagaimana suatu keputusan politik itu dibuat dalam masyarakat.

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dan eksternal dari individu itu sendiri. Faktor internal misalnya kehendak hati, tingkat pendidikan, dan idealism. Sedangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, politik dan kehidupan beragama, serta berbagai hal yang ada dilingkungannya. Sebagaimana disampaikan Surbakti (2010: 167) bahwa perilaku politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku politik adalah salah unsur atau aspek perilaku pada umumnya, disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku yang lain seperti perilaku konsumen/ekonomi, perilaku budaya, perilaku organisasi, perilaku keagamaan, perilaku pemilih dalam pemilu dan masih banyak lagi.

Perilaku pemilih erat hubungannya dengan perilaku individu bagaimana berinteraksi dalam sebuah pemilu, terutama yang berkaitan dengan ketertarikan dan pilihan politik mereka terhadap partai politik yang menjadi pilihannya. Perilaku secara umum dapat dibagi dalam dua macam yaitu perilaku yang normal atau baik dan perilaku yang menyimpang atau tidak baik. Berkaitan dengan pemilihan umum, yang disebut perilaku normal atau baik adalah perilaku politik yang mengikuti

aturan main dan tata cara dalam berpolitik, sedangkan perilaku politik yang menyimpang atau tidak baik adalah pola perilaku politik yang tidak berdasarkan aturan main. Bahkan dalam hal ini mereka melakukan berbagai perilaku yang membuat lingkungan disekitarnya atau pihak lainnya terganggu dan terintimidasi. Misalnya perilaku kekerasan politik yang seringkali terjadi di tengah kampanye pemilu, bentrok antara pendukung parpol bahkan dalam satu partai politik, intimidasi antar pendukung partai politik.

Menurut Kartini Kartono (2010:3), perilaku normal merupakan perilaku yang dapat diterima masyarakat luas atau sesuai sebagaimana pola kelompok masyarakat setempat, sehingga tercapai relasi personal dan interpersonal yang memuaskan. Sedangkan perilaku menyimpang (abnormal) adalah perilaku yang tidak sesuai atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara umum dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

5. Proses politik

Fokus dari teori proses politik menurut Oman (2016:179) bahwa proses politik lebih cenderung pada faktor-faktor yang memungkinkan bagi warga negara biasa untuk membentuk suatu gerakan sosial. Dimana gerakan sosial tersebut mereka buat sendiri dan bertentangan dengan masyarakat dominan. Disampaikan pula oleh Agus (2015:7) bahwa

proses politik sangat berkaitan dengan upaya perubahan sosial. Proses politik (*political process*) acuannya terhadap suatu keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik, digunakannya kesempatan itu untuk kepentingan mereka dan kelompoknya sendiri.



Lebih lanjut disampaikan, bahwa proses politik bisa diartikan sebagai proses perjuangan untuk mendapatkan akses atau jalur politik demi mewujudkan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Disamping itu, proses politik penuh dengan muatan kepentingan yang berimplikasi terhadap struktur masyarakat yang saling tarik menarik atau berposisi. Harus disadari sepenuhnya perihal kendali sosial dan kesepakatan sosial itu tidak pernah lengkap, konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok merupakan sesuatu yang setiap hari menyelimuti bahkan menyatu dalam kehidupan sehari-harinya.

Pendapat lain disampaikan oleh Budiarjo (2007:15) bahwa proses politik merupakan pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Dimana interaksi antara yang satu dengan lainnya, proses politik tersebut berada dalam bingkai sistem politik. Proses dalam

semua sistem dapat dijelaskan sebagai *input* (dukungan, tuntutan serta aspirasi masyarakat), proses (pengolahan), dan *output* (kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan), yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

Sementara Gabriel A. Almond dalam Hijri (2016.:21) menyampaikan bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh parpol, sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi usulan kebijakan yang bersifat umum, kemudian dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa proses politik berkaitan erat dengan aktivitas infrastruktur politik (partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan) serta berkaitan juga dengan suprastruktur politik (lembaga legislative dan eksekutif).

Proses politik juga bisa dimaknai sebagai serangkaian aktivitas dan langkah yang dilakukan oleh individu, sekelompok individu atau masyarakat dalam sebuah sistem politik suatu negara untuk berpartisipasi dalam politik, membuat keputusan dan menghasilkan kebijakan, serta pengaturan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Proses politik dalam membuat kebijakan publik mencakup beberapa tahapan dan interaksi yang mempengaruhi bagaimana formulasi, implementasi, dan evaluasi.

6. Legitimasi



Pendapat Syamsudin Haris dalam Riyani (2019:178) menyampaikan terdapat empat fungsi dari pemilihan umum, yaitu sebagai sarana legitimasi politik, pendidikan politik, perwakilan politik, dan sirkulasi atau pergantian elit penguasa. Makna dari legitimasi politik adalah dengan pemilihan umum keabsahan pemerintah dapat ditegakkan, begitu juga halnya dengan semua kebijakan yang dihasilkan. Sehingga memperkuat posisi pemerintah dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah bisa menjadikan pemilihan umum sebagai instrument kooptasi guna meningkatkan respon atau daya tanggap masyarakat atas suatu kebijakan. Para pelaku politik khususnya yang sedang memegang kekuasaan dituntut untuk lebih mengandalkan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat, dari pada melakukan pemaksaan-pemaksaan untuk sekedar mempertahankan legitimasi.

Pemilihan umum disampaikan oleh Riyani (2019:179) merupakan agenda politik yang sangat penting bukan dari sudut pandang warga negara saja, melainkan juga dari sisi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Pemilihan umum menjamin suatu mekanisme tentang prinsip kedaulatan ditangan rakyat dalam sebuah sistem demokrasi. Dengan demikian dimensi dari pemilihan umum adalah :

- a. Merupakan sarana perwujudan dari kedaulatan rakyat, sarana artikulasi kepentingan warga negara dalam memilih wakil-wakilnya, dan sarana evaluasi atau control terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
- b. Merupakan sarana untuk memberi dan memperkuat legitimasi pemerintah, dan berguna bagi pembangunan sistem politik agar semakin stabil dan ideal.

Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi salah satu pilar agar sistem politik demokrasi berjalan. Sebagaimana yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam modul (2010). Bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mana rakyat dapat melakukan pemilihan secara langsung pemimpin politiknya. Pemimpin politik di sini adalah para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif baik yang berada ditingkat pusat dan daerah serta memilih langsung pemimpin pemerintahan mulai dari bupati/walikota, gubernur, sampai presiden,

Pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum bagi suatu negara karena pemilu mempunyai empat manfaat, yaitu: a) Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan

rakyat b) Pemilihan umum merupakan sarana konstitusional untuk melakukan penggantian pemimpin, c) Pemilihan umum menjadi sarana bagi pemimpin politik untuk mendapatkan legitimasi, d) Pemilihan umum sebagai sarana bagi rakyat untuk ikut serta dalam kegiatan proses politik.

Makna yang terkandung dalam kedaulatan berada di tangan rakyat dijelaskan dalam undang-undang pemilu dimana rakyat berdaulat dan bertanggung jawab serta memiliki hak dan kewajiban yang secara demokratis dapat memilih pemimpinnya yang kelak membentuk pemerintahan dalam rangka melayani dan mengurus seluruh lapisan masyarakat, termasuk memilih wakil-wakilnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Kaitannya dengan legitimasi, berdasarkan UUD 1945 (Pasal 22E) disebutkan bahwa pemilihan umum guna memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, di mana presiden dan Wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR.

C. PENGERTIAN SOSIOLOGI POLITIK



Berangkat dari pendapat W.G Runciman dalam Rush dan Althoff (1990:2) yang menyatakan disiplin ilmu yang terpisah-pisah seperti ekonomi, demografi, kriminologi, ataupun politik, harus dianggap sebagai ilmu yang memiliki sifat koordinatif dan merupakan cabang khusus dari sosiologi (atau dari ilmu pengetahuan sosial). Dengan demikian sulit kiranya mencari definisi yang tepat berkaitan dengan pengertian politik apabila tidak kita kaitkan hubungannya dengan disiplin ilmu yang lain.

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa dengan pengertian dan teori sosiologi sarjana ilmu politik menurut Budiardjo (2010:29) dapat mengetahui sampai dimana stratifikasi sosial mempengaruhi atau dipengaruhi oleh a) keputusan kebijakan (*policy decisions*), b) corak dan sifat keabsahan politik (*political legitimacy*), c) sumber kewenangan (*sources*

of political authority), d) pengendalian sosial (*social control*), dan e) perubahan sosial (*social change*).

a) Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Keputusan kebijakan dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan, mengatur kehidupan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan biasa disebut sebagai kebijakan umum atau *public policy*. Ada berbagai pendapat yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan umum atau *public policy* ini seperti yang disampaikan oleh Hoogerwerf dalam Budiardjo (2010:21) bahwa obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Kebijakan umum adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (*doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middle van machtsuitoefening*).

b) Corak dan sifat keabsahan politik (*political legitimacy*)

Suatu sistem politik akan selalu berupaya membangun dan mempertahankan keabsahan kekuasaan kepemimpinannya didepan masyarakat yang dipimpinnya dengan cara membuat kesepakatan atau konsensus-konsensus tentang tujuan yang akan dicapai menuju kesejahteraan bersama. Apabila janji-janji politik itu dapat dipenuhi oleh penguasa maka akan semakin mantab legitimasi yang diberikan oleh masyarakat yang dipimpin. Masyarakat akan memberikan respon positif dari setiap kebijakan publik yang

diputuskan oleh yang berwenang dalam hal ini pemerintah karena merasa mendapatkan perlindungan dan memiliki harapan.

Legitimasi atau keabsahan menurut David Easton dalam Budiardjo (2010:65) adalah keyakinan dari pihak anggota (Masyarakat) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu (*The conviction on the part of the member that it is right and proper for him to accept and obey the authorities and to abide by the requirements of the regime*).

c) Sumber kewenangan (*sources of political authority*)

Inti dari kekuasaan pemerintahan adalah adanya kewenangan. Karena dengan adanya kewenangan itu pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan tertentu untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kewenangan disini bukanlah kewenangan yang hanya didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang ditaati, melainkan kewenangan yang valid, sah, dan mengikat dalam arti apabila tidak dilaksanakan akan beresiko bagi para pelanggarnya.

Secara sosiologis kekuasaan tidak memiliki bentuk tertentu, tetapi dalam suatu situasi memungkinkan suatu kelompok atau individu memiliki dominasi terhadap kelompok atau individu lainnya, yang disitu terdapat situasi untuk minta ditaati karena dominasi itu. Dengan

demikian sumber kewenangan bisa diklasifikasikan apakah didasarkan pada kebiasaan, dominasi, adat-istiadat, ataukah legalitas formal. Sebagaimana disampaikan Max Weber dalam Budiardjo (2010:64) dalam membahas wewenang membaginya dalam tiga macam wewenang, yaitu wewenang tradisional yang didasarkan pada tradisi lama, wewenang kharismatik yang didasarkan pada kepercayaan anggota masyarakat akan kekuatan mistik atau religius dan kesaktian pemimpinnya, dan wewenang rasional legal yang didasarkan pada tatanan hukum dan rasional.

d) Pengendalian sosial (*social control*)

Kontrol sosial menurut Roucek dan Warren dalam Ndraha (2011: 206) didefinisikan “*all those processes by which society and its component groups influence the behavior of individual members toward conformity with group norms*” (Semua proses yang dengannya masyarakat dan kelompok komponennya mempengaruhi perilaku anggota individu ke arah kesesuaian dengan norma kelompok).

Pentingnya kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa dilihat dari definisi pemerintahan yang disampaikan oleh Ndraha (2011) yang menyatakan bahwa pemerintahan adalah interaksi antara tiga subkultur, yaitu subkultur ekonomi, subkultur kekuasaan dan subkultur sosial. Fungsi dari

masing-masing kultur adalah saling mengendalikan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Misalnya subkultur ekonomi kecenderungannya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang terbatas. Dalam operasionalnya kegiatan ekonomi harus diatur oleh subkultur kekuasaan agar para pemilik modal tidak sewenang-wenang kepada para pekerja atau seenaknya sendiri dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Mereka harus tunduk patuh dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh subkultur kekuasaan agar terjadi keseimbangan demi kesejahteraan bersama.

Selanjutnya subkultur kekuasaan yang mempunyai kecenderungan melampaui batas dalam mengemban amanah rakyat dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji seperti korupsi, kolusi, nepotisme atau bahkan melanggar undang-undang, maka subkultur sosial harus hadir untuk mengingatkan dan mengendalikannya. Subkultur sosial bisa terangkum dalam kelompok infra struktur politik misalnya partai politik, media masa, kelompok mahasiswa, kelompok kepentingan dan komunitas-komunitas lainnya. Subkultur sosial sendiri akan selalu patuh dan tunduk kepada setiap kebijakan publik yang diambil oleh pihak yang berwenang dalam hal ini subkultur kekuasaan bilamana kebijakan tersebut selalu berpihak kepada masyarakat.

Kontrol sosial yang dilakukan oleh subkultur sosial dengan menggunakan norma sosial disebut kontrol sosial informal, sedangkan kontrol sosial yang didasarkan pada norma hukum positif dan ditegakkan oleh lembaga publik, dinamakan kontrol sosial formal.

Sebagaimana dalam penyelenggaraan pemilihan umum, kontrol sosial yang dilakukan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu merupakan bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Kegiatan masyarakat sebagai upaya pemantauan dan kontrol sosial juga guna menjaga suara rakyat, misalnya dalam hal pengawasan dan pemantauan pemilu yang merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Sedangkan kontrol sosial formalnya adalah dalam bentuk pengawasan terhadap proses pemilu yang dilembagakan, dengan adanya lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan dari Bawaslu adalah bentuk pengawasan yang terlembaga dari suatu Negara.

Kedua bentuk pengawasan diatas menjalankan fungsi yang sama sebagai upaya pengawalan penyelenggaraan pemilu agar jujur dan adil. Perbedaan yang ada dalam menjalankan fungsi tersebut hanya bisa dilihat sebagai akibat kelembagaan yang mengupayakan kontrol terhadap penyelenggara Pemilu. Munculnya kelembagaan fungsi kontrol ini akibat banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Atas

persoalan itu, perundang-undangan pemilu melahirkan lembaga pengawas pemilu yang sekarang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

e) Perubahan sosial (*social change*)

Proposisi teori *exchange* disampaikan oleh George Homan dalam Ritzer (2018:79) yang secara garis besar dapat diambil pengertian sebagai berikut :

- ❖ Berkaitan dengan adanya hubungan antara kejadian dimasa silam dengan kejadian yang terjadi saat ini, bilamana kejadian atau perilaku dimasa lampau dalam konteks dan situasi tertentu mendapatkan ganjaran, maka tidak menutup kemungkinan kejadian atau perilaku tersebut akan kembali dilakukan.
- ❖ Berkaitan dengan frekuensi penerimaan ganjaran atas tanggapan atau perilaku tertentu yang memungkinan terjadi saat ini dengan peristiwa yang sama, Dengan seringnya seseorang memberikan ganjaran terhadap orang lain maka perilaku orang lain tersebut akan sering dilakukan.
- ❖ Berkaitan dengan pemberian nilai dan arti yang ditujukan orang lain kepada aktor, dimana apabila pemberian nilai dan arti tersebut dianggap bermakna besar, maka akan berulanglah perilaku aktor tersebut.

- ❖ Dengan seringnya orang menerima ganjaran atas setiap tindakannya, maka akan semakin berkurang nilai dari setiap tindakan yang akan dilakukan berikutnya.
- ❖ Semakin dirugikannya seseorang bila berhubungan dengan orang lain maka semakin besar kemungkinan orang yang bersangkutan mengembangkan emosinya.

Disamping ada perhitungan *cost and benefit* dalam teori *exchange*, ada juga perhitungan yang bersifat subyektif. Artinya tidak semata-mata *exchange* itu mempertimbangkan sisi ekonomi semata karena bisa saja suatu nilai yang dianggap tinggi oleh seseorang, akan dianggap rendah oleh yang lainnya.

RINGKASAN :

- 1) Masyarakat adalah unit dasar yang didalamnya memiliki kelembagaan seperti lembaga keluarga, lembaga keagamaan, lembaga sosial, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Perubahan dan pembaharuan lembaga-lembaga sebagai unit analisa sosiologi dalam proses interaksinya akan mempengaruhi pola kehidupan politik.
- 2) Kajian teori-teori sosial dan politik sama-sama menjadikan negara sebagai obyek kajian. Sosiologi melihat negara sebagai organisasi masyarakat terbesar yang sarat dengan aturan, norma dan nilai untuk pengendalian sosial kemasyarakatan, sedangkan ilmu politik melihat negara sebagai kajian pokok bagaimana kekuasaan mengelolanya.

- 3) Politik dalam suatu negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*) pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*) dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*).
- 4) Memahami politik berkaitan dengan a) sistem politik, b) partai politik, c) partisipasi politik, d) perilaku politik, e) proses politik, dan f) legitimasi.
- 5) Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).
- 6) Partisipasi politik menandakan bahwa masyarakat mengalami peningkatan status sosial ekonominya, menjadi lebih terbuka pola pikirnya yang berarti pula telah terjadi modernisasi politik dalam masyarakat.
- 7) Partisipasi politik mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya.
- 8) Max Weber membahas wewenang meliputi wewenang tradisional yang didasarkan pada tradisi lama, wewenang kharismatik yang didasarkan pada kepercayaan anggota masyarakat akan kekuatan mistik atau religius dan kesaktian pemimpinnya, dan wewenang rasional legal yang didasarkan pada tatanan hukum dan rasional.

BAB IV

KEKUASAAN

A. PENDAHULUAN



Pola hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dapat dianalisis yang akhirnya bisa ditemukan ada tidaknya kekuasaan yang mempengaruhi dalam hubungan itu. Dalam istilah lain hubungan itu bisa dikategorikan sebagai hubungan simetris dan hubungan asimetris. Hubungan simetris dicontohkan oleh soekanto (2011:480) dalam sebuah hubungan persahabatan antara dua orang teman yang saling mengidentikkan untuk membicarakan dirinya. Nilai-nilai dalam hubungan itu sarat dengan persahabatan, saling menolong dan mengalah yang jauh dari gagasan kekuasaan.

Pola hubungan asimetris sering kali kita lihat dalam kehidupan disekitar kita, baik dilingkungan sekolah, kelembagaan, komunitas atau masyarakat umumnya. Ciri khas dari hubungan asimetris adalah adanya proses pengaruh mempengaruhi. Sehingga diuraikan diawal hubungan ini jarang ditemukan dalam hubungan persahabatan yang tulus.

Perihal kekuasaan selalu diidentikkan dengan politik. Meskipun demikian konsep kekuasaan bukan merupakan konsep satu-satunya dalam ilmu politik.

Kekuasaan merupakan suatu hal yang selalu menunjukkan adanya hubungan antar manusia maupun kelompok, dan pemegang kekuasaan bisa seorang individu, kelompok, ataupun pemerintah. Kekuasaan senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat dan meskipun kekuasaan itu ada, tetap saja kekuasaan tidak dapat dimiliki oleh semua anggota masyarakat. Dengan demikian untuk mendapatkan kekuasaan memerlukan proses yang menunjukkan adanya orang atau individu yang dapat mempengaruhi pihak lain.

Proses pengaruh mempengaruhi dalam sistem politik diawali dari proses dekat mendekati, kemudian terjadi diskusi menuju kesepahaman gagasan yang selanjutnya dibuat kesepakatan bersama. Masing-masing pihak akhirnya memiliki komitmen untuk saling membantu untuk melaksanakan kesepakatan itu dengan sebuah janji. Janji inilah yang apabila aktor terpilih menjadi penguasa harus bekerja untuk mewujudkannya dengan nilai yang disebut kekuasaan.

Sejalan dengan uraian diatas, Soekanto (2011:491) mengidentifikasi hubungan tersebut dengan empat kemungkinan, yaitu :

- a) Perilaku seseorang dapat mempengaruhi dan mendominasi perilaku orang lain.
- b) Perilaku seseorang dapat mempengaruhi dan mendominasi perilaku kelompok.
- c) Perilaku kelompok dapat mempengaruhi dan mendominasi perilaku seseorang.
- d) Perilaku kelompok dapat mempengaruhi dan mendominasi perilaku kelompok.

Sumber-sumber kekuasaan itu sendiri bermacam-macam diantaranya dapat diuraikan merujuk pada (p2k.stekom.ac.id) yang menyebutkan antara lain kekayaan, sarana paksaan fisik, keahlian, kedudukan serta agama.

- ❖ *Kekayaan* merupakan salah satu sumber kekuasaan dapat diilustrasikan seperti seorang tuan tanah yang memiliki lahan pertanian yang luas yang dengannya secara langsung memiliki kekuasaan atas orang-orang yang bekerja di lahan tersebut. Bentuk kekayaan lainnya bisa seperti emas, uang, tanah dan barang-barang berharga. Mereka yang mempunyai harta kekayaan dan jumlahnya sangat besar paling tidak sangat berpotensi mempunyai kekuasaan.
- ❖ *Sarana paksaan fisik* sebagai sumber kekuasaan yang sifatnya memaksa, yang menjadikan orang lain mengikuti karena adanya paksaan tersebut. Seperti keberadaan preman dipasar yang dapat mempengaruhi pola tingkah laku orang yang berada di pasar tersebut. Mereka mengikuti dimungkinkan karena ancaman atau dengan senjata tertentu yang dibawa oleh preman tersebut, yang secara tidak langsung dapat kita lihat bahwa preman tersebut dapat mempengaruhi pola perilaku orang lain dengan ancaman kata-kata kasar atau kepemilikan senjata.
- ❖ *Keahlian* adalah sumber kekuasaan yang kemunculannya karena adanya pengakuan dari orang lainnya. Pengakuan itu diberikan karena keahlian yang dimiliki dalam keilmuan tertentu,

dan itu tidak dimiliki oleh yang lain. Seperti seorang dokter yang mendapatkan kedudukan tertentu di rumah sakit, dimana penempatan dalam jabatan yang memiliki kekuasaan didasarkan pada keahliannya.

- ❖ *Kedudukan* sebagai sumber kekuasaan dikarenakan adanya pengakuan sehingga secara legal formal bisa mempengaruhi tingkah laku yang lain. Seperti kepala sekolah terhadap staf dan guru-gurunya, dimana apabila ada yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dapat ditindak oleh kepala sekolah.
- ❖ *Agama* sebagai sumber kekuasaan yang didapat melalui keyakinan bahwa individu itu (ulama/pendeta) harus wajib diperhitungkan dalam proses perumusan kebijakan terutama kebijakan yang menyangkut umat. Dengan demikian individu tersebut *ulama/pendeta* memiliki kekuasaan atas orang lain atau umatnya.

B. KONSEP KEKUASAAN



Arti kekuasaan dari kata kuasa yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) diartikan “untuk mengurus” dan “untuk memerintah” bisa juga diartikan “kemampuan” dan “kesanggupan” atau bisa merujuk sebagai daerah (tempat dan sebagainya) yang dikuasai. Pengertian sederhana tentang kekuasaan disampaikan oleh

Budiardjo (2010:17) bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Dan mereka yang melihat kekuasaan sebagai inti politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah perebutan dan mempertahankan kekuasaan.

Ruang lingkup kekuasaan tidak hanya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, tetapi harus dikaitkan dengan disiplin ilmu lainnya karena kekuasaan akan terus beriringan dengan perubahan-perubahan sosial. Ruang lingkup kekuasaan bisa dikaitkan dengan pengendalian sosial mengingat fungsi dari kekuasaan adalah untuk menyelesaikan konflik ditengah-tengah masyarakat, menjaga ketertiban dan keseimbangan agar dalam setiap beraktivitas sosial masyarakat merasa aman. Sebagaimana pendapat sosiolog Parsons dalam Budiardjo (2010:63) yang beranggapan kekuasaan sebagai alat yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan dengan membuat keputusan yang mengikat dengan diikuti sanksi-sanksi apabila tidak diindahkan. Tampak jelas pendapat tersebut bahwa kekuasaan harus dikaitkan dengan kewenangan (*authority*). Kekuasaan juga berkaitan dengan masa lalu dan masa kini, serta untuk masa yang akan datang. Hal ini bisa kita lihat dalam konsep-konsep pembangunan, dimana ada perencanaan tahunan, lima tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang melebihi masa jabatan sebuah kekuasaan.

Munculnya kekuasaan dalam konsep sosiologi dapat dianalisis sebagaimana lahirnya seorang pemimpin yang akhirnya mendapat sebuah kekuasaan. Sebagaimana disinggung sebelumnya dalam pendapat

Max Weber yang membagi tiga macam wewenang, yaitu wewenang tradisional yang didasarkan pada tradisi lama, wewenang kharismatik yang didasarkan pada kepercayaan anggota masyarakat akan kekuatan mistik atau religius dan kesaktian pemimpinnya, dan wewenang rasional legal yang didasarkan pada tatanan hukum dan rasional.

Berkaitan dengan ketiga kewenangan tersebut, diilustrasikan oleh Soekanto (2011:496) berkaitan dengan cara mendapatkan sebuah kekuasaan yang dapat dimaknai sebagai berikut :

- ❖ Apabila ada sebuah suku yang terkepung oleh musuh, maka memerlukan seorang pemimpin yang memiliki strategi dan siasat bagaimana untuk dapat keluar dari kepungan itu. Dan apabila strategi dan siasat itu berhasil, maka masyarakat sebagai pengikut akan memberinya hadiah dan hak istimewa terhadapnya. Dan hak istimewa yang telah didapat tersebut harus dapat dipertahankan, bahkan bisa diperluas. Salah satu caranya adalah dengan mendidik anak laki-lakinya agar terampil bertempur untuk mempertahankan hak istimewa keluarga tersebut, yang kemudian membawanya lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya dalam entitas tersebut.
- ❖ Dalam bidang ekonomi misalnya seorang petani bisa mendapatkan hak istimewa atau hadiah karena bisa dengan terampil mengolah lahan pertanian melebihi petani lain dilingkungannya. Dan pihak lain yang kurang beruntung bisa jadi akan berhutang kepadanya, dan apabila tidak bisa mengembalikan hutang tersebut, maka dominasi

dari pihak yang diistimewakan akan terus berlangsung bahkan bisa mengarah ke perbudakan.

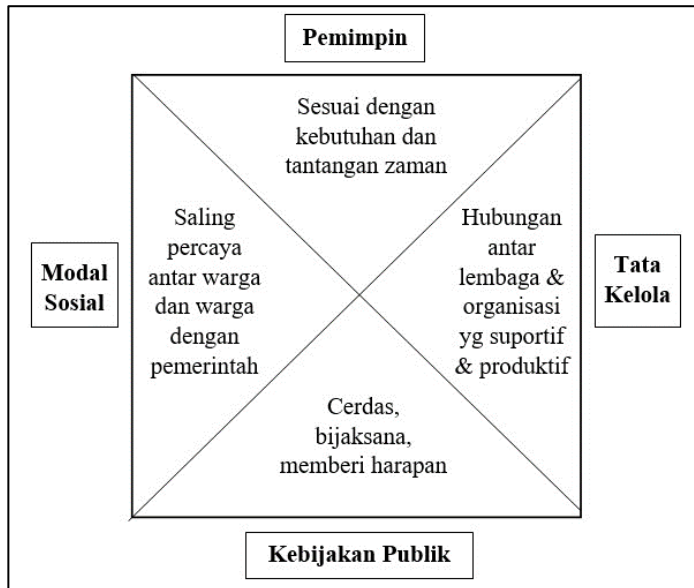
- ❖ Kemampuan akan pengetahuan ghaib juga dianggap suatu kecakapan yang berpengaruh untuk mendapatkan sebuah kekuasaan.

Untuk kekuasaan yang memiliki kewenangan rasional legal misalnya saja dalam proses pemilihan kepala desa, atau proses politik yang selama ini dipraktekkan baik dalam lingkup pemilihan kepala daerah maupun pemilihan pemimpin negara, dalam prosesnya mencakup proses politik dengan tahapan-tahapan yang baku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian bagaimana komunikasi politik itu dilakukan tetap saja dalam perhelatannya mengadopsi konsep-konsep sosiologi yang tidak bisa lepas dari unsur-unsur tradisional dalam upaya mendapatkan kemenangan.

Pendapat lain tentang pengertian wewenang disampaikan oleh Warren B. Brown dan Dennis J. Moberg dalam Ndraha (2011:85) yang mendefinisikan wewenang sebagai “*Institutionalized form of power vested in a position or office*” dimana muara dari kerangka pemikiran itu adalah pada prinsip penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban inilah yang sering dianggap remeh bahkan terkadang diabaikan oleh para pejabat publik meskipun sebelum memangku jabatan mereka diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang.

Berkaitan dengan semua uraian diatas maka tidak salah apabila Riant Nugroho (2017:287)

menyebutkan bahwa pada dasarnya terdapat empat dimensi yang mendukung keberhasilan suatu bangsa : 1). Modal sosial suatu bangsa, 2). Tata kelola bangsa tersebut, 3). Kebijakan publik yang dihasilkan, 4). Pemimpin yang dimilikinya. Keempat kombinasi tersebut tidak boleh saling meniadakan. Artinya, keempatnya harus ada, sebagaimana gambar 4.1 dibawah ini.



Gambar 4.1
 Faktor penentu keberhasilan bangsa

Sumber : Riant Nugroho (2017:287)

Dari keempat dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Artinya masing-masing saling berkaitan dan saling mendukung. Sebagaimana disinggung diuraian sebelumnya bahwa meskipun lahirnya pemimpin dalam kekuasaan formal

sesuai dengan aturan perundang-undangan namun proses untuk mendapatkan kekuasaan itu pasti melalui proses sosial, dan proses sosial ini berkaitan dengan seberapa besar modal sosial yang dimiliki calon pemimpin atau pemegang kekuasaan.

Meskipun demikian disampaikan oleh Nugroho bahwa yang paling dominan dari keempat dimensi tersebut adalah faktor pemimpin. Mengapa demikian karena pemimpinlah yang memiliki kekuasaan untuk menentukan tata kelolanya agar hubungan antar lembaga yang ada harmonis, pemimpinlah yang memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan yang cerdas, bijaksana, dan memberi harapan masyarakat serta untuk mewujudkan visi misi kepemimpinannya, dan pemimpinlah yang memiliki kekuasaan untuk menjaga publik agar tetap ada kepercayaan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Dengan kata lain, pemimpinlah yang mengambil keputusan.

C. KEKUASAAN FORMAL



Pendapat Max Weber dalam Ndraha (2011:85) terhadap teori kekuasaan yang berkaitan dengan wewenang legal rasional, menjadi basis dari wewenang pemerintahan. Wewenang adalah kekuasaan yang sah, oleh karenanya semangat *formalistic impersonality* mendominasi semangat birokrasi. Lebih lanjut disampaikan bahwa Max Weber melihat kekuasaan dari sudut pandang manusia, sementara

pendapat lain seperti Hegel melihatnya sebagai sebuah sistem obyektif diluar manusia.

Ndraha sendiri atas uraian tersebut berpendapat bahwa hal tersebut bertolak belakang dengan konsep *civil society*. Manusia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dengan mudah mengidentifikasi dirinya dengan bertindak atas nama negara, sementara wilayah teritorial dengan masyarakatnya dianggap sebagai obyek yang diperintah yang berada dalam kekuasaannya. Dari sisi ini muncul pemikiran kritis bahwa hak warga negara sebenarnya adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dalam hal ini pemerintah. Pemerintah juga merupakan bagian dari yang diperintah, artinya pemerintah itu tidak *given*, melainkan melalui proses yang didalamnya ada ikatan janji untuk bisa saling membantu, memenuhi, bahkan saling memaksa. Oleh karenanya untuk menghindari pemaksaan dari yang diperintah, maka setiap kebijakan pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan harus berpihak untuk melindungi, dan mensejahterakan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam kekuasaan bisa bersifat mempengaruhi kebijakan atau sebagai kontrol sosial dalam hal apabila kebijakan itu mulai menjauhi keberpihakannya pada pihak yang diperintah. Meskipun antara kekuasaan dan pengaruh itu mana yang menjadi konsep pokok para sarjana politik berbeda pendapat, namun secara umum masyarakat berpendapat bahwa kekuasaan dapat memberi sanksi dan pengaruh. Sejalan dengan hal ini disampaikan pendapat Fletchteim dalam Budiardjo (2010:19) bahwa

ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara.

Pada tataran empirik yang terjadi di Indonesia, untuk mendapatkan kekuasaan formal ini melalui proses pemilihan maupun proses politik yang diatur secara legal formal dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya proses pemilihan yang ada di tingkat pemerintahan desa, dimana kepala desa dipilih oleh masyarakat desa melalui tahapan pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Semua yang akan memilih dan dipilih, harus memenuhi persyaratan tertentu. Pada tahapan pencalonan, siapa yang akan dicalonkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang calon kepala desa, dan apabila salah satu syarat itu tidak bisa dipenuhi maka secara hukum pencalonannya bisa dibatalkan.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 (pasal 33) bahwa calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat.
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Demikian halnya dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan apabila sudah ditetapkan menjadi kepala desa, semua diuraikan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dalam praktek pelaksanaan tugas tidak sesuai atau melanggar ketentuan-ketentuan itu, maka ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh kepala desa yang bersangkutan.

Sebagaimana pendapat Talcott Parsons dalam Budiardjo (2010:63) yang menyatakan bahwa :

“Kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah apabila menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu”.

Dengan demikian kekuasaan memerlukan kewenangan, karena dengan kewenangan itu kekuasaan bisa mendistribusikannya atau mengalokasikan nilai-nilai, dan dengan kewenangan itu kekuasaan bisa menyelesaikan persoalan masyarakat dengan cara pendekatan, penjelasan, dan paksaan. Nilai menurut Budiardjo (2010 : 21) adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan oleh karenanya dianggap baik dan benar, sesuai yang ingin dimiliki oleh manusia. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian (*judgement*) atau suatu asas seperti misalnya kejujuran, kebebasan berpendapat dan kebebasan mimbar. Nilai juga bisa bersifat konkret (material) seperti rumah, kekayaan dsb. Nilai-nilai inilah yang dikarenakan pembagian atau distribusinya seringkali menimbulkan permasalahan atau konflik sosial.

Kekuasaan formal dalam ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan

kekuasaan kehakiman. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh presiden sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 (pasal 4) yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk bisa memegang kekuasaan pemerintahan tersebut diawali dengan proses politik, dimana pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Apabila dalam masa jabatannya terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, dapat memberhentikannya.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 (pasal 20) yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan UU RI nomor 17 tahun 2014 menjalankan a) fungsi legislasi, b) fungsi anggaran, dan c) fungsi pengawasan.

a) Fungsi legislasi :

Tugas dan wewenang DPR dalam menjalankan fungsi legislasi :

- ❖ Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

- ❖ Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
- ❖ Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
- ❖ Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
- ❖ Menetapkan UU bersama dengan Presiden
- ❖ Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

b) Fungsi anggaran :

Tugas dan wewenang DPR dalam menjalankan fungsi anggaran :

- ❖ Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
- ❖ Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
- ❖ Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
- ❖ Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

c) Fungsi pengawasan :

Tugas dan wewenang DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan :

- ❖ Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
- ❖ Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama

Selain tugas dan wewenang dalam menjalankan ketiga fungsi diatas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai tugas dan wewenang lainnya, yaitu :

- ❖ Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
- ❖ Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk:
(1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
- ❖ Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
- ❖ Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- ❖ Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
- ❖ Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 (pasal 24) bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tiga pembagian kekuasaan besar tersebut secara fungsional dalam struktur kekuasaan pemerintahan bisa dilakukan oleh satu kekuasaan apabila kita mau mempelajari kekuasaan pemerintahan paling bawah, yaitu pemerintahan desa. Secara fungsional jelas kepala desa melaksanakan kekuasaan eksekutif karena menjalankan roda pemerintahan desa. Disamping hal tersebut kepala desa juga melaksanakan fungsi legislatif karena membuat peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dan yang ketiga kepala desa juga melaksanakan fungsi-fungsi kehakiman karena selalu menjadi rujukan bagi warga masyarakat apabila ada perselisihan dengan cara mendamaikan.

D. KEKUASAAN INFORMAL



Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Deliar Noer dalam Budiardjo (2010:18) bahwa sebenarnya ilmu politik

yang berkaitan dengan kekuasaan dalam kehidupan bersama masyarakat yang tidak terbatas pada bidang hukum semata dan pada negara yang relatif baru. Sebelum negara itu ada, kekuasaan itu sudah ada. Hanya dalam kehidupan modern maka kekuasaan baru dikaitkan dengan negara.

Darimana sebenarnya kekuasaan itu tiba-tiba bisa dimiliki seseorang ? Kekuasaan informal dalam pemikiran Weber dikategorikan dalam kewenangan tradisional dan kewenangan kharismatik. Bentuk kekuasaan bisa disebabkan beberapa hal karena adanya suatu kelebihan tertentu pada mereka. Misalnya karena kedudukan, kekayaan, senioritas, keyakinan, pendidikan dan apapun yang membuat lebih dari masyarakat pada umumnya, seperti yang disinggung dalam pendahuluan (sumber-sumber kekuasaan). Oleh karenanya para pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan dilingkungan orang-orang yang memiliki kekuasaan-kekuasaan informal itu harus mendengarkan pendapat mereka sebelum keputusan itu diambil.

Kekuasaan informal dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan memang tidak ada dalam struktur, namun keberadaannya bisa mempengaruhi atau bisa mewarnai kebijakan. Hal ini terjadi karena pada proses politik, para aktor yang berlaga di

panggung politik memerlukan dukungan politik. Dalam proses mencari dukungan tersebut mereka mendekati sumber-sumber kekuasaan informal untuk meminta saran pendapat dan dukungan. Mereka yang memiliki ketajaman intuisi dan keilmuan yang mumpuni akan memberikan dukungan dengan tulus kepada para aktor yang menurut sudut pandangnya layak untuk dipilih. Namun bagi tokoh informal lainnya ada yang memberikan dukungan dengan catatan-catatan yang harus dipenuhi apabila kelak mendapatkan suatu jabatan. Dalam hal ini sebenarnya masyarakat mempunyai kekuatan untuk tawar-menawar kepada aktor-aktor politik baik mereka yang berkepentingan untuk jabatan politik baik kepala daerah maupun jabatan politik sebagai wakil rakyat. Inilah yang disebut janji politik antara pemilih dan yang dipilih.

Secara umum setiap politisi pasti memiliki janji-jani politik terhadap masyarakat dan secara umum pula banyak janji-jani yang tidak terpenuhi selama periode jabatannya. Oleh karena itu salah satu sebab menurunnya partisipasi politik adalah turunnya kepercayaan masyarakat kepada para pejabat publik terutama kepada para politisi. Sehingga pertanggungjawaban merupakan hal yang penting yang harus disadari oleh para pejabat publik mengingat masyarakat telah menggadaikan masa depannya setiap lima tahun kedepan kepada mereka yang dipilih, meskipun pilihan itu terkadang juga sekedar memilih yang tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional karena berbagai keterbatasan yang dimiliki.

Akhirnya muncul pertanyaan kepada siapa sebenarnya para aktor yang telah menduduki posisi

jabatan publik dan jabatan politik dalam pemerintahan itu harus bertanggungjawab ? Ndraha (2011:121) telah merumuskan dasar pertanggungjawaban itu yang digambarkan dalam tabel 4.1 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pertanggungjawaban

NO	DASAR	BERTANGGUNG JAWAB KEPADA
1.	SUMPAH	a. ALLAH b. (DISAKSIKAN OLEH) MANUSIA c. NEGARA
2.	JANJI	a. ATASAN b. KONSUMER c. PEWARIS (PENGGANTI)
3.	<i>SELF- COMMITMENT</i>	DIRI SENDIRI (PRIBADI, HATI NURANI)
4.	PIDATO, PERILAKU, dsb	MASYARAKAT
5.	PERILAKU SEHARI-HARI	ALAM LINGKUNGAN)

Pertanggungjawaban pemerintahan itu harus dilakukan karena disamping adanya komitmen awal dengan para pendukungnya, pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang itu sendiri yang memiliki pilihan untuk mencalonkan diri sebagai aktor pemerintahan.

Kalaupun tidak menawarkan diri melainkan diangkat untuk menjalankan tugas, mereka juga tetap akan mengangkat sumpah. Oleh karena itu model pertanggungjawaban diatas bisa dilaksanakan berdasarkan karena apa mereka menjadi pejabat penyelenggara pemerintahan.

Kekuasaan informal dalam struktur politik dapat dilihat di organisasi-organisasi ataupun komunitas-komunitas seperti dalam infra struktur politik. Infra struktur politik adalah organisasi / kelompok kepentingan yang merupakan bagian dari suatu kesatuan yang berkepentingan dalam pembentukan tatanan sosial pada suatu wilayah tertentu.

Infrastruktur politik meliputi:

❖ Partai politik :

Organisasi politik yang memiliki ideologi tertentu dan dibentuk dengan tujuan khusus yakni memperoleh kekuasaan politik.

❖ Organisasi kemasyarakatan (ormas) :

Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan).

❖ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) :

Organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

❖ Media massa :

Media Massa (Mass Media) sering disingkat jadi “media” saja. Media/Medium, adalah saluran, sarana, atau alat yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, yakni komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak (*channel of mass communication*).

❖ Mahasiswa / Pelajar :

Yaitu sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas. Sepanjang sejarah, mahasiswa di berbagai negara mengambil peran penting dalam sejarah suatu negara.

❖ Tokoh-tokoh politik :

Yaitu orang-orang yang terkemuka atau terkenal di dunia politik, karena memang orang yang ahli politik / pakar politik, biasanya pimpinan dan fungsionaris partai, pejabat politik atau politisi.

❖ Kelompok penekan :

Merupakan organisasi / perhimpunan dengan aktivitas atau kegiatannya tidak berkaitan dengan politik, namun perkembangan situasi dan kondisi mengubahnya menjadi *pressure group* yakni memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar

keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan.

Contohnya: Lembaga swadaya masyarakat peduli nasib petani, lembaga swadaya masyarakat penolong korban gempa, dsb.

❖ Kelompok kepentingan :

Merupakan sekelompok manusia membentuk organisasi yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum (masyarakat luas) ataupun kepentingan kelompok tertentu.

Contoh kelompok kepentingan, yaitu: Organisasi massa, paguyuban alumni sekolah / perguruan tinggi, kelompok daerah asal, paguyuban hobi tertentu, dan lain sebagainya.

Mereka yang bergabung dalam keorganisasian infrastruktur politik, dalam lingkungan masyarakatnya secara umum memiliki kelebihan tertentu atau dengan kata lain berbeda dengan masyarakat biasa. Hanya tingkat ketokohan dan seberapa besar tingkat pengaruhnya kepada lingkungan masyarakat tentu berbeda-beda bahkan ada kemungkinan mereka masih bisa dipengaruhi atau bahkan tunduk dan patuh pada tokoh informal lainnya yang lebih kharismatik.

Tokoh informal tertentu karena kharismanya, ketokohan, dan keilmuannya berperan layaknya seperti orang tua, guru bangsa yang berpenampilan tenang dan tidak terlibat hiruk pikuk dalam media untuk sekedar membuat pencitraan, namun mereka terus mengikuti kemana arah negara itu mau dibawa. Mereka akan terus mengawal rakyat menuju cita-cita luhur bangsa.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Memperhatikan perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang panjang dengan perjuangannya yang tidak pernah menyerah dengan segala macam bentuk penjajahan, menunjukkan bahwa para tokoh-tokoh informal itu ada diseluruh pelosok negeri. Setiap daerah, setiap suku bangsa yang ada di negeri ini memiliki tokoh-tokoh informal yang mempunyai kekuatan rasional dan supra rasional, yang kokoh berdiri dengan keteguhan hati, yang selalu tenang dan jernih dalam melihat semua persoalan, yang mencintai tanah airnya melebihi cintanya pada diri sendiri, dan yang terus menerus memohonkan do'a untuk seluruh masyarakatnya agar sejahtera dan aman dalam naungan NKRI.

E. KEKUASAAN POLITIK



Tidak semua individu menyukai dengan istilah kekuasaan apalagi kekuasaan politik. Karena dalam istilah kekuasaan terkandung makna-makna negative seperti penindasan, pemaksaan, kekejaman, dan ketidaksetaraan. Namun demikian disadari ataupun tidak kekuasaan politik itu ada dan selalu berada dalam setiap aktivitas manusia terlebih dalam aktivitas yang melibatkan kelompok, komunitas, ataupun organisasi secara umum. Aktivitas-aktivitas yang akhirnya

membentuk nilai-nilai itulah yang akhirnya bisa mewarnai dan membentuk sikap politik individu yang terlibat didalamnya.

Telah diuraikan diatas terkait bentuk-bentuk kekuasaan yang sebenarnya telah menyinggung juga kekuasaan politik, baik dalam kekuasaan formal maupun informal. Kekuasaan politik disini akan diuraikan lagi merujuk pendapat dari Roskin dkk (2016:4) dalam konsep biologis, psikologis, kultural, rasional, irasional, dan kekuasaan dalam perpaduan diantaranya yang dapat dimaknai sebagai berikut :

a) Biologis

Berangkat dari pernyataan Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia sebagai *zoom politicon* yang berarti manusia sebagai makhluk politik atau makhluk sosial yang secara alamiah mereka hidup berkelompok, dalam kawanan sebagaimana binatang seperti gajah, bison atau lainnya untuk bertahan hidup dan mempertahankan eksistensinya. Dalam kelompok dan kawanan itu tercipta pula pemimpin yang harus dipatuhi oleh pengikut. Berangkat dari pemikiran tersebut, dijelaskan oleh biologis modern bahwa dalam membentuk sistem politik dan mematuhi seorang pemimpin merupakan pembawaan yang secara lahiriah diwariskan atau turun-temurun secara genetik yang diungkapkan oleh para ahli bahwa praktik politik manusia itu menunjukkan kekuasaan hierarki layaknya mamalia.

Meskipun demikian, uraian diatas menyisakan pertanyaan-pertanyaan bahwa dalam kenyataan empiriknya banyak terjadi perpecahan

dalam suatu kelompok tertentu yang akhirnya terbentuklah kelompok-kelompok baru. Sehingga bisa dikatakan bahwa pada kondisi tertentu tidak selalu pengikut itu mematuhi otoritas entah dengan alasan atau motivasi tertentu.

b) Psikologis

Dikutip dari studi Milgram yang memberikan instruksi kepada subyek untuk memberikan aliran listrik kepada korban yang diikat di sebuah kursi, dimana korban adalah seorang aktor yang pura-pura kesakitan. Mayoritas subyek tidak menyukai untuk menyakiti korban. Hal demikian dilakukan karena ada instruksi dari pihak otoritas atau pihak yang berwenang, sehingga dijadikan dalih oleh subyek bahwa kesakitan yang dialami korban menjadi tanggung jawab pihak yang memberi perintah. Kekuasaan politik psikologi ini berkaitan dengan teori biologi dan penjelasan psikologis yang berkaitan dengan kepatuhan dan politik ini memerlukan waktu yang sangat panjang bahkan berabad-abad lamanya.

Studi psikologi menerangkan bahwa orang mayoritas itu secara alamiah bersifat konformis. Sudut pandang kelompok mempengaruhi individu anggota kelompok untuk melihat sesuatu berdasarkan sudut pandang kelompoknya, sehingga seringkali mengabaikan pandangan ataupun masukan dari pihak atau kelompok lain meskipun sebenarnya masukan itu bersifat positif. Kepatuhan atau loyalitas terhadap kelompok menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan yang mendasar untuk hidup

berkelompok, dan hal inilah yang mendorong terbentuknya suatu masyarakat.

c) Kultural

Teori kultural mendominasi pada abad ke 20 berkaitan yang menyatakan bahwa perilaku sosial adalah hasil dari suatu pembelajaran, dan bukan dari warisan keturunan atau biologis. Kesimpulan yang diambil para antropolog adalah bahwa setiap perbedaan perilaku sosial adalah kultural, termasuk dalam kehidupan keluarga dalam membesarkan anak-anaknya. Bertahannya komunitas politik karena penanaman nilai-nilai kultural mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan peribadatan, termasuk media masa yang kemudai terbangun nilai-nilai salah satunya adalah sub bidang politik. Peneliti bidang politik menyampaikan bahwa budaya politik dalam suatu negara itu dibangun dalam jangka waktu yang sangat panjang dari factor agama, cara mengasuh dan mendidik anak, faktor ekonomi, termasuk factor kepemilikan tanah.

Sulit untuk memahami bila bidang politik tidak dikaitkan dengan budaya. Sebagaimana kasus di Iran yang menggulingkan para shah tahun 1979 dengan menyuarakan nilai-nilai tradisional dan menyambut kembali kepemimpinan yang religius. Teori kultural juga disuarakan di Amerika Serikat ketika partai republic menyuarakan nilai-nilai agama, kemandirian, dan kekeluargaan sebagai akar budaya Amerika Serikat. Para ahli politik mempercayai bahwa pembangunan bidang politik dan ekonomi bergantung juga pada budaya.

d) Rasional

Pendekatan politik lainnya memandang politik adalah suatu hal yang rasional, yaitu bahwa orang memiliki alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu karena mereka mengetahui apa yang mereka inginkan. Tokoh politik klasik (Hobbes dan Locke), percaya bahwa pembentukan masyarakat sipil atau madani karena menurut pikirannya adalah lebih baik dibandingkan anarki. Untuk melindungi kehidupan dan properti, rakyat membentuk pemerintahan. Jikalau pemerintah yang dibentuk itu bertindak sewenang-wenang, rakyat memiliki dan berhak membubarkan diri dan membentuk pemerintahan baru. Teori Lockean ini begitu mempengaruhi Bapak Pendiri Amerika Serikat.

Akal manusia diremehkan dalam pendekatan biologis, psikologis, dan kultural, yang mengklaim bahwa individu itu jarang untuk berpikir rasional karena manusia dilahirkan atau dikondisikan dalam perilaku tertentu. Kemudian bagaimana apabila ada kasus seseorang memiliki pendapat sendiri dan tidak setuju dengan suatu kelompok ? Bagaimana penjelasan kita berkaitan dengan pikiran yang berubah tersebut? Penilaian rakyat berdasarkan rasionalitas tersebut adalah wajar dan dilakukan setiap saat. Sistem politik yang dibangun berdasarkan rasionalitas manusia dirasa lebih baik guna membangun dan membentuk pemerintahan yang adil dan manusiawi. Bila pemimpin memiliki anggapan rakyat akan patuh karena keturunan atau kondisi kultural, mereka

dapat lolos dari segala tindakan penipuan dan pemerintahan yang buruk. Sebaliknya, jika pemimpin beranggapan rakyat berpikir rasional, mereka akan menghormati kemampuan rakyat untuk mengenali kesalahan. Oleh karena itu, meskipun tidak sepenuhnya rakyat berpikir rasional, akan lebih baik jikalau pemimpin beranggapan demikian.

e) Irasional

Pada dasarnya manusia bersikap irasional. Berkaitan dengan politik, pernyataan atas pemikiran ini dikembangkan oleh sekelompok ahli di akhir abad kesembilan belas. Sikap emosional rakyat yang didominasi oleh mitos dan stereotip, serta politik sesungguhnya merupakan manipulasi simbol. Massa dianalogikan seperti seekor binatang yang buas dan digerakkan untuk melakukan bisnis majikannya. Sesuatu yang mereka anggap rasional sesungguhnya merupakan mitos. Praksisi pertama pendekatan irasional ini adalah Mussolini, yang mendirikan fasisme Italia, kemudian diikuti oleh Hitler di Jerman. Fundamentalis Muslim, Osama bin Laden memiliki ribuan pengikut fanatik dengan menciptakan mitos bahwa Amerika adalah musuh Islam.

Meskipun pendekatan irasional atas perilaku politik manusia itu bermanfaat, tetapi menimbulkan konsekuensi yang mungkin cukup berbahaya. Pemimpin apabila yang digunakan teknik irasional mulai meyakini propaganda mereka akan membawa negara pada tirani, perang,

kehancuran ekonomi. Sebagian menemukan irasionalisme bahkan di masyarakat paling maju sekalipun, yaitu politik yang dicerminkan oleh pemimpin bergaya heroik dan seruan massa.

f) Perpaduan

Semua penjelasan berkaitan dengan kekuasaan politik dalam kurun waktu dan situasi tertentu masing-masing dapat menjelaskan kekuasaan dan mempunyai kebenaran. Pamflet *Common Sense* Tom Paine menjelaskan secara rasional alasan Amerika harus memisahkan diri dari Inggris. Perumus Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi Amerika Serikat dimasa itu terinspirasi oleh rasionalisme. Mengikuti filsuf dan rakyat, mereka merumuskan bahwa pendapatnya seperti aktivitas politik manusia yang logis sebagaimana hukum fisika Newton. Sejarawan Henry Steele Commager mengacu Konstitusi sebagai “perhiasan Abad Pencerahan”, yakni puncak masa rasional.

Namun seberapa rasional mereka? Diakhir abad ke-18, ketiga belas koloni Amerika sudah berkembang dan terpisah secara kultural dari Inggris. Rakyat beranggapan dirinya sebagai orang Amerika, bukan lagi sebagai koloni Inggris. Mereka membaca berita tentang Amerika melalui surat kabar dan lebih sering melakukan komunikasi sesama mereka, dibandingkan dengan rakyat Inggris. Jadi pemisahan yang terjadi cenderung secara kultural daripada rasional.

Tidak juga bisa dilupakan tentang faktor psikologis dan irasional. Samuel Adams adalah

seorang orator berbakat, Thomas Jefferson penulis hebat, dan George Washington jenderal karismatik. Pemisahan Amerika dari Inggris dan pendirian Orde Baru merupakan perpaduan yang sifatnya kompleks atas semua faktor tersebut. Perpaduan yang kompleks ini dapat berlaku dan terjadi dalam sistem politik mana pun. Tentunya ada yang lebih dominan diantara faktor-faktor tersebut meskipun tidak bisa kita sampaikan dengan pasti faktor mana yang lebih dominan atau signifikan. Perlu diperhatikan kiranya bagaimana beragam faktor tersebut bercampur satu dengan lainnya. Misalnya faktor biologis yang mengarah ke psikologis, dan kemudian berlanjut ke faktor kultural, rasional, dan irasional, kemudian membentuk sebuah jaring tak berujung.

Kekuasaan merupakan koneksi antara orang-orang, suatu kemampuan individu untuk mempengaruhi dan membuat orang lain melaksanakan keinginannya. Kesalahan umum mengenai kekuasaan politik diantaranya adalah melihatnya sebagai kuantitas yang terukur dan terbatas. Kekuasaan politik bukanlah berbentuk megawatt atau botol. Revolusionis berbicara bagaimana “merebut kekuasaan” yang seolah-olah kekuasaan itu disimpan sebagai harta nasional yang dapat direbut secara diam-diam. Afghan Taliban “merebut kekuasaan” pada 1995-1996, tetapi mereka adalah minoritas dalam populasi Afghan. Tidak sedikit rakyat Afghan sendiri yang melawan dan membenci mereka. Revolusionis mempunyai anggapan akan mendapatkan legitimasi secara otomatis apabila mereka berhasil “merebut kekuasaan”. Tentu saja tidak. Kekuasaan diperoleh, bukan direbut.

Pertanyaan yang kerap kali muncul adalah politik selalu identik dengan kekuasaan atau sebaliknya? Bagi mereka yang gila kekuasaan (termasuk didalamnya para politisi) beranggapan keduanya sama, yang sebenarnya merupakan oversimplifikasi. Sebuah pendapat beranggapan bahwa politik adalah sebuah kebijakan atau kombinasi tujuan dan kekuasaan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Dengan demikian, kekuasaan merupakan bahan utama didalam politik. Tidak bisa dibayangkan bila sistem politik tapi tanpa kekuasaan politik. Bahkan seorang yang religiuspun bila berkuasa atas nama cinta menjalankan kekuasaan itu terhadap pengikutnya. Kekuasaannya mungkin bersifat baik, tetapi bukankah itu tetap kekuasaan. Dengan demikian sebenarnya kekuasaan itu sebagai alat bantu agar kebijakan dan keputusan bisa dijalankan atau diimplementasikan. Mungkin saja anda memiliki suatu tujuan yang mulia, tetapi tujuan itu hanya akan menjadi pemikiran belaka bila tanpa kekuasaan untuk mengimplementasikannya.

Disisi lain ada yang melihat esensi politik sebagai perebutan kekuasaan, diibaratkan sebagai permainan besar dengan tujuan sebuah kekuasaan. Misalnya inti dan tujuan dari Pemilu tidak lain adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Namun demikian, apabila kekuasaan dijadikan satu-satunya tujuan dari politik yang mengesampingkan tujuan lainnya, maka kecenderungannya politik akan menjadi brutal, sinis, dan bahkan bisa merugikan. Rezim Hitler menghancurkan dirinya sendiri dalam pemujaan kekuasaan. Terobsesi untuk mendapatkan kembali kekuasaan kepresidenan, Presiden Nixon

menghancurkan pemerintahannya sendiri. Seperti yang disampaikan sejarawan dan filsuf Inggris, Lord Acton, “Bila kekuasaan cenderung korup, maka kekuasaan absolut pastilah korup.”

RINGKASAN :

- 1) Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Dan mereka yang melihat kekuasaan sebagai inti politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah perebutan dan mempertahankan kekuasaan. Budiardjo (2010:17)
- 2) Ruang lingkup kekuasaan bisa dikaitkan dengan pengendalian sosial mengingat fungsi dari kekuasaan adalah untuk menyelesaikan konflik ditengah-tengah masyarakat, menjaga ketertiban dan keseimbangan agar dalam setiap beraktivitas sosial masyarakat merasa aman.
- 3) Keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh 4 (empat) dimensi yaitu a) Modal sosial suatu bangsa, b) Tata kelola bangsa tersebut, c) Kebijakan publik yang dihasilkan, dan d). Pemimpin yang dimilikinya. Riant Nugroho (2017:287). Dari keempat dimensi tersebut faktor pemimpin menjadi dimensi yang paling dominan.
- 4) Kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh presiden diawali dengan proses politik melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Meskipun kekuasaan pemerintahan itu termasuk kekuasaan formal, komunikasi politik yang dilakukan tetap saja tidak lepas

dari konsep-konsep sosiologi yang tidak bisa lepas dari unsur-unsur tradisional dalam upaya mendapatkan kemenangan.

- 5) Kekuasaan informal merupakan kekuasaan yang ada dalam infra struktur politik, yang tidak ada dalam struktur organisasi pemerintahan namun keberadaannya bisa mempengaruhi kebijakan publik bahkan bisa mempengaruhi struktur dalam birokrasi pemerintahan.
- 6) Kekuasaan informal dalam pemikiran Weber dikategorikan dalam kewenangan tradisional dan kewenangan kharismatik. Bentuk kekuasaan bisa disebabkan beberapa hal karena adanya suatu kelebihan tertentu pada mereka. Misalnya karena kedudukan, kekayaan, senioritas, keyakinan, pendidikan dan apapun yang membuat lebih dari masyarakat pada umumnya.
- 7) Kekuasaan politik dalam konsep biologis, bahwa dalam membentuk sistem politik dan mematuhi seorang pemimpin merupakan pembawaan yang secara lahiriah diwariskan atau turun-temurun secara genetic.
- 8) Kekuasaan politik dalam konsep psikologis bahwa korban sebagai obyek dari tindakan subyek atau yang menjalankan perintah merupakan tanggung jawab pemberi perintah sepenuhnya.
- 9) Kekuasaan politik dalam konsep kultural, bahwa budaya politik dalam suatu negara itu dibangun dalam jangka waktu yang sangat panjang dari factor agama, cara mengasuh dan mendidik anak, faktor ekonomi, termasuk factor kepemilikan tanah.

- 10) Kekuasaan politik dalam konsep rasional bahwa orang memiliki alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu karena mereka mengetahui apa yang mereka inginkan.
- 11) Kekuasaan politik dalam konsep irasional bahwa sikap emosional rakyat yang didominasi oleh mitos dan stereotip, serta politik sesungguhnya merupakan manipulasi simbol. Sesuatu yang mereka anggap rasional sesungguhnya merupakan mitos.
- 12) Kekuasaan dalam perpaduan bahwa kekuasaan politik dalam kurun waktu dan situasi tertentu masing-masing dapat menjelaskan kekuasaan dan mempunyai kebenaran.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN DAN POLITIK PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN



Semangat muatan yang terkandung dalam alinea keempat UUD 1945 harus tetap dijadikan pondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan agar para pelaku pemerintahan utamanya dikalangan para pengambil keputusan dapat memegang amanah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara benar berkaitan dengan penyelesaian semua persoalan dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat diklasifikasikan dalam tiga jenis kebutuhan yang oleh Nugroho (2022: 63) kebutuhan itu dipahami sebagai kebutuhan untuk hidup, bertahan hidup, dan memenangkan hidup. Jadi bukan “sekedar hidup”.

Tiga jenis kebutuhan dimaksud adalah:

- a. Kebutuhan untuk dapat hidup.
Yaitu kebutuhan untuk dapat hidup berkaitan dengan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, dan keberadaannya sebagai bangsa dan negara.
- b. Kebutuhan untuk bertahan hidup.
Yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup berkaitan dengan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, dan keberadaannya sebagai bangsa dan negara.
- c. Kebutuhan untuk memenangkan hidup

Yaitu kebutuhan untuk memenangkan hidup berkaitan dengan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, dan keberadaannya sebagai bangsa dan negara.

Cakupan kebutuhan rakyat untuk dapat hidup, bertahan hidup, dan memenangkan hidup tersebut meliputi sebagaimana dalam tabel 5. 1 dibawah ini:

Tabel 5.1
Kebutuhan rakyat

No	Kebutuhan rakyat untuk		
	Dapat hidup	Bertahan hidup	Memenangkan hidup
1.	Nyawa	Perlindungan	Kebersamaan
2.	Makanan layak	Keadilan	Pemihakan
3.	Pakaian layak	Kesetaraan	Keandalan
4.	Hunian layak	Kesehatan	Keberdayasaingan
5.	-	Pendidikan	Kemenangan
6.	-	Keamanan	Keberlanjutan
7.	-	Kenyamanan	-
8.	-	Ketertiban	-

Sumber : Nugroho (2022:65)

Pendapat Nugroho tersebut diatas terlepas dari kebutuhan masyarakat dalam urusan pembangunan dengan pemahaman bahwa urusan pembangunan terangkum dalam pelayanan publik dalam bentuk pengadaan sesuatu dari belum ada menjadi ada dan pembangunan disini dimaknai pembangunan fisik dan tidak perlu selamanya. Pembangunan non fisik atau pembangunan manusia dan kelembagaan manusia adalah bentuk dari pelayanan publik. Dengan demikian untuk dapat memenuhi kebutuhan rakyat tersebut apa yang dilakukan pemerintah harus relevan. Artinya

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Bagaimana mekanismenya, hanya dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu dengan a) kebijakan publik dan b) pelayanan publik.

Berbeda dengan penjelasan diatas, pendapat lain disampaikan oleh Ndraha (2003) yang melihat pemerintahan dari sisi pola hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah. “Yang Diperintah” diposisikan sebagai pelanggan dan pelanggan adalah pembayar atau pembeli. Warga negara atau *people* disebut pembayar dengan pengertian pembayar pajak atau pembayar harga layanan yang diterima oleh yang bersangkutan. Pelanggan yang berarti pembayar (uang) belum tentu *consumer* dalam arti pengguna atau pemakan. “Yang Diperintah” sebagai *consumer* mengandung makna konsumen hasil produk-produk pemerintahan yang oleh karenanya hak *consumer* untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari produser, pemasar, atau penjual.

Dalam istilah lainnya pelayan (*servant*) adalah pihak yang memberikan layanan atas kebutuhan pelanggan (*customer*). Dimana yang dimaksud pelayan (*servant*) didalam organisasi pemerintahan berarti pemerintah itu sendiri, sedangkan pelanggan (*customer*) tidak lain adalah masyarakat atas keberadaannya sebagai warga negara. Dengan demikian bisa saja dimaknai bahwa pemerintahan merupakan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan hak-hak dasar dan pemberian yang berwujud jasa dan layanan.

Konsep pelayanan publik seringkali dikaitkan dengan publik atau umum, dikarenakan istilah publik

bertalian dengan berbagai kebutuhan akan barang dan jasa yang digunakan masyarakat. Sebagaimana pendapat Ibrahim Lubis dalam Solihah bahwa ada istilah yang mempunyai pertalian dengan kepentingan umum, yaitu :

a. *Public use.*

Suatu bentuk pemanfaatan fasilitas bagi kebutuhan dan kenyamanan masyarakat luas, yang hak itu tidak boleh dihilangkan selama publik sebagai penggunaanya masih ada.

b. *Public welfare.*

Suatu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan umum oleh kewenangan pemerintahan yang di dalamnya terdapat kebutuhan pokok yang sifatnya sosial.

Selanjutnya Ndraha menggambarkan unsur perbandingan antara pelayanan publik dan pelayanan sipil sebagaimana tabel 5.2 dibawah ini :

Tabel 5.2
Perbandingan Pelayanan Publik dan Pelayanan Sipil

UNSUR PERBANDINGAN	PELAYANAN PUBLIK (JASA PUBLIK)	PELAYANAN SIPIL (LAYANAN-CIVIL)
Dasar	Pasal 33 (2) UUD 1945, Pilihan masyarakat yang bersangkutan.	<i>Human rights, civil rights, constitutional rights.</i>
Status	Kewenangan pemerintah	Kewajiban pemerintah
Sifat	✓ Monopoli pemerintah, tetapi ✓ Dapat diprivatisasikan ✓ Tarif serendah-rendahnya, ✓ Tidak mencari laba (nonprofit) ✓ Sasarannya masyarakat ✓ Konsumer menyesuaikan diri ✓ Dengan kondisi provider ✓ Bisa dipindahtangankan ✓ Mudah didapat pada saat diperlukan ✓ Mutu setinggi mungkin	✓ Tidak dapat diprivatisasikan ✓ Monopoli pemerintah ✓ Tidak dijualbelikan ("no price"). ✓ Pertimbangan kemanusiaan ✓ Sasarannya setiap individu manusia, lepas dari kewarganegaraannya ✓ Provider menyesuaikan diri ✓ dengan kondisi Konsumer ✓ Tidak bisa dipindahtangankan ✓ Harus siap pada saat diperlukan ✓ Seefektif mungkin
Provider	✓ Badan-badan publik ✓ Bersumber pada pemakaian public goods oleh konsume	✓ Hanya pemerintah ✓ Bersumber pada action dan acting sang aktor

Sumber : Ndraha (2003)

Mendasar pada konstitusi negara yang tercantum dalam UUD 1945 layanan sipil (*civil service*) dapat dilihat dengan jelas jenis dan dasarnya disetiap pasal seperti tabel 5.3 berikut :

Tabel 5.3
Pelayanan Sipil (Civil Service)

NO	LAYANAN CIVIL	UUD 1945
1.	Semua nilai yang terdapat dalam	Pembukaan
2.	pembukaan Hak sebagai sovereign	Pasal 1 ayat 2
3.	Kebebasan memilih	Pasal 1 ayat 2
4.	Hak berotonomi	Pasal 18
5.	Keadilan	Pasal 27 ayat 1
6.	Kebersamaan	Pasal 27 ayat 1
7.	Kepastian hukum	Pasal 27 ayat 1
8.	Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan	Pasal 27 ayat 2
9.	Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat	Pasal 28
10.	Kemerdekaan memeluk agama	Pasal 29 ayat 2
11.	Hak mendapat pengajaran	Pasal 31 ayat 1
12.	Pemajuan kebudayaan	Pasal 32
13.	Hak akan kemakmuran	Pasal 33 ayat 3
14.	Pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar	Pasal 34

Sumber : Ndraha (2003:46-47)

Dari uraian diatas dapat kita garis bawahi bahwa tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat berdasarkan undang-undang pada saat yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan semua hak-haknya dijamin oleh undang-undang. Pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan harus memperhitungkan bagaimana kebijakan itu dapat memberikan harapan bagi masyarakat karena dalam formulasinya memahami kebutuhan masyarakat. Bukan kebijakan yang dibuat atas dasar target-target politik tertentu yang hanya

menguntungkan para elit, tapi benar-benar kebijakan publik yang memihak dan melayani masyarakat.

B. URUSAN PEMERINTAHAN

Presiden Republik
Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan
sesuai dengan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun

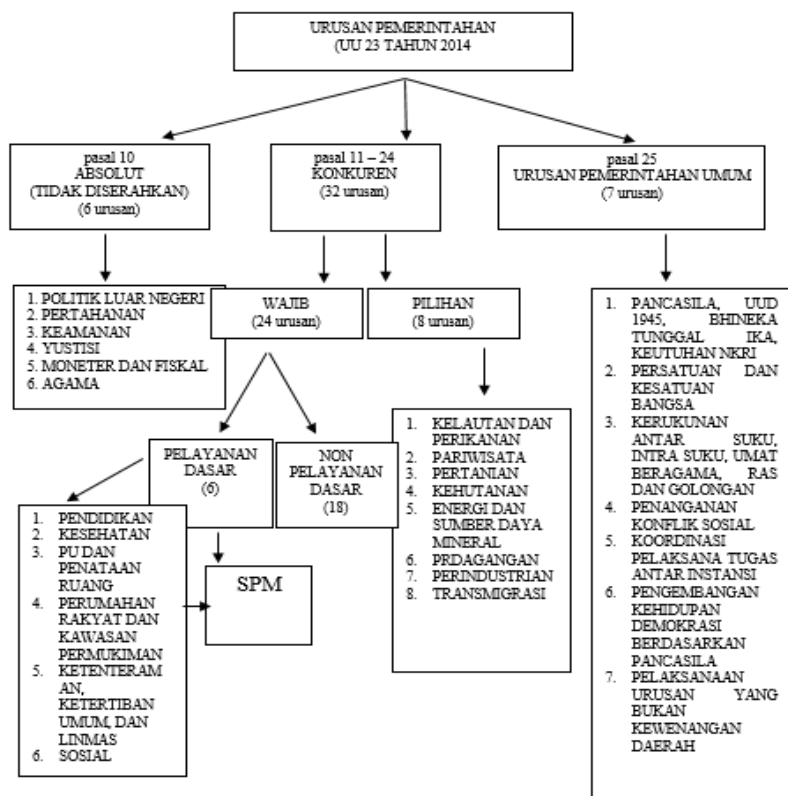


1945. Demikian tentang kekuasaan pemerintahan yang dituangkan dalam Bab III pasal 5 (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kekuasaan pemerintahan dimaksud diuraikan dalam urusan-urusan pemerintahan. Jadi yang dimaksud dengan urusan pemerintahan dalam pengertian legalistik adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama). Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan

daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, terbagi dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dimana urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial), dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah), sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Dan klasifikasi yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk lebih mudah memahami klasifikasi urusan pemerintahan tersebut dapat dilihat dalam gambar 5.1 dibawah ini :



Gambar 5.1
Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Dalam menjalankan semua urusan pemerintahan tersebut, pemerintah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yaitu : a) fungsi pelayanan yang membuahkan keadilan, b) fungsi pembangunan yang membuahkan kesejahteraan, c) fungsi pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, dan d) fungsi pengaturan yang membuahkan ketertiban, serta e) fungsi perlindungan yang membuahkan keamanan..

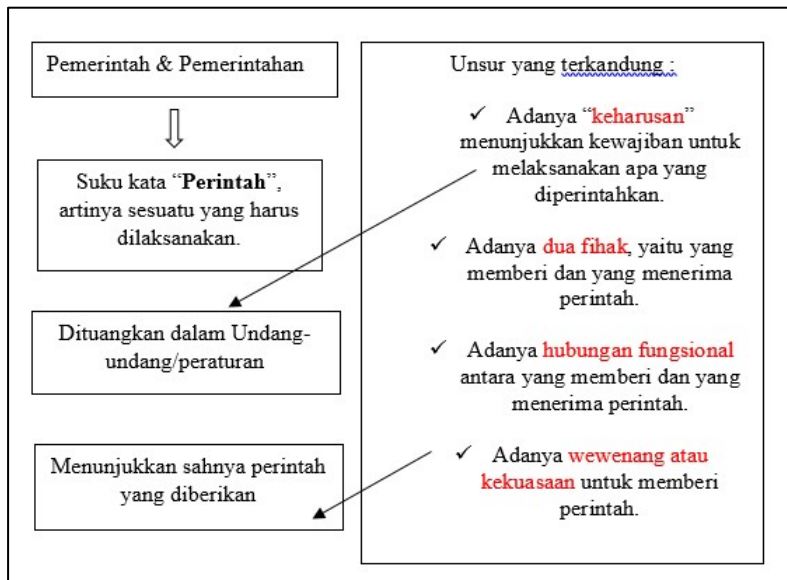
C. POLITIK PEMERINTAHAN



Pengertian pemerintah dan pemerintahan menurut Surianingrat (1992:9) dapat dipahami dengan pendekatan bahasa.

Disampaikan bahwa pemerintah atau pemerintahan dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata *government* yang berasal dari suku kata *to govern*. Akan tetapi perintah disalin dengan kata *to order* atau *to command* dengan kata lain *to command* tidak diturunkan dari kata *to govern*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia untuk memahami pemerintah dan pemerintahan dengan pendekatan bahasa terdapat 4 (empat) unsur yang terkandung dalam kata pemerintahan dan pemerintahan tersebut. Suku kata dari kedua kata tersebut adalah perintah yang didalam kata perintah itu mengandung unsur adanya keharusan, adanya dua pihak, adanya hubungan fungsional, dan adanya wewenang atau kekuasaan.

Dan untuk memudahkan pemahaman uraian Suriadiningrat diatas dimaksud dapat diperhatikan gambar 5.2 dibawah ini :



Gambar 5.2
Pengertian pemerintah dan pemerintahan

Sumber : Diolah penulis dari pendapat Surianingrat
(1992:9)

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur yang terkandung dalam unsur kata perintah tersebut maka menurut Surianingrat pemerintah didefinisikan sebagai sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Pemerintah yang tugasnya sangat luas, rumit, tidak mengenal waktu dan tempat dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut digambarkan oleh Lemaire dalam Surianingrat (1992:27) yang menyamakan antara

sebutan negara (staaat) dengan pemerintah, dan penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa apabila dikaitkan dengan pelaksanaan undang-undang, tidak terikat dengan undang-undang, dan tidak bisa diatur.

Para ahli pikir yang membahas tentang pemerintah dan pemerintahan diantaranya adalah Plato (429-347 S.M.) yang menulis buku berjudul *Politeia* yang diturunkan dari kata polis yang berarti kota. Karena bahasan buku tersebut berkaitan dengan pemerintah kota maka *politeia* disalin dengan pemerintahan kota. Kemudian Aristoteles (384-322 S.M.) menulis buku *Politica* yang mengandung arti polis yang membahas tentang ke-polisan. *Politeia* menurut Aristoteles dalam Surianingrat (1999:15) diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang terdiri dari sejumlah orang yang sebagian berasal dari rakyat yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik yang tidak mementingkan pribadinya melainkan mengabdikan kepada masyarakat dan mengurus kepentingan umum.

Lebih lanjut disampaikan Surianingrat bahwa kata polis dalam perkembangannya berubah bentuk menjadi *politic*, *police*, *politik*, *politicus*, *polisi*, *polizei* dan sebagainya, dan semua kata-kata tersebut mengandung segi pemerintahan. Misalnya perumusan istilah “party politik” sebagai sekelompok warga negara yang mempunyai kepentingan yang sama dan berusaha memperoleh kekuasaan untuk dapat memerintah negara menurut fahamnya. Kranenburg memberi batasan terhadap istilah politik sebagai seni untuk memerintah *polis*, yaitu kota. Kalimat ini menunjukkan bahwa arti *polis* adalah kota.

Pertanyaan yang mungkin muncul adalah siapa selanjutnya yang berhak menjadi pemerintah atau yang berhak memerintah ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak salah apabila kita kembali pada definisi pemerintah yang sudah disinggung diatas, yaitu mereka yang memiliki kewenangan dan mampu melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Kewenangan inilah yang menjadi ciri khas dari kekuasaan.

Bagaimana kewenangan itu didapatkan ? Studi politik pemerintahan merujuk pada pendapat Ndraha (2011:489) yang mendefinisikan politik pemerintahan adalah proses pembentukan kekuasaan (*authority*) pemerintahan melalui interaksi dan kompromi dengan lingkungan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada konsumen tidak dengan menggunakan kekuasaan itu sendiri, tetapi melalui proses dan siklus pemerintahan.

Konsep pemikiran Ndraha tentang politik pemerintahan tersebut didasari pada anggapan bahwa disamping menjalankan fungsi politik, negara juga menjalankan fungsi manajemen. Ia juga memegang fungsi-fungsi produksi, operasi dan *acting*, pemasaran dan distribusi dalam rangka mengakui, memenuhi dan melindungi kebutuhan serta tuntutan *sovereign* dan konsumen akan jasa publik dan layanan *civil*. Fungsi-fungsi tersebutlah yang kemudian dikenal sebagai fungsi pemerintahan.

Adapun ruang lingkup politik pemerintahan disebutkan oleh Nrdaha (2011:489) berkisar pada :

- a. Konstruksi konsep politik pemerintahan
- b. Pembentukan kekuasaan pemerintahan
- c. Penggunaan kekuasaan pemerintahan
- d. Pertanggungjawaban penggunaan kekuasaan pemerintahan
- e. Dinamika kekuasaan pemerintahan

Pemikiran tentang pemerintahan membawa ilmu pemerintahan ke konsep tentang pemerintah dan yang diperintah. Dan hubungan antara keduanya disebut hubungan pemerintahan. “Yang diperintah” maksudnya adalah konsumen produk-produk pemerintahan, penanggung dampak negatif pembangunan, pembayar resiko mismanajemen negara, pemikul biaya sosial kegiatan para politisi, kambing hitam kegagalan para penguasa, korban upacara ritual kemenangan elit dalam mempertahankan kepentingannya, dan pembayar biaya penyelenggaraan negara serta gaji pemerintah.

Kekuasaan pemerintahan menurut Budiardjo (2010:296) jauh lebih luas daripada sekedar melaksanakan undang-undang. Kekuasaan pemerintahan dimaksud antara lain mencakup :

- a) Administratif
Merupakan kekuasaan dalam menjalankan undang-undang, peraturan-perundang-undangan lainnya serta penyelenggaraan administrasi negara.
- b) Legislatif
Merupakan kekuasaan membuat rancangan perundang-undangan dan menyampaikannya ke

Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas sampai menjadi undang-undang.

c) Keamanan

Merupakan kekuasaan guna mengatur kepolisian, angkatan bersenjata, penyelenggaraan perang, pertahanan dan keamanan dalam negeri.

d) Yudikatif

Merupakan kekuasaan pemberian grasi, amnesti dan lainnya.

e) Diplomatik

Merupakan kekuasaan penyelenggaraan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang ada.

Disamping pembentukan kekuasaan pemerintahan, pokok bahasan yang berkaitan dengan politik pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan pemerintahan dan pertanggungjawaban penggunaan kekuasaan pemerintahan. Pembentukan kekuasaan pemerintahan telah disinggung sebelumnya bahwa diawali dengan proses politik, diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Sedangkan penggunaan kekuasaan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum dijalankan dalam bentuk penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, dan pelaksanaannya harus mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik, yaitu a) kepastian hukum b) kemanfaatan c) ketidakberpihakan d) kecermatan e) tidak menyalahgunakan kewenangan f) keterbukaan g) kepentingan umum dan h) pelayanan yang baik. Fungsi-fungsi pemerintahan di Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun tentang

administrasi pemerintahan. Diaturnya penyelenggaraan pemerintahan dalam undang-undang ini dengan tujuan untuk menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara.

Pertanggungjawaban penggunaan kekuasaan pemerintahan juga telah disinggung dalam pendapat Ndraha pada pokok bahasan sebelumnya. Diuraikan bahwa pertanggungjawaban pemerintahan ini penting dan harus dilakukan karena sebelum memangku jabatannya mereka mengangkat sumpah. Namun demikian sumpah jabatan yang diucapkan sebelum memangku jabatannya tersebut terkesan hanya sekedar seremonial karena kalimatnya abstrak dan memang sulit untuk diwujudkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan saat ini.

RINGKASAN :

- 1) Mekanisme dalam memenuhi kebutuhan rakyat dilakukan oleh pemerintah melalui dua hal, yaitu dengan a) kebijakan publik dan b) pelayanan publik.
Kebijakan publik harus relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat.
- 2) Masyarakat sebagai yang diperintah berposisi sebagai customer produk-produk pemerintahan yang oleh karenanya hak *consumer* untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari produser, pemasar, atau penjual dilindungi undang-undang.

- 3) Kekuasaan pemerintahan mencakup urusan-urusan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam menjalankan semua urusan pemerintahan tersebut, pemerintah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pengaturan dan fungsi perlindungan.
- 4) Terdapat 4 (empat) unsur yang terkandung dalam kata pemerintahan dan pemerintahan yaitu adanya keharusan, adanya dua pihak, adanya hubungan fungsional, dan adanya wewenang atau kekuasaan.
- 5) Pemerintah dapat didefinisikan mereka yang memiliki kewenangan dan mampu melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.
- 6) Konsep politik pemerintahan didasarkan pada anggapan bahwa disamping menjalankan fungsi politik, negara juga menjalankan fungsi manajemen. Fungsi-fungsi tersebutlah yang kemudian dikenal sebagai fungsi pemerintahan.
- 7) Ruang lingkup dari politik pemerintahan meliputi pembentukan kekuasaan pemerintahan, penggunaan kekuasaan pemerintahan dan pertanggungjawaban penggunaan kekuasaan pemerintahan.
- 8) Kekuasaan pemerintahan menurut Budiardjo jauh lebih luas daripada sekedar melaksanakan undang-undang, antara lain mencakup : Administratif, Legislatif, Keamanan, Yudikatif, Diplomatik

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN POLITIK

A. PENDAHULUAN



Fungsi pemberdayaan (*empowerment*) dalam demokrasi terlebih di era digital ini perkembangannya sangat luar biasa dalam arti yang pada jaman dulu pemerintah sebagai penyelenggara tunggal pemerintahan, saat ini tidak bisa memandang masyarakat hanya sekedar sebagai obyek pemerintahan. Masyarakat harus diberdayakan untuk mengambil bagian dari penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan bahkan pada tahap evaluasi melalui ruang dan prosedur yang telah ditetapkan. Disisi lainnya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan pemerintah dengan cara memberikan akses kepada mereka tanpa kecuali sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, agar bisa berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan, serta untuk meningkatkan kapasitas diri. Pemerintah juga bisa melakukan pemberdayaan dibidang ekonomi dengan memberikan dukungan untuk menggerakkan

pekonomian lokal, usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan dalam ruang lingkup politik juga sudah terlihat bagaimana transparansi penyelenggaraan pemilu. Masyarakat bisa melakukan kontrol sosial terhadap setiap tahapan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Secara aktif diadakannya sosialisasi, *workshop*, seminar-seminar, dan *Forum Group Discussion (FGD)* untuk mendengar dan meminta masukan dari para aktivis dan para ahli yang peduli dengan proses politik. Tujuan dari pemberdayaan dibidang politik adalah untuk mencari alternatif-alternatif baru dalam proses politik agar lebih transparan dan untuk menghindari kekuasaan mutlak atau absolut.

Munculnya konsep *collaborative government* dikarenakan beberapa hal antara lain *pertama* keterbatasan pemerintah, *kedua* munculnya masalah yang semakin pelik yang tidak bisa diatasi dengan tanpa melibatkan pihak lain, dan yang *ketiga* karena tuntutan demokratisasi. Dengan demikian paradigma penyelenggaraan pemerintahan sudah bergeser yang sebelumnya pemerintah sebagai aktor tunggal, sekarang tidak bisa lagi. Masyarakat semakin cerdas dan kritis dalam menilai kinerja pemerintah dan tidak segan-segan melakukan koreksi apabila ada kebijakan-kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.

Dalam konteks pembangunanpun menunjukkan bahwa kegagalan pembangunan selama ini terjadi karena diabaikannya aspek atau unsur-unsur sosial.

Dengan kenyataan tersebut dalam sistem perencanaan pembangunan akhirnya dilakukan pendekatan pembangunan yang meliputi pendekatan a) politik, b) teknokratik, c) partisipatif, d) atas-bawah, (*top-down*), dan e) bawah-atas (*bottom-up*).

a) Pendekatan politik :

Pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan dimaksudkan bahwa rencana pembangunan dianggap sebagai penjabaran dari visi dan misi presiden atau kepala daerah untuk memenuhi janji-janji yang disampaikan dalam kampanye, yang karenanya rakyat memilih mereka.

b) Pendekatan teknokratik :

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan teknokratik adalah perencanaan pembangunan dimana dalam perencanaan tersebut harus berdasarkan pada kerangka berpikir yang ilmiah.

c) Pendekatan partisipatif :

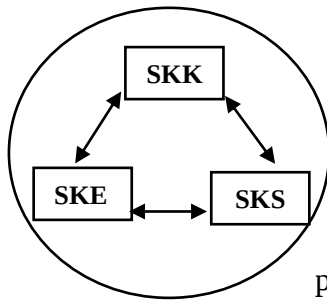
Pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif artinya perencanaan pembangunan tersebut harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan atas pembangunan yang dikehendaki karena mereka yang terlibat itulah pengambil manfaat yang sesungguhnya. Dengan melibatkan pihak-pihak yang notabene adalah masyarakat sebagai unsur sosial, dimaksudkan agar merasa ikut memiliki dan ikut bertanggungjawab untuk memelihara hasil pembangunan tersebut.

d) Pendekatan atas-bawah (*top-down*) :

Pendekatan atas bawah (*top-down*) berkaitan dengan struktur pemerintahan untuk menyelaraskan program agar seimbang dan tidak tumpang tindih.

e) Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) sama dengan pendekatan atas-bawah (*top-down*), yaitu untuk penyalarsan dan harmonisasi, bahwa program yang direncanakan dari bawah termasuk dalam rangkaian program yang berkesinambungan dengan program atas bawah.



Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan (pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, pengaturan

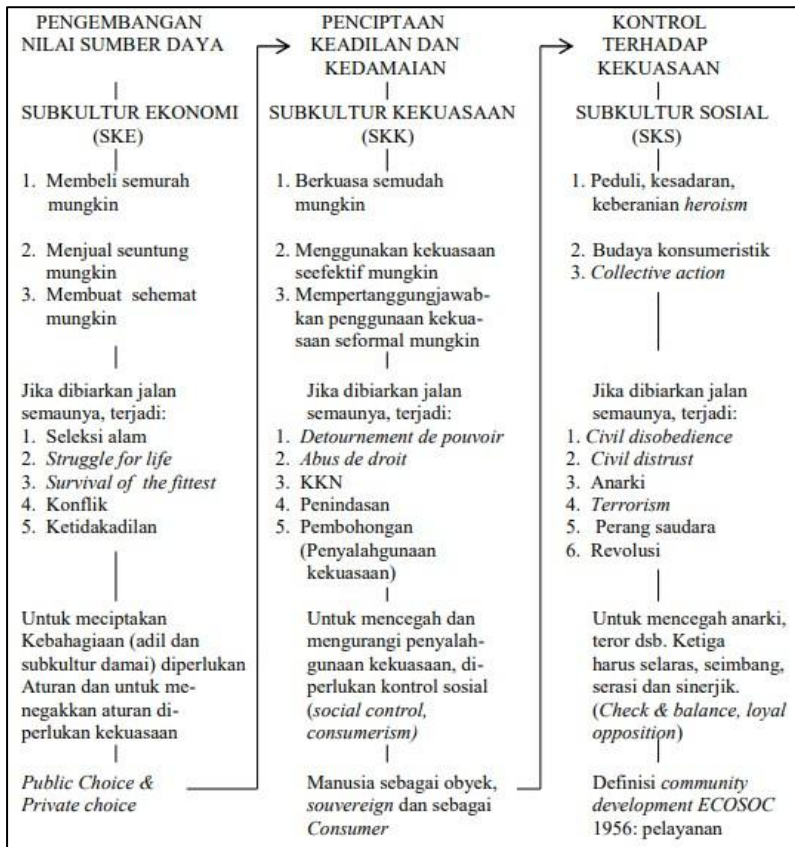
dan perlindungan) tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ndraha (2011) dimana pemerintahan dimaknai dengan adanya interaksi dari tiga subkultur, yaitu Sub Kultur Ekonomi (SKE), Sub Kultur Kekuasaan (SKK) dan Sub Kultur Sosial (SKS). Interaksi itu terjadi sebagai bentuk keterikatan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya untuk saling menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, atau paling tidak dapat dijadikan kendali karena setiap subkultur mempunyai kecenderungan-kecenderungan negatif yang tidak bisa dielakkan.

Suatu misal Subkultur Ekonomi (SKE), kecenderungannya alalah bagaimana membeli semurah mungkin dan menjual seuntung mungkin. Apabila tidak ada aturan main yang dibuat oleh subkultur kekuasaan maka yang memiliki modal besar akan bertindak semaunya terhadap mereka yang bermodal kecil yang mengakibatkan yang kuat memakan yang lemah dan

muncullah ketidakadilan. Demikian halnya dengan Subkultur Kekuasaan (SKK), yang dengan kekuasaannya ada kecenderungan sewenang-wenang, melakukan korupsi, pembohongan publik dan sebagainya yang akhirnya merugikan masyarakat. Oleh karenanya perlu kontrol sosial yang tidak lain adalah Subkultur Sosial (SKS) atau masyarakat yang sadar dan peduli serta memiliki keberanian. Disisi lainnya masyarakat sendiri juga tidak bisa dibiarkan begitu saja karena ada kecenderungan budaya konsumeristik atau kegiatan *collective action* yang mengarah ke hal-hal yang negatif seperti anarkhi, perang saudara dan sebagainya.

Gambaran yang disampaikan Ndraha tersebut juga menunjukkan bagaimana sebenarnya organisasi privat, organisasi publik, dan organisasi sosial berinteraksi dalam konteks internal dan eksternal, yang saling tergantung. Sehingga tidak salah apabila salah satu pengertian pemerintahan dirumuskan oleh Ndraha sebagai interaksi antara tiga subkultur yaitu Subkultur Ekonomi (SKE), Subkultur Kekuasaan (SKK) dan Subkultur Sosial (SKS) karena pada tataran empirik ketiga subkultur tersebut memang menjadi satu dalam menjaga keseimbangan.

Untuk lebih jelasnya interaksi ketiga Subkultur tersebut dapat dilihat dilihat dalam gambar 6.1 berikut.



Gambar 6.1
Interaksi antara SKE, SKK, dan SKS

Sumber : Ndraha (2003:6)

Melihat kondisi lingkungan tersebut akhirnya semakin menunjukkan bahwa tidak ada kewenangan yang sifatnya utuh dan mutlak dimiliki sendiri. Termasuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah yang tetap berdampingan bahkan beririsan dengan kewenangan lainnya bahkan dalam internal pemerintahan itu sendiri. Oleh karenanya pemerintah

terus menerus berusaha melakukan perubahan-perubahan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan, semakin murah, cepat, dan bisa diakses secara luas, bahkan sampai memberikan ruang agar masyarakat bisa melayani diri sendiri dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pelayanan kependudukan. Masyarakat secara mandiri bisa mencetak kartu keluarganya sendiri apabila diperlukan karena adanya perubahan identitas. Disamping itu tentunya masih banyak inovasi-inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat diberbagai sektor agar semakin mandiri.

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hakekat dari strategi pemberdayaan disampaikan oleh Suyono dalam Anwas (2014:89) merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Strategi bersifat beragam menyesuaikan dengan potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat. Strategi sering juga diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan agar tercapainya suatu tujuan. Adapun

strategi pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebiato (2019:167) yaitu:

a. Strategi sebagai suatu rencana

Sebagai suatu rencana, strategi merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan, demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dalam hubungan ini, rumusan strategi senantiasa memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dilakukan oleh (para) pesaingnya.

b. Strategi sebagai kegiatan

Sebagai suatu kegiatan, strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau perusahaan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan.

c. Strategi sebagai suatu instrumen

Strategi sebagai suatu instrument Sebagai suatu instrumen, strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pimpinan organisasi/perusahaan, terutama manajer puncak, sebagai pedoman sekaligus alat pengendali pelaksanaan kegiatan.

d. Strategi sebagai sistem

Sebagai suatu sistem, strategi merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan-tindakan yang komprehensif dan terpadu, yang diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

e. Strategi sebagai pola pikir

Sebagai pola pikir, strategi merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh wawasan yang luas tentang keadaan internal maupun eksternal untuk rentang waktu yang tidak pendek, serta kemampuan pengambilan keputusan untuk memilih alternatif-alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, yang dibarengi dengan upaya-upaya untuk “menutup” kelemahan-kelemahan guna mengantisipasi atau meminimumkan ancaman-ancamannya.

Hal pertama yang penting untuk menjadi perhatian sebelum melangsungkan program pemberdayaan masyarakat adalah mengenali masalah dan potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Jika tujuan pemberdayaan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka persiapan strategi yang matang menjadi bagian terpenting.

Pemberdayaan sebagai konsep merupakan refleksi dan reaksi terhadap kesadaran pola pikir dalam tananan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsep pemberdayaan (*empowerment*) muncul bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Kemudian lahir gelombang pemikiran neo-marxisme, freudianisme, termasuk didalamnya aliran-aliran strukturalisme. (Riyani, 2019:99)

Pendapat Chambers diperkaya oleh Kabeer yang menyatakan bahwa ketidakberdayaan bukan menunjuk

pada ketidakberdayaan kekuatan sama sekali. Dalam realitas, mereka yang tampaknya hanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahan dan bahkan mampu untuk menggulingkan. Oleh karenanya kekuatan itu ada, hanya saja perlu untuk di tampilkan dan dikembangkan. Menurut pandangan ini, kekuasaan dapat dibedakan dalam dua dimensi :

- a. Dimensi *distributif* kekuasaan, yaitu sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain.
- b. Dimensi *generative* kekuasaan, yang merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masa depan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri.

Dengan mengacu pada kekuasaan *generative* maka dapatlah diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginal kekuatan untuk mendorong proses perubahan sosial yang menungkinkan mereka untuk memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka pada tingkat lokal maupun nasional. (<http://file.upi.edu/Direktori>).

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan politik dapat diwujudkan apabila ada dukungan struktur politik dan kultur politik agar menjadi agen-agen pembangunan yang mandiri. Mereka bisa diberdayakan dengan meningkatkan pengetahuannya tentang pentingnya partisipasi politik mengingat keputusan politik diambil melalui aktivitas politik yang sejatinya adalah aktivitas warga negara yang secara bersama-

sama dan serentak untuk mempengaruhi kebijakan politik sebagaimana dalam pemilihan umum.

Menurut Riyani (2019:111) terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang. *Pertama*, lingkungan sosial tak langsung, misalnya media masa, budaya, sistem ekonomi, dan sistem politik. *Kedua*, lingkungan sosial politik yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian individu, seperti agama, keluarga, lingkungan sekolah, dan kelompok pergaulan (peer groups). *Ketiga*, Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. *Keempat*, faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi dan keadaan yang mempengaruhi individu atau kelompok secara langsung ketika melakukan suatu kegiatan, misalnya suasana kelompok dengan berbagai macam tantangannya.

Jadi faktor lingkungan dapat mempengaruhi lingkungan sosial politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berkaitan dengan situasi dan kondisi dan yang tidak langsung dengan cara internalisasi, politisasi, dan sosialisasi. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat bisa dikondisikan dengan menciptakan lingkungan masyarakat yang partisipatif melalui pelibatan mereka dalam setiap kegiatan pemerintahan agar mereka merasa menjadi bagian dari penentu kebijakan. Apabila pelibatan kegiatan dengan lingkungan ini secara terus menerus dilakukan maka akan merubah perilaku masyarakat.

Sebagaimana hasil penelitian Rush dan Althof (1990:74) yang menyatakan bahwa sejauh menyangkut sosialisasi politik selama masa kanak-kanak dan masa

remaja, dapat dinyatakan dengan keyakinan mengenai apa yang telah dipelajari dan kapan hal itu dipelajari, namun dengan kurang keyakinan dapat dinyatakan mengenai bagaimana hal tersebut dipelajarinya. Perolehan orientasi politik dan pola-pola tingkah laku itu tampaknya jauh lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman daripada indroktinasi atau belajar secara khusus.

David Easton dalam Riyani (2019:112) menyebutkan bahwa tingkat Partisipasi politik dipengaruhi oleh orientasi psykologis terhadap obyek sosial yaitu dalam bentuk orientasi : Kognitif, afektif, dan evaluatif. Orientasi yang bersifat kognitif menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, sementara orientasi yang bersifat afektif menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi yang bersifat evaluatif menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peran individu didalamnya.

C. PENDIDIKAN POLITIK



Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian bunyi salah satu point

konsideran yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Kemudian berkaitan dengan pendidikan politik tersebut, peran partai politik sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 ayat (3a) dan (3b) adalah menyelenggarakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat dengan penekanan kegiatan pada :

- a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik.
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 31 berkaitan dengan tujuan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Mencermati apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut harusnya menyadarkan para pelaku, kader, dan partisipan partai politik khususnya serta masyarakat pada umumnya bahwa partai politik secara konstitusional memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, serta mewujudkan tujuan bangsa sebagaimana yang telah diamanahkan dalam alinea ke IV pembukaan UUD 1945. Begitu besarnya tanggungjawab partai politik tersebut, seharusnya pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pendidikan politik ditengah-tengah masyarakat yang dinamis dan majemuk ini dapat membentuk kaderisasi kepemimpinan yang kuat dan professional, pembangunan demokrasi dapat terwujud, dan semakin menguatkan kecintaan para kader-kader partai politik terhadap bangsa dan negara, yang dapat menepis pandangan-pandangan skeptis dimana setiap aktif berpartai politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan semata.

Definisi legalistik tentang pendidikan politik sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tersebut diatas menjadi pedoman bagi partai politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengertian pendidikan politik, berikut diuraikan beberapa pendapat menurut para ahli (www.pelajaran.co.id/pendidikan-politik) diantara pendapat tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

- a. Rusadi Kartaprawira (1988:54) :

Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi dari struktur politik yang bertujuan meningkatkan pengetahuan politik masyarakat sehingga bisa ikut serta atau berpartisipasi didalam sistem politik secara nasional.

b. Alfian (1992:235) :

Pendidikan politik merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sadar sebagai proses sosialisasi kepada masyarakat agar memahami dan menghayati nilai-nilai dalam sebuah sistem politik yang akan dibangun.

c. Affandi (1996:3) :

Pendidikan politik selalu ada kaitannya dengan internalisasi nilai sebagai proses bagi setiap individu dalam mempelajari budaya sebagai unsur penting yang tidak lain adalah konsep dirinya.

d. Djahir (1996) :

Pendidikan politik merupakan bentuk pembinaan dan bimbingan bagi warga negara agar memahami, mencintai dan merasa mempunyai keterkaitan diri terhadap bangsa dan negara serta dengan seluruh sistem kelembagaan yang ada.

e. Michael Rush dan Philip Althoff (2001:22) :

Pendidikan politik diartikan sebagai proses mempengaruhi terhadap individu untuk memahami suatu sistem politik yang selanjutnya dapat menentukan sifat dan persepsi tentang politik termasuk reaksinya atas gejala politik.

f. Kartono (2009) :

Pendidikan politik atau *political forming* adalah intensi guna membentuk individu politik yang menyadari akan status politik dan kedudukan politiknya didalam masyarakat.

Suatu kajian yang berjudul “Optimalisasi peran kepemimpinan nasional guna membangun etika politik masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional”. (lib.lemhannas.go.id), memahami pendidikan politik dengan melihat dan mencermati perkembangan lingkungan strategis yang mengakibatkan adanya pergeseran tingkat partisipasi dan kesadaran politik, capaian dari pendidikan politik tersebut diharapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat.
Kesadaran politik tidak lain adalah kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hal politik. Oleh karena itu hal yang paling mendasar dalam kehidupan politik adalah yang berkaitan dengan tingkatan keyakinan, pemahaman, dan keikhlasan setiap individu sebagai warga negara dalam menjalankan semua kewajiban dan hak politiknya dengan benar dan bertanggung jawab, serta dapat mendorong dan memberi warna terhadap sikap dan perilaku politik yang beretika. Selanjutnya pendidikan politik yang dilakukan partai politik kepada para kader dan masyarakat diharapkan dapat pula menciptakan kesadaran dan budaya politik demokratis dalam masyarakat. Apabila kondisi kondisi yang demikian itu sudah tertanam pada masyarakat dengan sendirinya

partisipasi politik masyarakat akan tumbuh dan meluas, terlebih lagi secara demokratis masyarakat dapat menilai partai politik mana yang dianggap mampu untuk merepresentasikan dirinya, yang secara otomatis partai politik tersebutlah yang menjadi pilihannya. Sejalan dengan hal tersebut tentu saja partai politik akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar sebagai bagian dari penyambung aspirasi masyarakat secara luas, atau paling tidak menjaga konstituennya agar tetap terjaga kepercayaanya terhadap partai yang diyakini dapat mewujudkan semua harapannya.

- b. Kepribadian atau karakter politik masyarakat sesuai dengan jiwa demokrasi. Kepribadian atau karakter politik dapat dipahami sebagai suatu respon politik yang dapat melahirkan komitmen, loyalitas, dan motivasi, politik. Pendidikan politik tentang kepribadian atau karakter bangsa Indonesia dapat diindikasikan antara lain adalah :

- ❖ Masyarakat dengan penuh kesadaran menghormati dan mentaati hukum, memiliki loyalitas dan disiplin yang tinggi, serta menghargai hak-hak azasi. Dengan seperti itu semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat akan selalu berpedoman pada aturan dan koridor hukum yang berlaku.
- ❖ Masyarakat dengan pandangan jauh kedepan, dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, serta memiliki tekad berjuang untuk mencapai taraf kehidupan bangsa yang lebih tinggi, berkeadilan, berkesejahteraan, yang didasarkan

pada obyektifitas kemampuan dan kekuatan bersama.

- ❖ Masyarakat aktif dan kreatif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kegiatan baik dalam kegiatan politik maupun pembangunan nasional, yang akhirnya menyibukkan diri bagaimana memajukan negeri ini secara bersama-sama.

c. Partisipasi politik masyarakat meningkat.

Dengan pendidikan politik akan mampu meningkatkan partisipasi politik. Diantara bentuk dari peningkatan partisipasi politik masyarakat adalah adanya keterlibatan dalam pembuatan kebijakan publik dan adanya kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap para penyelenggara negara serta atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Masyarakatpun terlihat aktif dalam kegiatan-kegiatan politik dengan menggunakan hak pilih dan memilihnya, serta aktif dalam proses pembangunan yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, bahkan pada tahap evaluasinya.

Tindakan yang diharapkan sejalan dengan kajian diatas disampaikan oleh Kartono (2009), bahwa pendidikan politik diharapkan dapat menjadikan individu atau masyarakat :

- a. Menyadari akan tanggung jawab dan kewajibannya, hak-haknya secara etik dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selalu

menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi tauladan yang baik.

- b. Menyadari dan menaati semua peraturan, Undang-Undang Dasar tahun 1945, memiliki disiplin pribadi, sosial kemasyarakatan, dan jiwa nasionalisme yang kokoh.
- c. Mempunyai pandangan yang jauh ke depan dan memiliki tekad perjuangan untuk mencapai taraf kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih tinggi, berkeadilan dan berkesejahteraan, yang didasarkan pada kemampuan obyektif dan kekuatan kolektif sebagai bangsa mandiri.
- d. Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam proses pembangunan dan proses politik.
- e. Selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa secara terus menerus diikuti dengan kesadaran penuh bahwa bangsa ini memiliki banyak keanekaragaman, serta selalu memberikan dukungan dengan sistem atau pola kehidupan nasional yang demokratis.
- f. Menyadari perlunya menjaga lingkungan hidup dan alam sekitar untuk menciptakan keseimbangan, agar menjadi tempat kehidupan yang sehat.

Dengan memahami berbagai pengertian atau definisi tersebut diatas maka berkaitan dengan tujuan dari pendidikan politik secara umum adalah untuk membuat individu maupun masyarakat menghayati, memahami serta menjadi mengerti nilai ideal yang terkandung dalam sebuah sistem politik yang berlaku. Dengan demikian pendidikan politik akan membawa masyarakat menjadi warga negara yang baik, cinta

tanah air, yang dengan kesadaran politiknya mengetahui akan hak dan kewajibannya.

Seperti pendapat Sumantri dan Affandi (1996) yang menyatakan bahwa maksud dilaksanakannya pendidikan politik adalah dalam rangka memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia khususnya dan masyarakat pada umumnya meningkat kesadarannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Pendapat lain disampaikan Amril (2004), bahwa pendidikan politik bertujuan atau berfungsi untuk :

- a. Membangun dan mengembangkan tanggung jawab politik, menghidupkan hati nurani politik agar mempunyai etika politik serta menjadikan orang politik yang terpuji dan bukan untuk memupuk dan menumbuhkan egoism.
- b. Melatih para generasi muda khususnya agar semakin dewasa dan menjadi warga negara yang baik dalam menjalankan fungsi sosial dan politik.
- c. Mampu melakukan analisis atas konflik yang terjadi untuk selanjutnya berupaya mencari jalan penyelesaian atau pemecahannya.
- d. Memiliki wawasan yang kritis terkait relasi politik yang ada di lingkungan sekitarnya, dan memiliki juga kesadaran dimana urusan manusia dan struktur sosial dalam suatu masyarakat itu sifatnya tidak permanen, artinya akan terus mengalami perubahan bahkan bisa diubah melalui perjuangan politik.

Bentuk Pendidikan Politik :

Sebagaimana yang ditegaskan dalam undang-undang tentang partai politik bahwa pendidikan politik tidak bisa lepas dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan politik mengubah individu atau masyarakat menjadi cinta terhadap bangsanya atau untuk menciptakan rasa keterikatan dan kepemilikan diri yang tinggi terhadap bangsa Negara.

Menurut Kartaprawira (2004) bentuk penyelenggaraan pendidikan politik yang bisa dilakukan melalui :

- a. Media massa baik media elektronik atau media cetak seperti majalah, surat kabar, siaran radio, youtube, televisi (audio visual media) dan masih banyak lagi.
- b. Lembaga atau perkumpulan masyarakat, juga lembaga pendidikan formal dan pendidikan informal, serta dapat dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Hambatan Pendidikan Politik :

Hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik menurut Kartono (2009) diantaranya sebagai berikut :

- ❖ Kesulitan menyadarkan rakyat akan kondisi diri sendiri yang banyak menerima kesengsaraan dan kemiskinan, akibat hidup dalam penindasan, penghisapan dan penjajahan yang begitu lama, sehingga mereka terbiasa hidup dalam kekurangan

dan ketertinggalan. Mereka sulit didorong ke arah konsientisasi diri menyatakan berbagai masalah yang sedang dialami.

- ❖ Sinisme dan apatisme politik yang lebih menjadi sikap putus asa yang menyebabkan rakyat sulit percaya akan usaha mendidik dan gerakan politik yang dianggap palsu dan hanya menenangkan rakyat saja. Mereka juga sulit diajak berfikir dengan pikiran jernih bahkan takut kemerdekaan atas dirinya.
- ❖ Latar belakang pendidikan yang kurang bahkan rendah membuat rakyat sulit memahami kompleksitas sosial dan politik yang ada disekitarnya.
- ❖ Penguasa yang otoriter lebih tak ingin ada pendidikan politik, sebab mereka sangat berkepentingan pada status quo dan ketahanan rezimnya. Partisipasi aktif dan pengawasan pada jalannya pemerintahan oleh rakyat tersebut tak diinginkan karena mengurangi kebebasan dan kekuasaan pemerintahan.

RINGKASAN :

- 1) Munculnya konsep *collaborative government* dikarenakan beberapa hal antara lain *pertama* keterbatasan pemerintah, *kedua* munculnya masalah yang semakin pelik yang tidak bisa diatasi dengan tanpa melibatkan pihak lain, dan yang *ketiga* karena tuntutan demokratisasi.
- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan politik dapat diwujudkan apabila ada dukungan struktur politik dan kultur politik. Tujuan dari pemberdayaan dibidang

politik adalah untuk mencari alternatif-alternatif baru dalam proses politik agar lebih transparan dan untuk menghindari kekuasaan mutlak atau absolut.

- 3) Strategi pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebianto a) Strategi sebagai suatu rencana, b) Strategi sebagai kegiatan, c) Strategi sebagai suatu instrument, d) Strategi sebagai sistem, e) Strategi sebagai pola pikir.
- 4) Muatan dalam pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat muatannya tidak lepas dari a) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, b) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, c) Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 5) Tujuan pendidikan politik untuk membuat individu maupun masyarakat menghayati, memahami serta menjadi mengerti nilai ideal yang terkandung dalam sebuah sistem politik yang berlaku. Dengan demikian pendidikan politik akan membawa masyarakat menjadi warga negara yang baik, yang dengan kesadaran politiknya mengetahui akan hak dan kewajibannya.
- 6) Hambatan pendidikan politik disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sulitnya menyadarkan masyarakat karena latar belakang hidup yang serba kekurangan, adanya sinisme dan apatisme politik, tingkat pendidikan yang rendah, dan adanya penguasa yang otoriter yang lebih menyukai status quo.

DAFTAR PUSTAKA

Abercrombie, Nicholas. Hill, Stephen. Turner, Bryan S. (2010). ***Kamus Sosiologi***. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Anwas, Oos M. (2014). ***Pemberdayaan masyarakat di Era Global***. Alfabeta, Bandung.

Budiardjo, Miriam. (2007). ***Dasar-Dasar Ilmu Politik***. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Budiardjo, Miriam. (2010). ***Dasar-Dasar Ilmu Politik***. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Dhakiedae, Daniel. (2005). ***Sosiologi Politik***. Raja Grafindo Persada, Jakarta

George Boeree. 2008. ***Personality Theories: Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia***. Yogyakarta: Prismsophie. Hal. 226-229

Hijri S Yana. 2016. Politik Pemekaran Di Indonesia. Malang: UMM Press.

Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poeworko. (2019). ***Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik***. Alfabeta, Bandung.

Nasroen, M. (1986). ***Asal Mula Negara. Aksara Baru***, Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu. (2003). ***Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru Jilid 1)***. Rineka cipta, Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu. (2011). ***Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru Jilid 2)***. Rineka cipta, Jakarta.

Nugroho, Riant. (2022). Tugas Pemerintah (***Konsep, Teori, Praktek***). Elex Media Komputindo, Jakarta.

Oman, Sukmana (2016). ***Konsep dan Teori Gerakan Sosial***. Malang: Intrans Publishing.

Agus, Irianto Maladi (2015). ***Interaksionisme Simbolik: Pendekatan Antropologis Merespon Fenomena Keseharian***. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri. Hlm 7

Ritzer, George. (2018). ***Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda***. Judul asli ***Sociology : A Multiple Paradigm Science***, disadur oleh Alimandan. Rajawali Pers, Depok.

Riyani, Ondo. (2019). ***Pengantar Studi Pembangunan Politik***. Cendekia Press, Bandung.

Roskin, Michael G., Cord, Robert L., Medeiros, James A., Jones, Walter S., (2016). ***Pengantar Ilmu Politik (Political Science : Introduction)***. Kencana, Jakarta.

Rush, Michael dan Althoff, Phillip. (1990). ***Pengantar Sosiologi Politik***. Judul asli ***An Introduction to Political Sociology***. CV Rajawali, Jakarta

Scott, John. (2011). ***Sosiologi The Key Concepts***. Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. (2002). ***Mengenal 7 Tokoh Sosiologi***. Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. Sulistyowati, Budi. (2017). ***Sosiologi Suatu Pengantar***. Rajawali Pers, Jakarta.

Surianingrat, Bayu. (1999). ***Mengenal Ilmu Pemerintahan***. Rineka Cipta, Jakarta

Tafsir, Ahmad (2010). ***Filsafat Ilmu***. Remaja Posdakarya, Bandung.

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang ***Partai Politik***

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang ***Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.***

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ***Pemerintahan Daerah.***

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang ***Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***

Sumber lainnya :

https://id.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner

<https://kbbi.web.id/kekuasaan>, diakses pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 jam 08.45 Wib.

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196111091987031001/MUSTOFA_KAMIL/2.pemberdayaan_masyarakat_sebagai_konsepx.pdf diakses pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 jam 09.05 Wib.

[https://yogyakarta.bawaslu.go.id/publikasi-peran-masyarakat-dalam-pengawasan pemilu dan pemilihan](https://yogyakarta.bawaslu.go.id/publikasi-peran-masyarakat-dalam-pengawasan-pemilu-dan-pemilihan) diakses pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2023 jam 15.15 Wib.

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Konsep_kekuasaan.
Diakses pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2023 jam 16.57 Wib.

<https://www.gramedia.com/best-seller/berpikir-kritis>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 jam 20.57 Wib.

<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000010895/swf/1751/files/basic-html/page15.html>. Diakses pada hari Senin tanggal 12 September 2023 jam. 14.38 Wib.

<https://www.pelajaran.co.id/pendidikan-politik/> Diakses pada hari Sabtu tanggal 15 September 2023 jam. 10.56 Wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Politik> Diakses pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 jam. 13.19 Wib.

[jiptummpg-gdl-yudikurnia-48898-3-babii.pdf](#) Diakses pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 jam. 21.47 Wib.

https://www.kompasiana.com/ilhamramadhan2213/6499b9a808a8b51bbc6a7d42/mengapa-angka-partisipasi-masyarakat-dalam-dunia-politik-masih-dikategorikan-rendah?page=2&page_images=1 Diakses pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 jam. 10.15 Wib.

Judul Buku : SOSIOLOGI POLITIK
Penulis : HERU SULISTIYO, S.Sos., M.Si.,

BIODATA PENULIS :

Heru Sulistiyo, S.Sos., M.Si.,

dilahirkan di Tulungagung, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 01 Desember 1970, anak keempat dari Ibu Kasiyah dan Bapak Rukiyan.



Pernah menempuh pendidikan di SDN Kedungwaru 1, SMPN 2, dan SMAN 1 Kabupaten Tulungagung. Jenjang pendidikan selanjutnya di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), lulus tahun 1993. Setelah lulus dari STPDN bertugas di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Jabatan pertama sebagai Mantri Polisi Pamong Praja (MPPP) di Kecamatan Maospati tahun (1995-1996). Selang 3 (tiga) tahun sejak bekerja, penulis tugas belajar di Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Brawijaya Malang (S1), lulus tahun 1999. Selanjutnya kembali melaksanakan tugas di Kabupaten Magetan, sambil menyelesaikan pendidikan S2 Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang dan lulus tahun 2011.

Selama dinas di Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur penulis pernah menjabat :

1. MPPP Kecamatan Maospati tahun 1995 s.d 1996
2. Sekretaris Kecamatan (Poncol, Takeran, Maospati) tahun 1999 s.d 2003
3. Camat (Takeran, Kartoharjo, Karangrejo) tahun 2003 s.d 2014

4. Kepala Bagian Sumber Daya Alam, kurang lebih selama 1 (satu) tahun.

Adapun Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti selama dinas :

1. Pejabat Pamong Praja Aparatur Pemerintah tahun 1995
2. Training of Trainer (TOT) BPD tahun 2001
3. Kepemimpinan Tingkat IV tahun 2002
4. Kepemimpinan Tingkat III tahun 2007
5. Pengelolaan Panas Bumi tahun 2011
6. Calon Widyaiswara tahun 2013
7. Metodologi Pelatihan Berbasis SKKNI tahun 2019
8. Diklat Asesor Kompetensi Pemerintahan tahun 2020

Pada tahun 2015 penulis kembali ke lembaga pendidikan sebagai kepala bagian Administrasi Keprajaan dan tenaga pelatihan di kampus IPDN regional Riau. Sekarang sebagai pengajar (Dosen tetap) di IPDN Jatinangor, mengampu mata kuliah pengantar sosiologi, sosiologi perdesaan dan perkotaan, dan sosiologi politik. Buku yang pernah ditulis “Tata Kelola Pemerintahan Desa” (2020). Penelitian yang pernah dilakukan “Politik Anggaran” di Pemkab. Magelang (2021). Selain aktif mengajar, menulis jurnal, mendampingi praktek lapangan/pengabdian masyarakat, serta mengikuti kursus dan seminar, saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana Universitas Pasundan program Doktor Ilmu Sosial, konsentrasi Ilmu Administrasi Publik.

Sosiologi **politik** memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan menganalisis dinamika politik dalam masyarakat. Dengan mempelajari interaksi antara faktor-faktor sosial, seperti kelas sosial, etnisitas, agama, gender, dan budaya, serta dampaknya terhadap keputusan politik dan kebijakan, sosiologi politik membantu kita menjelaskan mengapa dan bagaimana kebijakan dan proses politik terbentuk.

Buku Sosiologi Politik ini membahas interaksi kompleks antara faktor sosial dan politik dalam masyarakat. Para pembaca, termasuk mahasiswa, peneliti, dan mereka yang tertarik dalam dinamika sosial dan politik, bisa menjadikan buku ini sebagai salah satu sumber wawasan dalam memahami hubungan yang kompleks antara sosiologi dan politik serta betapa pentingnya konteks sosial dalam dinamika politik dan kebijakan yang ada dalam masyarakat modern.